



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2023


TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, Serta mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan yang berkelanjutan, maka perlu adanya Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perencanaan perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan melibatkan pelaku usaha perkebunan dan peran serta masyarakat untuk memberi arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan perkebunan, maka pemerintah daerah perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4/8
Ditaf
Perlemban
Kodig

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4 1

✓

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Perangkat Daerah Pelaksana adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mendukung pelaksanaan aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
6. Mitra pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.



7. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
8. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit.
9. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
10. Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 ha (dua puluh lima hektar).
11. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan luas 25 ha (dua puluh lima hektar) atau lebih.
12. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
13. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
14. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan penunjukan terakhir tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan.
15. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit Sumatera Selatan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan kewenangan.



- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi.

Pasal 3

RAD-KSB dituangkan dalam bentuk 5 (lima) komponen yaitu:

- a. penguatan data;
- b. penguatan koordinasi dan infrastruktur;
- c. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta percepatan peremajaan;
- d. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- e. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
- f. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO; dan
- g. peningkatan akses pasar produk-produk kelapa sawit.

BAB II

SISTEMATIKA RAD-KSB

Pasal 4

- (1) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III : PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

BAB IV : PENUTUP

- (2) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

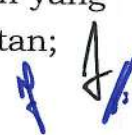
BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 5

Strategi pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Provinsi, meliputi:

- a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
- d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
- e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan;



- f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
- g. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
- h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit; dan
- i. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sektor untuk pembangunan daerah secara optimal.

Pasal 6

Arah kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan difokuskan kepada:

- a. penumbuhan (peningkatan produksi tanaman), yaitu peningkatan produktivitas melalui program intensifikasi dan peremajaan tanaman tua dan rusak;
- b. pengembangan, yaitu perluasan kawasan pada lokus tertentu dan peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat; dan
- c. pemantapan, yaitu penguatan korporasi petani, peningkatan mutu hasil dan pengembangan industri turunan dan olahan.

BAB IV

PELAKSANAAN RAD-KSB

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RAD-KSB dilakukan secara koordinatif oleh tim pelaksana daerah, yang terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah Pelaksana;
 - c. Mitra Pendukung;
 - d. Pelaku Usaha; dan
 - e. Para pihak terkait perkebunan kelapa sawit serta dapat mengikutsertakan peran masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim pelaksana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk membantu tim pelaksana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat tim pelaksana daerah yang berkedudukan di Dinas.
- (4) Gubernur melaksanakan RAD-KSB melalui Dinas.
- (5) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD-KSB kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.



BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan RAD-KSB bersumber dari:

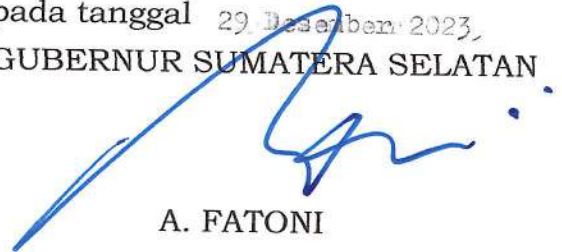
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2023,
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN



A. FATONI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2023.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Dokumen

Rencana Aksi Daerah

KELAPA SAWIT

BERKELANJUTAN

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

Daftar Isi

- GLOSARIUM v
- Bab 1. PENDAHULUAN 1
 - 1.1. Latar Belakang 1
 - 1.2. Kelapa 1
 - 1.3. Keadaan Umum dan Isu Strategis 3
 - 1.3.1. Keadaan Umum 3
 - 1.3.2. Isu Strategis 9
 - 1.4. Maksud, Tujuan, dan sasaran RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan..... 11
 - 1.5. Dasar Hukum..... 12
- Bab 2. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN 14
 - 2.1. Penguatan Data, Koordinasi, dan Infrastruktur.....14
 - 2.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun..... 15
 - 2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan21
 - 2.4. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa 23
 - 2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar
Produk Kelapa Sawit 33
- Bab 3. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI 35
 - 3.1. Koordinasi Implementasi RAD KSB35
 - 3.2. Pembiayaan.....36
 - 3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan40
- Bab 4. PENUTUP43
- Bab 5. LAMPIRAN44

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Tahapan menuju perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (Khatun, Reza, Moniruzzaman, & Yakoob, 2017) 2

Gambar 2.1. Luas kelapa sawit nasional dan Sumatera Selatan tahun 2016-2021 (ribu ha) 4

Gambar 2.2 Rekapitulasi hasil diskusi permasalahan dengan pemangku kepentingan 11

Gambar 2.3. Perkembangan jumlah KUD penerima dana PSR di Provinsi Sumatera Selatan..... 16

Gambar 2.4. Luas rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit (ha) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 17

Gambar 2.5. Perkembangan Harga TBS dan CPO di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2015-2022 di Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022) 20

Gambar 2.6. Jumlah tenaga pendamping peningkatan produksi perkebunan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022) 20

Gambar 2.7. Peta Tutupan Lahan Sawit di Area Karhutla 21

Gambar 2.8. Peta persebaran kelapa sawit di dalam kawasan hutan 25

Gambar 2.9. Peta Sebaran Kelapa Sawit Berdasarkan Fungsi Lindung dan Fungsi Budidaya..... 26

Gambar 2.10. Peta Sebaran Kelapa Sawit dalam KHG..... 27

Gambar 2.11. Proses sertifikasi ISPO 34

Gambar 3.1. Dasar hukum pembiayaan perkebunan kelapa sawit..... 36

Gambar 3.2. Pembiayaan sertifikasi ISPO melalui APBN dan APBD 37

Daftar Tabel

| | | |
|--------------------|---|----|
| Tabel 2.1. | Luas Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Selatan (ha)..... | 4 |
| Tabel 2.2. | Luas tutupan lahan kelapa sawit dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan (ha) | 6 |
| Tabel 2.3. | Luas area kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan (ha)..... | 7 |
| Tabel 2.4. | Sebaran tutupan lahan kelapa sawit di area gambut Provinsi Sumatera Selatan (ha) | 8 |
| Tabel 2.5. | Luas area, jumlah kepala keluarga penerima, dan dana persetujuan revitalisasi perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan..... | 16 |
| Tabel 2.6. | KUD penerima dana PSR berdasarkan kabupaten/kota selama periode 2017-2020 di Provinsi Sumatera Selatan | 17 |
| Tabel 2.7. | Luas target peremajaan sesuai rekomendasi teknis dan realisasi peremajaan (tumbang <i>chipping</i> dan tanam) kelapa sawit rakyat di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2022..... | 18 |
| Tabel 2.8. | Jumlah produsen dan luas pembibitan kelapa sawit per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 | 18 |
| Tabel 2.9. | Lokasi pembibitan per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021..... | 19 |
| Tabel 2.10. | Daftar Kabupaten/Kota yang Masuk pada Area Karhutla | 22 |
| Tabel 2.11. | Desa Rawan Kebakaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 | 22 |
| Tabel 2.12. | Data Realisasi Penanaman Plasma Kebun Kelapa Sawit 2006-2016 per Januari 2019..... | 24 |
| Tabel 2.13. | Rekapitulasi perizinan dan luas lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020..... | 27 |
| Tabel 2.14. | Data Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Selatan | 29 |
| Tabel 2.15. | Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi | 34 |
| Tabel 2.16. | Matriks Rencana Aksi Daerah | 34 |
| Tabel 3.1. | Pilar dan Indikator Terpercaya..... | 40 |
| Tabel 3.2 | Peran pemangku kepentingan dalam proses monitoring dan evaluasi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan | 41 |
| Tabel 3.3. | Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan..... | 42 |

GLOSARIUM

| | |
|-----------------------|---|
| BPD PKS | : Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit |
| CPO | : <i>Crude Palm Oil</i> (minyak kelapa sawit mentah) |
| GAP | : <i>Good Agriculture Practice</i> (praktik pertanian yang baik) |
| Gender | : Sebuah konstruksi sosial atas jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang melakukan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan berdasarkan cara pandang norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat |
| GGP | : <i>Green Growth Plan</i> (Pertumbuhan Ekonomi Hijau) |
| HGU | : Hak Guna Usaha |
| ISPO | : <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> (sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia) |
| KUD | : Koperasi Unit Desa |
| KHG | : Kawasan Hidrologis Gambut |
| Petani plasma | : Petani yang merupakan rekanan perusahaan inti sebagai bagian dari kewajiban perusahaan untuk membangun kebun untuk masyarakat paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan |
| Petani swadaya | : Petani yang dengan inisiatif dan biaya sendiri membuka dan mengelola lahan secara mandiri, tidak terkait dengan perusahaan tertentu |
| PDRB | : Produk Domestik Regional Bruto |
| PMKS | : Pabrik Minyak Kelapa Sawit |
| PSR | : Peremajaan Sawit Rakyat |
| Replanting | : Penanaman kembali terhadap komoditas tanaman yang sebelumnya diusahakan |
| RPPEG | : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut |
| RTRW | : Rencana Tata Ruang Wilayah |
| STDB | : Surat Tanda Daftar Budidaya |
| TBS | : Tandan Buah Segar |
| TBM | : Tanaman Belum Menghasilkan |
| TM | : Tanaman Menghasilkan |
| TTM | : Tanaman Tidak Menghasilkan |
| TR | : Tanaman Rusak |

Bab 1

PENDAHULUAN

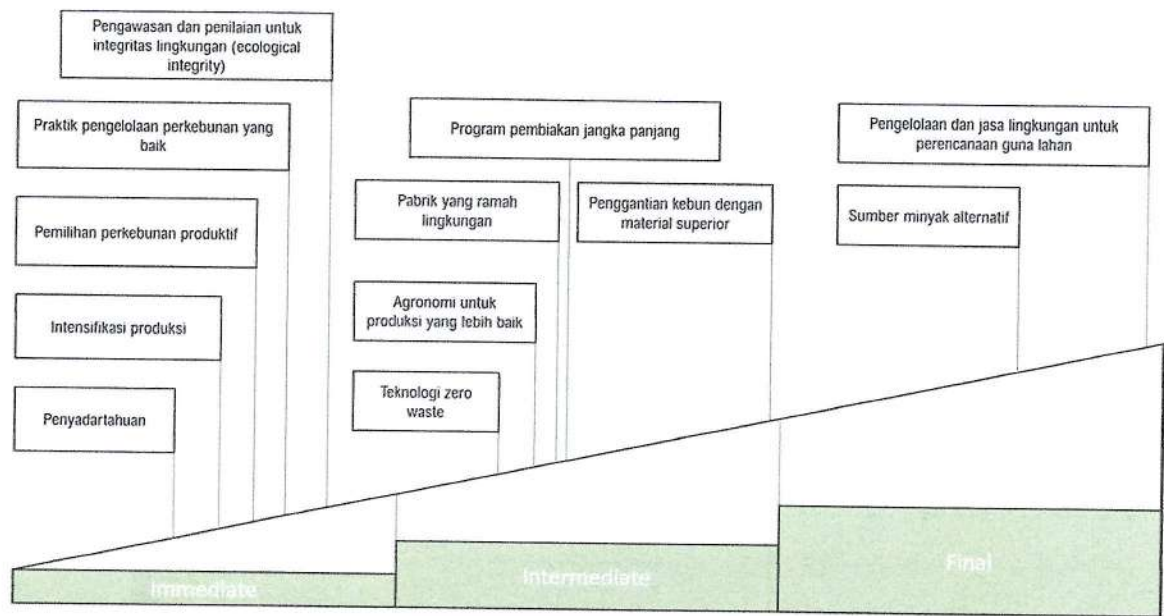
- Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan perkebunan kelapa sawit terluas, menempati urutan kelima pada tingkat nasional dan ketiga di Pulau Sumatera (Ditjenbun, 2021).
- Total luas tutupan lahan kelapa sawit mencapai **1,4 juta hektar**, dimana areal terbesar terdapat di **Kabupaten Musi Banyuasin**, seluas 456.317 hektar, lalu diikuti dengan **Kabupaten Banyuasin** seluas 325.903 hektar.
- Komitmen pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan telah tertuang dalam: (i) RPJMD, (ii) Renstra Disbun, dan (iii) Masterplan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (GGP). Sebagai salah satu komoditas strategis wilayah, Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen **pengelolaan kebun secara lestari melalui Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan** Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027.

1.1. Latar Belakang

1.2. Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional. Indonesia merupakan salah satu negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas tutupan lahan kelapa sawit pada tahun 2019 mencapai 16.381.959 ha (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019). Dengan luasan tersebut, kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 3,5% dan mengentaskan kemiskinan bagi 10 juta orang (Kemenko Perekonomian, 2020). Tingginya kontribusi komoditas sawit tidak terlepas dari meningkatnya kinerja ekspor yang berasal dari *crude palm oil* (CPO) atau dikenal dengan nama minyak sawit mentah dan ragam produk turunannya seperti *biodiesel* dan *oleochemical*. Namun demikian, industri kelapa sawit nasional masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan.

Salah satu tantangan yang dihadapi yaitu kesulitan dalam meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Konsep pembangunan kelapa sawit berkelanjutan berangkat dari prinsip 5P (*people, planet, prosperity, peace dan partnership*). *People* atau manusia, pembangunan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan diharapkan dapat bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan petani kelapa sawit dan pemangku kepentingan terkait. *Planet* atau bumi, budidaya dan tata kelola perkebunan kelapa sawit harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. *Prosperity* atau kemakmuran, pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan hendaknya mampu mewujudkan kesejahteraan petani kelapa sawit, termasuk meningkatkan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan keluarga petani. *Peace* atau perdamaian, pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan harus dapat memastikan bahwa lahan tempat budidaya kelapa sawit merupakan lahan yang benar dan sah, tidak silang sengketa, serta tidak berada pada kawasan hutan. Terakhir, *partnership* atau kemitraan, petani kelapa sawit yang dapat mengoptimalkan kemitraan dengan pemerintah, swasta (termasuk pabrik kelapa sawit), serta lembaga pendanaan. Oleh karena itu, diperlukan desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit yang memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan tentunya membutuhkan tahapan transformasi yang melibatkan para pihak (Gambar 1.1)



Gambar 1.1 Tahapan menuju perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (Khatun, Reza, Moniruzzaman, & Yakoob, 2017)

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024 merupakan momentum penting bagi semua pihak untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi pemerintah dengan para pihak dalam perbaikan tata kelola sawit secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu acuan bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit, melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, dan peningkatan diplomasi serta percepatan pencapaian perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. RAN KSB menginstruksikan kepada para Menteri, Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaksanakan RAN KSB 2019-2024 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang RAN KSB, kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan diintegrasikan ke dalam program kegiatan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target sebanyak 25 daerah menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sampai dengan tahun 2024. RPJMN Tahun 2020-2024 juga menyebutkan adanya prioritas program berupa peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, dengan indikator pertumbuhan PDB pertanian. Selanjutnya RPJMN Tahun 2020-2024 juga menyebutkan adanya kegiatan prioritas berupa peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non-agro yang terintegrasi hulu-hilir, yang indikatornya peningkatan produksi kelapa sawit. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembangunan sektor pertanian, salah satunya adalah pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Di tingkat daerah, Inpres mengamanatkan Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan daerah serta membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) untuk melaksanakan rencana aksi dengan melibatkan para pihak terkait (forum multipihak). Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi prioritas dalam RPJMN untuk menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan perkebunan kelapa sawit terluas, menempati urutan kelima pada tingkat nasional dan ketiga di Pulau Sumatera (Ditjenbun, 2021). Total luas tutupan lahan kelapa sawit mencapai 1,4 juta ha, dimana area terbesar terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin, seluas 456.317 ha, lalu diikuti dengan Kabupaten Banyuasin seluas 325.903 ha. Berdasarkan statistik perkebunan, produksi kelapa sawit pada tahun 2021 dapat mencapai 4.388.731 ton. Sebagai salah satu komoditas strategis wilayah, maka Provinsi Sumatera Selatan sudah selayaknya merencanakan pengelolaan kebun secara lestari melalui Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkomitmen untuk mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Adapun komitmen ini tertuang ke dalam: (i) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis, salah satunya adalah kelapa sawit, melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; (ii) rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau (*green growth plan* - GGP) dengan strategi pengelolaan komoditas unggulan termasuk sawit melalui tata kelola lahan, peningkatan produktivitas, diversifikasi, perbaikan rantai nilai, dan pembagian manfaat yang adil; dan (iii) rencana strategis Dinas Perkebunan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit melalui intensifikasi, optimalisasi, dan stabilitas harga. Selain itu, Provinsi Sumatera Selatan juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah kebun yang memiliki sertifikat ISPO. Saat ini, terdapat 63 perusahaan kelapa sawit yang memiliki sertifikat ISPO di Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022).

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun beberapa kebijakan terkait pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan, salah satunya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan yang disusun pada tahun 2017. Program rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau sangat selaras dan bersinergi dengan program RAN KSB yang diturunkan menjadi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pembukaan lahan tanpa bakar untuk budidaya merupakan langkah dini pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan.

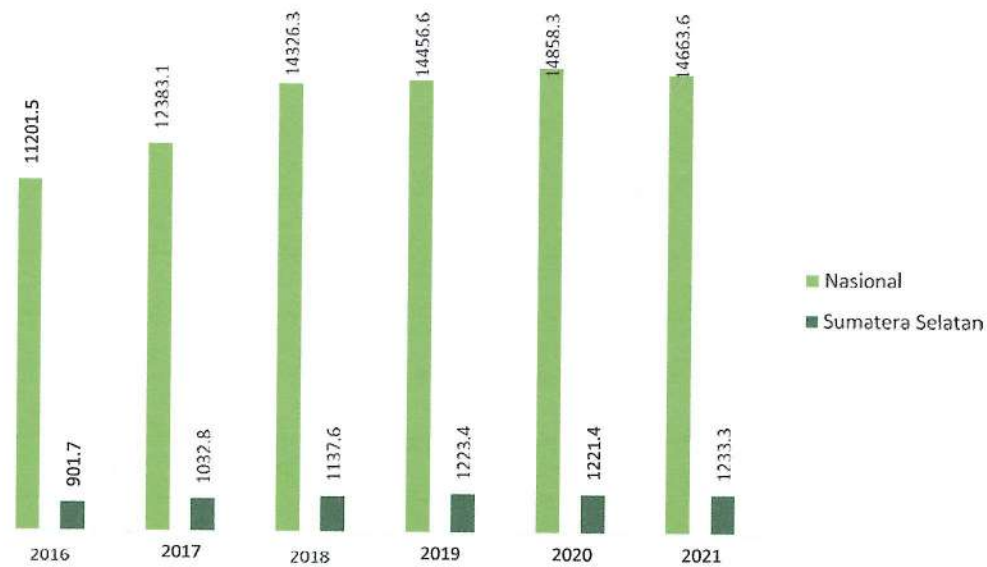
Penyusunan RAD KSB merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pembangunan ekonomi hijau yang sudah dirancang Provinsi Sumatera Selatan. RAD KSB di tingkat provinsi nantinya akan dilanjutkan dengan inisiatif di tingkat kabupaten/kota. Melalui perencanaan yang sistematis dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota, diharapkan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan menjadi gerakan yang masif dan berkesinambungan.

1.3. Keadaan Umum dan Isu Strategis

1.3.1. Keadaan Umum

Luas dan persebaran perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan

Luasan tutupan perkebunan kelapa sawit secara nasional pada tahun 2016 sampai 2021 menunjukkan tren pertumbuhan positif. Peningkatan luas lahan kelapa sawit juga terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, terutama pada tahun 2016-2019 (Gambar 2.1). Direktorat Jenderal Perkebunan mengklasifikasikan kebun kelapa sawit sebagai: (1) perkebunan rakyat; (2) perkebunan negara; dan (3) perkebunan swasta. Arah program dari RAN KSB ditujukan untuk keseluruhan tata kelola perkebunan kelapa sawit, dengan titik berat pada perkebunan rakyat, yang berjumlah sekitar 6.940.000 ha pada tingkat nasional.



Gambar 2.1. Luas kelapa sawit nasional dan Sumatera Selatan tahun 2016-2021 (ribu ha)
 (Sumber data: BPS, 2021 (luas kelapa sawit nasional dan luas kelapa sawit Sumatera Selatan tahun 2016-2018); Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, 2021 (luas kelapa sawit Sumatera Selatan tahun 2019-2021))

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, menempati urutan kelima pada tingkat nasional dan ketiga di Pulau Sumatera (Ditjenbun, 2021). Sekitar 13,34% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan tutupan perkebunan kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan pada tahun 2021 mencapai 1.233.264 ha (Tabel 2.1). Dari luasan tersebut, sekitar 658.504 ha atau 54,18% merupakan perkebunan sawit rakyat. Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin secara berturut-turut merupakan kabupaten dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Sumatera Selatan.

Tabel 2.1. Luas Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Selatan (ha)

| No. | Kabupaten/Kota | Tahun | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Ogan Komering Ulu | 43.590 | 43.670 | 43.702 | 43.709 |
| 2. | Ogan Komering Ilir | 234.290 | 229.157 | 228.430 | 228.603 |
| 3. | Muara Enim | 80.025 | 80.025 | 81.665 | 81.665 |
| 4. | Lahat | 47.412 | 47.412 | 47.412 | 47.527 |
| 5. | Musi Rawas | 128.650 | 130.825 | 131.971 | 142.853 |
| 6. | Musi Banyuasin | 314.442 | 313.702 | 316.484 | 316.680 |
| 7. | Banyuasin | 202.756 | 202.758 | 202.758 | 202.758 |
| 8. | Ogan Komering Ulu Selatan | 6.305 | 5.806 | 6.356 | 6.645 |
| 9. | Ogan Komering Ulu Timur | 21.068 | 21.007 | 20.915 | 20.915 |
| 10. | Ogan Ilir | 11.255 | 11.255 | 11.398 | 11.904 |
| 11. | Empat Lawang | 7.204 | 7.294 | 7.296 | 7.320 |
| 12. | Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) | 36.146 | 36.146 | 36.245 | 36.009 |
| 13. | Musi Rawas Utara | 89.035 | 91.121 | 96.416 | 96.931 |
| 14. | Palembang | 110 | 110 | 283 | 283 |
| 15. | Prabumulih | 820 | 820 | 967 | 967 |
| 16. | Pagar Alam | 31 | 31 | 49 | 49 |
| 17. | Lubuk Linggau | 235 | 235 | 917 | 950 |
| Sumatera Selatan | | 1.223.374 | 1.221.374 | 1.233.264 | 1.245.767 |

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

Permasalahan pengelolaan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan cukup kompleks karena bersifat lintas sektor. Terkait data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur, teridentifikasi bahwa Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki mekanisme pendataan pekebun kelapa sawit yang baku. Saat ini, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) sebagai dasar inventarisasi pekebun kelapa sawit rakyat. Namun demikian, belum semua pekebun kelapa sawit rakyat mendapat STDB karena cakupan area yang cukup luas. Selain itu, saat ini data mengenai perkebunan kelapa sawit masih terpaku pada data tabular tanpa informasi geospasial. Tidak adanya informasi keruangan, membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kesulitan dalam identifikasi area perkebunan kelapa sawit dalam tata ruang daerah, akibatnya masih terjadi alih guna lahan menjadi kelapa sawit di luar peruntukkan rencana tata ruang daerah.

Saat ini, hanya ada satu sumber peta tutupan lahan kelapa sawit yang bersumber dari Kementerian Pertanian. Berdasarkan peta tersebut, luasan tutupan lahan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan diketahui seluas 1.467.676 ha (Tabel 2.2). Terdapat perbedaan antara luas perkebunan kelapa sawit berdasarkan inventarisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan peta tutupan lahan kelapa sawit yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. Selisih luasan tersebut mencapai 234.412 ha.

Apabila ditinjau berdasarkan peruntukkan ruang dalam RTRWP, luas tutupan lahan kelapa sawit yang terdapat dalam kawasan perkebunan seluas 1.005.734 ha. Luas kebun kelapa sawit eksisting lebih tinggi dari luas tutupan lahan sawit yang terdapat pada pola ruang perkebunan. Kondisi ini mengindikasikan tutupan lahan sawit juga terdapat pada pola ruang lain terutama pertanian (181.904 ha) dan permukiman (31.715 ha). Hal yang perlu diteliti lebih lanjut yaitu keberadaan perkebunan sawit pada kawasan hutan, terutama hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Berdasarkan pengolahan peta kawasan hutan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan peta tutupan lahan kelapa sawit Kementerian Pertanian, tutupan lahan kelapa sawit yang terdapat di kawasan hutan seluas 204.811 ha (Tabel 2.3). Adanya perbedaan data luasan perkebunan kelapa sawit turut memengaruhi persebaran perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, dibutuhkan pemetaan dan inventarisasi area perkebunan kelapa sawit dengan skala yang lebih detail. Selain itu, pemetaan luas perkebunan kelapa sawit yang berada pada area berkonflik juga perlu dilakukan sebagai dasar untuk menyusun strategi rekonsiliasi.

Tabel 2.2 Luas tutupan lahan kelapa sawit dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan (ha)

| Kabupaten | Hutan Lindung | Hutan Produksi Konversi | Hutan Produksi Terbatas | Hutan Produksi Tetap | Hutan Suaka Alam | Kawasan Industri | Kawasan Tanjung Api-api | Perairan | Pertanian | Perkebunan | Permukiman | Pertahanan Keamanan | Pertanian | Sempadan Sungai | Sungai | Total |
|---------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------|-----------|------------|------------|---------------------|-----------|-----------------|--------|-----------|
| Banyuasin | 3.440 | 13.678 | - | 2.346 | 791 | 3.426 | 1 | 194 | - | 220.340 | 6.677 | - | 74.901 | 74 | 35 | 325.903 |
| Empel Lewang | 125 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7.484 | 132 | - | 386 | - | - | 8.128 |
| Kota Lubuk Linggau | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.010 | 19 | - | - | - | - | 1.049 |
| Kota Pagar Alam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 4 | - | - | 34 |
| Kota Palembang | - | - | - | - | - | 149 | - | - | - | 6 | 292 | - | 21 | - | - | 468 |
| Kota Prabumulih | - | - | 132 | - | - | - | - | - | - | 553 | 704 | - | 26 | - | - | 1.415 |
| Lahat | - | - | - | 2.130 | 3 | - | - | - | - | 49.277 | 2.480 | - | 512 | - | - | 54.402 |
| Muara Enim | - | 1.577 | 3.176 | 10.881 | - | - | - | 1 | 15 | 54.855 | 1.137 | - | 2.299 | - | - | 73.941 |
| Musi Banyuasin | 123 | 27.431 | 6.317 | 78.777 | 12.186 | - | - | 33 | - | 291.097 | 10.749 | - | 28.721 | - | 154 | 456.317 |
| Musi Rawas | 3 | 3.682 | 210 | 11.803 | - | - | - | - | - | 68.397 | 1.586 | - | 4.407 | - | - | 90.322 |
| Musi Rawas Utara | 10 | 866 | 942 | 8.190 | - | - | - | 2 | - | 48.448 | 675 | - | 9.981 | - | - | 69.122 |
| Ogan Ilir | - | 11 | - | - | - | 463 | - | 3 | - | 18.079 | 1.677 | - | 2.095 | - | - | 22.328 |
| Ogan Komering Ilir | - | 75 | 454 | 29.184 | 11 | - | - | 15 | 6.290 | 175.982 | 5.383 | - | 54.798 | - | - | 272.246 |
| Ogan Komering Ulu | - | - | 8.058 | 2.798 | - | - | - | - | - | 31.510 | 56 | - | 8 | - | - | 42.430 |
| Ogan Komering Ulu Selatan | - | - | 25 | 110 | 9 | - | - | - | - | 1.627 | 62 | 20 | - | - | - | 1.853 |
| Ogan Komering Ulu Timur | - | - | - | 466 | - | - | - | - | - | 11.784 | 79 | 4018 | 1.976 | - | - | 18.443 |
| Penakal Abab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lematang Ilir | - | - | - | 1.826 | - | 418 | - | - | - | 25.255 | 7 | - | 1.769 | - | - | 29.275 |
| Total | 3.713 | 47.320 | 19.314 | 148.512 | 13.000 | 4.456 | 1 | 248 | 6.305 | 1.005.734 | 31.715 | 4.038 | 181.904 | 74 | 189 | 1.467.676 |

Sumber: Peta tutupan lahan kelapa sawit Kementerian Pertanian tahun 2019 dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036 (diolah)

Tabel 2.3 Luas area kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan (ha)

| Kabupaten | Hutan Lindung | Hutan Produksi Terbatas | Hutan Produksi Tetap | Hutan Produksi yang dapat di Konversi | Suaka Margasatwa | Taman Nasional | Taman Nasional (Perairan) | Taman Wisata Alam/ Hutan Wisata | Tubuh Air |
|----------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| Banyuasin | 3.294 | - | 2.334 | 13.264 | 166 | 642 | - | - | - |
| Empat Lawang | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kota Lubuk Linggau | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kota Prabumulih | - | 132 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lahat | - | - | 1.822 | - | - | - | - | - | 3 |
| Muara Enim | - | 3.194 | 5.754 | 1.538 | - | - | - | - | - |
| Musi Banyuasin | 125 | 6.367 | 78.268 | 24.631 | 5.107 | 120 | 2 | - | - |
| Musi Rawas | - | 216 | 9.740 | 2.789 | - | - | - | - | - |
| Musi Rawas Utara | 13 | 978 | 8.136 | 95 | - | - | - | - | - |
| Ogan Ilir | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Ogan Komeriing Ilir | - | 471 | 26.289 | 70 | - | - | - | - | 6 |
| Ogan Komeriing Ulu | - | 8.094 | 2.828 | - | - | - | - | - | - |
| Ogan Komeriing Ulu Selatan | - | 24 | 111 | - | 9 | - | - | - | - |
| Ogan Komeriing Ulu Timur | - | - | 446 | - | - | - | - | - | - |
| Penukal Abab Lematang Ilir | - | - | 1.798 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3.551 | 19.476 | 137.526 | 42.397 | 5.282 | 762 | 2 | 3 | 6 |

Sumber: Peta tutupan lahan kelapa sawit Kementerian Pertanian tahun 2019 dan peta kawasan hutan Balai Besar Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan (diolah)

Perkebunan kelapa sawit di ekosistem gambut

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari tanah mineral dan gambut. Berdasarkan peta Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tutupan lahan kelapa sawit tersebar di 30 KHG dengan luas mencapai 471.717 ha (Tabel 2.4). Tutupan lahan kelapa sawit terdapat di fungsi lindung (259.306 ha) maupun di fungsi budidaya ekosistem gambut (212.411 ha). Tutupan lahan kelapa sawit terutama terdapat di KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur (56.048 ha), KHG Sungai Burnai-Sungai Sibumbang (51.537 ha), dan KHG Sungai Sembilang-Sungai Lalan (46.211 ha). Pengelolaan kebun kelapa sawit di kawasan gambut perlu dilakukan dengan memperhatikan karakteristik ekosistem gambut untuk mencegah kerusakan gambut seperti subsidensi, pengeringan, dan kebakaran. Salah satu pola perkebunan sawit yang disarankan untuk kawasan gambut yaitu menggunakan sistem agroforestri. Pengelolaan perkebunan sawit di kawasan gambut juga diatur melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Sumatera Selatan.

Kebakaran gambut merupakan permasalahan pengelolaan gambut yang masih terjadi hingga saat ini. Salah satu penyebab kebakaran adalah pembukaan lahan dengan membakar oleh petani. Kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan menjadi permasalahan berulang setiap tahun. Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 310 desa rawan kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 5 kabupaten. Kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, namun turut berdampak buruk terhadap kesehatan dan pendidikan. Kebakaran hutan dan lahan juga menjadi sorotan pemerintah nasional karena memberikan dampak negatif terhadap upaya pemerintah untuk mencapai target penurunan emisi GRK sesuai *Nationally Determined Contribution* (NDC). Untuk mengantisipasi kebakaran gambut, pemerintah perlu meningkatkan adopsi metode penyiapan lahan tanpa bakar dalam pengelolaan kebun sawit berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Tabel 2.4 Sebaran tutupan lahan kelapa sawit di area gambut Provinsi Sumatera Selatan (ha)

| Nama KHG | Indikatif Fungsi Lindung E.G. | Indikatif Fungsi Budidaya E.G. | Total |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| KHG Aek Musi - Sungai Upang | 10,763 | 3,854 | 14,617 |
| KHG Aek Sebatik - Aek Musi | 7,651 | 4,605 | 12,256 |
| KHG Sungai Air Hitam Laut - Sungai Buntu Kecil | 2,177 | 992 | 3,169 |
| KHG Sungai Lalan - Sungai Merang | 13,880 | 17,155 | 31,035 |
| KHG Sungai Merang - Sungai Ngirawan | 4,487 | 6,425 | 10,912 |
| KHG Sungai Medak - Sungai Lalan | 9,959 | 6,096 | 16,055 |
| KHG Sungai Ngirawan - Sungai Sembilang | 2,300 | 3,524 | 5,824 |
| KHG Sungai Sembilang - Sungai Lalan | 20,458 | 25,753 | 46,211 |
| KHG Sei Lalan - Sungai Bentayan | 12,164 | 6,341 | 18,505 |
| KHG Air Banyuasin - Sungai Musi | 6,493 | 4,963 | 11,456 |
| KHG Sungai Bentayan - Sungai Penimpahan | 13,445 | 17,984 | 31,429 |
| KHG Sungai Saleh - Sungai Sugihan | 5,340 | 827 | 6,167 |
| KHG Sungai Musi - Sungai Saleh | 3,866 | 2,768 | 6,634 |
| KHG Air Banyuasin - Air Lalang | 17,355 | 26,200 | 43,555 |
| KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur | 30,055 | 25,993 | 56,048 |
| KHG Sungai Penimpahan - Sungai Air Hitam | 2,198 | 2,552 | 4,750 |
| KHG Sungai Alur - Sungai Lintang | 1,518 | 1,300 | 2,818 |
| KHG Sungai Kalumpang | 1,309 | 363 | 1,672 |
| KHG Sungai Musi - Sungai Rawas | 2,139 | 2,306 | 4,445 |
| KHG Sungai Rumpit - Sungai Rawas | 8,462 | 5,866 | 14,328 |
| KHG Sungai Saleh - Sungai Batanghari | 1,578 | 5,347 | 6,925 |

| Nama KHG | Indikatif Fungsi Lindung E.G. | Indikatif Fungsi Budidaya E.G. | Total |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| KHG Sungai Musi - Sungai Empasan | 7,291 | 6,146 | 13,437 |
| KHG Sungai Musi - Sungai Penu | 7,107 | 5,758 | 12,865 |
| KHG Sungai Musi - Sungai Blidah | 3,716 | 1,806 | 5,522 |
| KHG Sungai Penu - Sungai Abah | 3,481 | 1,420 | 4,901 |
| KHG Sungai Musi - Sungai Aek Lematang | 11,086 | 2,847 | 13,933 |
| KHG Sungai Burnai - Sungai Sibumbung | 39,309 | 12,228 | 51,537 |
| KHG Sungai Sibumbung - Sungai Talangrimba | 2,854 | 5,001 | 7,855 |
| KHG Sungai Burung - Sungai Way Mesuji | 6,815 | 5,906 | 12,721 |
| KHG Sungai Beberi - Sungai Way Mesuji | 50 | 85 | 135 |
| Total | 259,306 | 212,411 | 471,717 |

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor 130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/ 2017 dan Peta Tutupan Kelapa Sawit Kementerian Pertanian 2019 (diolah)

Peningkatan kapasitas pekebun swadaya

Demi memastikan pengelolaan kebun kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan pendamping yang membantu para petani dalam pengelolaan kebun kelapa sawit secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki penyuluh perkebunan yang berjumlah 14 orang dengan skema Tenaga Harian Lepas Penyuluh Perkebunan (THL-PP) dan 220 orang dengan skema Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan (TPPP). Dikarenakan luas area kebun kelapa sawit yang cukup luas, jumlah tenaga penyuluh yang ada saat ini masih kurang untuk dapat mendampingi petani kelapa sawit. Hal ini juga menjadi salah satu faktor rendahnya adopsi praktik pertanian yang baik. Selain itu, penyebaran petani kelapa sawit yang cukup jauh menyebabkan informasi mengenai mekanisme bantuan yang diberikan oleh pemerintah menjadi tidak merata sehingga banyak petani kelapa sawit yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah.

Pemerintah dan perkebunan negara dapat terlibat dalam usaha sinergi untuk memberikan bimbingan, arahan, advokasi, dan pembinaan kepada pekebun swadaya dan mandiri. Salah satu program pembinaan pekebun kelapa sawit swadaya adalah program penanaman kembali (*replanting*) dengan pembiayaan sebesar Rp 25.000.000 per ha. Pembiayaan bersumber dari dana Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDKS). Program replanting pertama kali dilakukan di tahun 2017 pada lahan seluas 4.400 ha di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3.2. Isu Strategis

Permasalahan pada pengelolaan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan dipetakan berdasarkan kondisi eksisting dan masukan berbagai pihak (Gambar 2.2). Kemudian dilakukan diskusi dengan panel ahli untuk merumuskan isu strategis. Isu-isu strategis terkait dengan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2023-2027 adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan lahan (*land clearing*) tanpa bakar

Pembukaan lahan tanpa bakar merupakan upaya untuk mengurangi risiko kebakaran yang sulit untuk dipadamkan serta polusi udara akibat praktik membuka lahan dengan cara membakar.

2. Ketersediaan bibit kelapa sawit bersertifikat

Salah satu praktik baik (*best practice*) dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit adalah adanya ketersediaan bibit kelapa sawit bersertifikat dengan harga terjangkau dan mudah didapatkan artinya tersedia di banyak tempat (instansi atau unit usaha pembibitan) dan tidak harus mengantre dalam waktu yang lama.

3. Standar tata kelola dan tata budidaya

Perkebunan kelapa sawit agar menghasilkan produksi tandan buah segar (TBS) yang optimal diperlukan pemupukan yang memenuhi kebutuhan tanaman kelapa sawit sesuai lahan, umur dan topografinya. Sebelum dilakukan pemupukan perlu dilakukan pembersihan piringan tanaman kelapa sawit, perlu penekanan gulma dan perlu perawatan secara standar, untuk itu diperlukan standar tata kelola dan tata budidaya. Salah satu upaya peningkatan standar tata kelola dan budidaya adalah melalui sertifikasi ISPO. Saat ini, realisasi ISPO di Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai 63 perusahaan kelapa sawit. Sertifikasi ISPO merupakan upaya untuk memastikan praktik yang dilakukan oleh perkebunan dilakukan secara berkelanjutan.

4. Pembukaan kebun kelapa sawit di area kawasan hutan dan gambut

Masyarakat pekebun yang membuka perkebunan kelapa sawit di area kawasan hutan dan area gambut menjadi salah satu pemicu sengketa lahan.

5. Penanganan sengketa lahan

Sengketa lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit mungkin terjadi baik antar perusahaan perkebunan, antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat, antar masyarakat, antara pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, terdapat permasalahan mengenai masyarakat yang secara sengaja atau tidak sengaja membangun kebun kelapa sawit di kawasan yang dilindungi misalnya hutan lindung atau hutan suaka dan kawasan lahan/hutan yang tidak dapat dikonversi. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah untuk mediasi dan menyelesaikan sengketa lahan/hutan untuk kemaslahatan bersama.

6. Penanganan Hilirisasi Kelapa Sawit

Hilirisasi merupakan strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas. Melalui proses hilirisasi, ekspor komoditas tidak hanya ditujukan untuk bahan baku atau *crude palm oil* (CPO), tetapi berupa barang jadi seperti minyak goreng, *biodiesel*, *biobenzen*, dan produk turunan lainnya. Untuk memproduksi minyak goreng dan variasinya perlu pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) untuk menghasilkan produk antara CPO. Sementara itu, untuk menghasilkan *biodiesel* dan *biobenzen* diperlukan pembangunan pabrik industri minyak tanaman untuk menghasilkan *Industry Vegetable Oil* (IVO). Inisiasi hilirisasi kelapa sawit dapat mengurangi kerentanan petani terhadap fluktuasi harga TBS. Harga kelapa sawit yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan seringkali tidak diberlakukan di lapangan karena pabrik memiliki mekanisme tersendiri dalam membeli TBS kelapa sawit. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan yaitu pendirian *mini mill* yang berbasis perkebunan kelapa sawit rakyat atau pekebun. Pemanfaatan produk turunan berbasis petani kecil (*smallholder*) diharapkan dapat dilakukan melalui korporasi petani sawit.

7. Akses Dana Penanaman Kembali (*Replanting*) Kebun Kelapa Sawit

Para pekebun kelapa sawit mandiri dikarenakan luasan areal perkebunannya yang kecil dan terbatas, sering mengalami kesulitan pendanaan pada saat akan melakukan *replanting*. Hal ini masih menjadi permasalahan yang krusial bagi pekebun kelapa sawit. Untuk itu perlu instansi sumber pendanaan seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) dan perbankan untuk membuka akses pendanaan *replanting* kebun kelapa sawit.

8. Pemberdayaan Perempuan dalam Sistem Usaha Tani Kelapa Sawit

Perempuan memiliki keterlibatan yang cukup tinggi dalam pengelolaan sistem usaha tani kelapa sawit, terutama untuk perkebunan rakyat (pekebun swadaya). Berdasarkan penelitian ICRAF (2020) pada 36 desa di Sumatera Selatan, untuk sistem usaha tani monokultur, perempuan umumnya terlibat pada proses pembibitan dan penanaman, pemupukan, pemeliharaan tanaman, serta pemanenan. Perempuan juga tidak jarang turut andil dalam proses pembukaan dan penyiapan lahan. Pada sistem pertanian agroforestri peran perempuan lebih tinggi dibanding pada sistem pertanian monokultur. Peran perempuan dan laki-laki hampir setara pada sistem usaha tani sawit agroforestri. Walaupun perempuan memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan sistem usaha tani sawit, pelibatan perempuan dalam pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan masih sangat minim. Kelompok perempuan

umumnya dilibatkan dalam pengelolaan produk turunan kelapa sawit dalam bentuk industri rumah tangga. Petani perempuan, terutama perempuan kelapa keluarga, perlu dilibatkan dalam pembinaan pengelolaan kebun sawit berkelanjutan. Pembinaan kelembagaan dan bantuan juga perlu dialokasikan untuk kelompok tani perempuan. Kelompok perempuan dapat dibina secara lebih intensif untuk pengelolaan sawit agroforestri melihat keterlibatan perempuan yang cenderung lebih tinggi pada sistem usaha tani sawit agroforestri dibanding sawit monokultur.



Gambar 2.2 Rekapitulasi hasil diskusi permasalahan dengan pemangku kepentingan

1.4. Maksud, Tujuan, dan sasaran RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2027 dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan arahan dan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Menyediakan instrumen untuk membantu pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.

Tujuan penyusunan pedoman RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2027 adalah:

- a. Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.
- b. Meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan yang lebih terarah dan terintegritasi dalam pelaksanaannya, serta mendapat dukungan para pemangku kepentingan.
- c. Mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2024, khususnya di bidang pembangunan pertanian dan perkebunan kelapa sawit.

Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan pedoman RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2027 yaitu:

- a. Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Terwujudnya pembangunan perkebunan kelapa sawit yang komprehensif berkelanjutan, melalui:
 1. Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
 2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta percepatan peremajaan;
 3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 4. Penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
 5. Pelaksanaan dukungan percepatan pelaksanaan ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Dalam penyusunan dokumen RAD KSB Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027 mengacu pada beberapa prinsip yaitu:

- a. Integrasi
RAD-KSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu dan/atau terintegrasi ke dalam RPJMD dan Renstra OPD yang membidangi Perkebunan dan OPD lain yang terkait.
- b. Sinkronisasi
RAD KSB merupakan rencana aksi di tingkat daerah yang tersinkronisasi antara satu bidang dengan bidang lainnya termasuk pengarusutamaan gender.
- c. Partisipasi
RAD KSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

1.5. Dasar Hukum

Landasan hukum bagi penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 - 2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 - 2024;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2026;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan;
18. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 438 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi Sumatera Selatan Periode 2023-2027.

Bab 2

INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

- *Penyusunan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah.*
- *Integrasi dilakukan dengan mengacu dan/atau menghubungkan ke dalam RPJMD dan Renstra OPD yang membidangi perkebunan dan OPD lain yang terkait.*
- *Integrasi program dan kegiatan terdiri dari lima bagian yang tersinkronisasi dengan kebijakan pada tingkat nasional: (1) penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur; (2) peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun; (3) pengelolaan dan lingkungan; (4) tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan (5) dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.*

2.1. Penguatan Data, Koordinasi, dan Infrastruktur

Dalam penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur terdapat tiga unsur yang penguatan yaitu : (1) penguatan data dan pengelolaan data, (2) penguatan koordinasi dan, (3) peningkatan layanan infrastruktur.

Penguatan Data dan Pengelolaan Data

Ketersediaan data merupakan salah satu prasyarat kunci perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan. Penggunaan data yang shahih bertujuan untuk memastikan proses perencanaan yang disusun tepat sasaran dan menjawab isu strategis dan permasalahan di lapangan. Salah satu permasalahan dalam perencanaan kelapa sawit berkelanjutan adalah rendahnya ketersediaan data. Selain tidak lengkap, seringkali terdapat perbedaan data antar instansi. Selain itu, belum adanya pedoman pengolahan data, rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta adanya wilayah yang sulit dijangkau berkontribusi terhadap kesulitan mengakses data yang shahih.

Data dasar pekebun yang tersedia saat ini masih bersifat umum. Diperlukan penerapan prinsip *by name by address* pada kegiatan penyusunan data dasar pekebun. Ketersediaan data spasial tutupan kebun kelapa sawit juga masih minim, yakni hanya tersedia data perkebunan sawit dari Kementerian Pertanian. Provinsi belum memiliki data spasial yang diperbaharui secara berkala. Untuk mendorong penguatan pendataan perlu dilakukan kegiatan pemetaan partisipatif.

Data pengelolaan kebun juga perlu diidentifikasi sehingga karakteristik pengelolaan kelapa sawit akan dapat dilakukan secara baik. Untuk itu data kategori pengelolaan oleh swasta dalam skema inti-plasma, dan swadaya perlu juga dimiliki secara valid. Data ini harus memiliki kesamaan baik dilihat secara data tabular maupun secara spasial dan mestinya dapat disepakati antar seluruh pemangku kepentingan atau wali data.

Penguatan Koordinasi

Proses koordinasi antar instansi dalam perencanaan pengelolaan perkebunan sawit belum maksimal. Hal ini ditandai dengan lemahnya sinergi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan tata kelola kelapa sawit akibat tidak adanya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi-pihak yang memfasilitasi proses koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sektor privat, serta kelompok tani. Selain itu, diperlukan penyelarasan pemahaman semua pihak terhadap regulasi dan kebijakan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Peningkatan layanan infrastruktur

Permasalahan utama berkaitan dengan layanan infrastruktur yaitu kurangnya infrastruktur jalan yang dapat digunakan petani untuk mengangkut hasil kebun. Hal ini berdampak pada tingginya biaya transportasi TBS dalam proses pengangkutan hingga ke pabrik kelapa sawit. Margin transportasi yang tinggi seringkali dibebankan kepada petani, sehingga harga di tingkat petani cenderung rendah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, khususnya jalan, adalah dengan mendorong kolaborasi para pelaku usaha untuk meningkatkan layanan infrastruktur termasuk jalan dan infrastruktur dasar. Salah satu skema kerja sama yang dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yaitu Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

2.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Peningkatan kapasitas petani dalam praktik GAP

Good Agricultural Practices (GAP) adalah cara budidaya yang baik untuk menghasilkan komoditas yang bermutu tinggi, terjamin, aman, efisien, berwawasan lingkungan, dan dapat dilacak (*traceable*) proses pengolahan dan pemasarannya (Litbang Pertanian, 2015). Peraturan Menteri Pertanian No. 131/Permentan/OT.140/112/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang Baik menjadi acuan bagi penerapan GAP. Pedoman tersebut mencakup upaya (i) peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit; (ii) peningkatan mutu hasil tanaman kelapa sawit; dan (iii) pengembangan tanaman kelapa sawit sebagai salah satu penghasil bahan baku industri.

Adopsi GAP di tingkat petani, terutama petani mandiri dan swadaya, masih terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan:

- Minimnya penggunaan bibit unggul yang bersertifikat
- Unit pengelolaan pupuk organik masih sangat terbatas
- Penggunaan sarana produksi lain belum optimal
- Pelaksanaan teknis budidaya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Melalui penerapan GAP, diharapkan terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan GAP juga menjadi salah satu prasyarat bagi peningkatan jangkauan pasar produk kelapa sawit, terutama untuk ekspansi pasar global.

Peningkatan peremajaan tanaman kelapa sawit

Program peremajaan kelapa sawit dimulai pada tahun 2006 melalui penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No. 33 Tahun 2006 yang menginstruksi peremajaan tiga komoditas strategis, termasuk kelapa sawit. Program peremajaan kelapa sawit mulanya dinamai program revitalisasi perkebunan. Program ini berupaya untuk mempercepat pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman kelapa sawit yang didukung dengan kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah. Program ini juga melibatkan perusahaan perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengelolaan, dan pemasaran hasil.

Sampai dengan bulan Desember 2017, jumlah dana yang disetujui untuk revitalisasi perkebunan kelapa sawit untuk kebun inti dan plasma di Provinsi Sumatera Selatan mencapai dua triliun rupiah (Tabel 2.5). Dana tersebut dialokasikan untuk 23.954 kepala keluarga pekebun kelapa sawit yang terdapat di Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Ogan Komering Ilir. Jumlah peserta revitalisasi perkebunan sawit terbanyak hingga tahun 2017 terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin dengan jumlah peserta 7.676 KK. Program revitalisasi ini didanai oleh APBN dan pendanaan dari sektor privat.

Tabel 2.5. Luas area, jumlah kepala keluarga penerima, dan dana persetujuan revitalisasi perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan

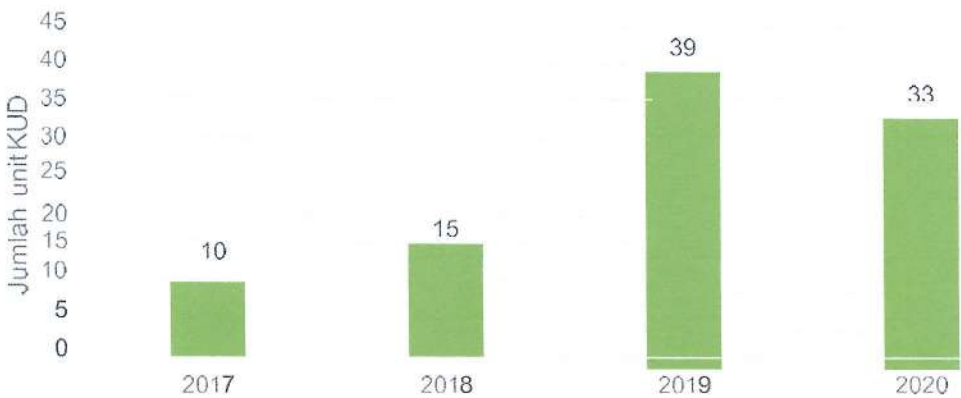
| No. | Kabupaten | Realisasi Penanaman s/d Desember 2017 | | | Persetujuan Ditjenbun (Rp) |
|--------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|
| | | Inti (ha) | Plasma (ha) | KK (orang) | |
| 1 | Banyuasin | 25.236,16 | 21.291,61 | 6.637,00 | 751.673.372.000 |
| 2 | Musi Banyuasin | 36.383,41 | 11.989,15 | 7.676,00 | 669.950.776.134 |
| 3 | PALI | 8.161,65 | 3.192,00 | 4.414,00 | 385.766.869.970 |
| 4 | Ogan Komering Ilir | 6.889,30 | 1.028,58 | 3.667,00 | 289.857.000.000 |
| 5 | Musi Rawas | 0 | 0 | 572 | 12.621.071.000 |
| 6 | Musi Rawas Utara | 5.058,65 | 0 | 765 | 294.871.000.000 |
| 7 | Ogan Komering Ulu | 1.824,77 | 0 | 988 | 127.874.000.000 |
| Jumlah | | 83.553,94 | 37.501,34 | 23.954,00 | 2.237.743.089.104 |

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Setelah program revitalisasi, pemerintah melaksanakan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). PSR membantu pekebun swadaya dan mandiri untuk memperbarui tanaman kelapa sawit yang sudah tua untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi risiko pembukaan lahan sawit baru. Pemerintah nasional menargetkan peremajaan kebun sawit petani seluas 540.000 ha sampai tahun 2024, namun capaian di tahun 2022 belum mencapai setengahnya (BPDP-KS, 2022).

Peremajaan dilakukan menggunakan bibit unggul dan sistem *Good Agriculture Practice* (GAP). Pembiayaan program PSR bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Pekebun diberikan dana sebesar 30 juta/ha untuk maksimal lahan seluas 4 ha/pekebun.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, pendanaan untuk program PSR disalurkan kepada pekebun melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Sampai dengan tahun 2020, terdapat 97 KUD yang telah menerima dana PSR di Sumatera Selatan (Gambar 2.3).



Gambar 2.3. Perkembangan jumlah KUD penerima dana PSR di Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah KUD penerima dana PSR selama periode tahun 2017 sampai 2019 cenderung meningkat. Terjadi penurunan di tahun 2019-2020 akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, sebaran KUD penerima dana PSR pada tahun 2019-2020 jauh lebih tinggi dibanding 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 KUD penerima dana PSR tersebar di 9 kabupaten, sedangkan pada tahun 2017-2018 dana PSR hanya disalurkan pada 3 kabupaten (Tabel 2.6). Penerimaan dana PSR kabupaten dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi teknis (Rekomtek) peremajaan.

Kabupaten dengan jumlah KUD penerima dana PSR tertinggi terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin lalu disusul Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Muara Enim. Penerimaan dana PSR didasarkan pada luas dan kondisi tanaman kelapa sawit. Musi Banyuasin merupakan kabupaten dengan kebun kelapa sawit terluas mencapai 316.484 ha pada tahun 2021 (Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022).

Tabel 2.6. KUD penerima dana PSR berdasarkan kabupaten/kota selama periode 2017-2020 di Provinsi Sumatera Selatan

| No | Kabupaten | Jumlah KUD penerima PSR | | | | | |
|--------|--------------------|-------------------------|------|------|------|--------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Jumlah | Persentase |
| 1. | Musi Banyuasin | 7 | 8 | 14 | 9 | 38 | 39,18 |
| 2. | Muara Enim | 1 | | 8 | 5 | 14 | 14,43 |
| 3. | Ogan Komering Ilir | 2 | 7 | | 10 | 19 | 19,59 |
| 4. | Ogan Komering Ulu | | | 5 | 1 | 6 | 6,19 |
| 5. | Musi Rawas | | | 4 | 2 | 6 | 6,19 |
| 6. | Prabumulih | | | 1 | 1 | 2 | 2,06 |
| 7. | Banyuasin | | | 4 | 2 | 6 | 6,19 |
| 8. | Musi Rawas Utara | | | 1 | 1 | 2 | 2,06 |
| 9. | Lahat | | | 2 | 2 | 4 | 4,12 |
| Jumlah | | 10 | 15 | 39 | 33 | 97 | 100,00 |

Sumber: Dinas Perkebunan provinsi Sumatera Selatan tahun 2022

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, luas areal yang menjadi target peremajaan sesuai dengan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit seluas 48.329,87 ha. Realisasi penanaman peremajaan yaitu 31.971,29 ha selama periode 2017-2021. Rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah rekomendasi peremajaan seluas 6.331,32 ha terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 11.995,90 ha. Rekomendasi teknis mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 7.306,39 ha. Adanya penurunan ini menunjukkan kondisi tanaman yang tidak produktif/rusak semakin sedikit (Gambar 2.4).



Gambar 2.4. Luas rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit (ha) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021

Program peremajaan kelapa sawit masih difokuskan pada kabupaten yang menjadi sentra komoditas yaitu Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Muara Enim. Peremajaan kelapa sawit dilakukan dengan metode tumbang *chipping*¹ yang dilanjutkan dengan penanaman. Realisasi tumbang *chipping* mencapai 33.363,41 ha atau sebesar 69,60% dari total lahan yang direkomendasikan, sedangkan realisasi tanam seluas 31.971,29 ha atau 66,15% (Tabel 2.7).

¹ Tumbang *chipping* merupakan tahapan awal dalam peremajaan kelapa sawit yang dilakukan dengan menumbangkan pohon kelapa sawit kemudian dilakukan pencacahan (*chipping*) untuk mempercepat proses pembusukan.

Tabel 2.7. Luas target peremajaan sesuai rekomendasi teknis dan realisasi peremajaan (tumbang *chipping* dan tanam) kelapa sawit rakyat di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2022

| No. | Kabupaten | Target | Realisasi | |
|--------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------|
| | | Luas Peremajaan Sesuai Rekomtek (ha) | Tumbang <i>Chipping</i> (ha) | Tanam (ha) |
| 1. | Ogan Komering Ilir | 20.996,35 | 10.759,75 | 10.157,68 |
| 2. | Lahat | 906,80 | 639,46 | 419,83 |
| 3. | Muara Enim | 4.716,09 | 4.387,51 | 4.387,51 |
| 4. | Musi Banyuasin | 16.820,12 | 14.969,52 | 14.640,06 |
| 5. | Kota Prabumulih | 386,70 | 120,05 | 120,05 |
| 6. | Musi Rawas | 1.595,75 | 1.517,46 | 1.375,59 |
| 7. | Ogan Komering Ulu | 1.278,47 | 632,99 | 440,84 |
| 8. | Musi Rawas Utara | 389,67 | 164,93 | 0 |
| 9. | Banyuasin | 1.239,91 | 444,73 | 429,73 |
| Jumlah | | 48.329,87 | 33.636,41 | 31.971,29 |

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022.

Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program peremajaan tetapi masih banyak pekebun yang belum memahami cara mengakses pendanaan PSR. Evaluasi utama dari program peremajaan adalah sulitnya penyaluran dana akibat legalitas lahan yang dimiliki petani belum sesuai dengan syarat pengajuan PSR.

Untuk mendukung PSR pemerintah telah mendorong perkembangan produsen bibit kelapa sawit dengan tujuan agar bibit tersedia dengan jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau. Jumlah produsen bibit kelapa sawit di Sumatera Selatan tercatat sebanyak 47 unit yang terdiri dari perusahaan maupun usaha perorangan. Luas kebun bibit kelapa sawit mencapai 564,96 ha yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Tabel 2.8).

Tabel 2.8. Jumlah produsen dan luas pembibitan kelapa sawit per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021

| No | Kabupaten | Jumlah Perusahaan/Usaha Pembibitan | Luas Pembibitan (ha) | Persentase (%) |
|--------|--------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | Palembang | 1 | 1,50 | 0,27 |
| 2 | Banyuasin | 16 | 113,00 | 20,00 |
| 3 | Musi Banyusin | 6 | 113,36 | 20,07 |
| 4 | Lubuk Linggau | 4 | 35,97 | 6,37 |
| 5 | Musi Rawas | 3 | 36,03 | 6,38 |
| 6 | Musi Rawas Utara | 1 | 20,00 | 3,54 |
| 7 | Lahat | 1 | 23,00 | 4,07 |
| 8 | Muara Enim | 3 | 30,41 | 5,38 |
| 9 | Ogan Komering Ilir | 7 | 166,09 | 29,40 |
| 10 | Ogan Ilir | 2 | 25,60 | 4,53 |
| Jumlah | | 44 | 564,96 | 100,00 |

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.8 terlihat bahwa produsen bibit kelapa sawit tersebar di kabupaten yang menjadi sentra pengembangan tanaman kelapa sawit yaitu Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Banyuasin dan tujuh kabupaten/kota lainnya. Tabel 2.9 menjabarkan lokasi pembibitan kelapa sawit di sepuluh kabupaten/kota.

Tabel 2.9. Lokasi pembibitan perkabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

| No | Kabupaten/ Kota | Lokasi pembibitan (Kecamatan/Desa) | |
|----|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | | Kecamatan | Desa |
| 1 | Palembang | Sukarame | |
| 2 | Banyuasin | Sembawa | Lalan, Sembawa, St Sari, Mainan |
| | | Banyuasin I | Prajen, Pematang Palas, Banten |
| | | Banyuasin III | Langkan |
| | | Talang Kelapa | Sukajadi, Talang Buluh |
| | | Air Kumbang | Panca Jaya |
| | | Muara Padang | Karang Anyar |
| | | Rambutan | Sungai Pinang |
| 3 | Musi Banyuasin | Babat Toman | Babat Toman, Sugih Waras |
| | | Keluang | Dawas |
| | | Sungai Lilin | Sumber Rezeki |
| | | Sekayu | Soak Baru |
| | | Tungkal Jaya | Sido Mulyo |
| | | Batang Hari Leko | Tanah Abang |
| 4 | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau Selatan | Air Temam |
| | | Lb Linggau Barat II | Pasar Pemerl |
| | | Lb Linggau Timur II | Karya Bakti |
| 5 | Musi Rawas | Muara Beliti | Muara Beliti |
| | | Purwodadi | P1 Mardiharjo |
| | | Tugumulyo | Wonorejo |
| 6 | Muratara | Muara Lakitan | |
| 7 | Lahat | Kikil | Hujan Mas |
| 8 | Muara Enim | Tanjung Agung | Penyandingan |
| | | Rambang Daangku | Jemenang |
| | | Gunung Megang | Panang Jaya |
| 9 | OKI | Mesuji | Surya Adi dan Kembang Jaya |
| | | Pedamaran | Pulau Geronggang/Embacang |
| | | Mesuji Jaya | Sumber Baru |
| | | Lempuing | |
| | | Cengal | Sungai Jeruju |
| | | Mesuji Makmur | Cahaya Makmur |
| 10 | Ogan Ilir | Tanjung Batu | Burai |
| | | Indralaya Utara | Palem Raya |

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022

Peningkatan kapasitas kelembagaan pekebun dalam penentuan harga

Kelembagaan pekebun sawit masih belum optimal untuk meningkatkan posisi tawar petani khususnya dalam hal penentuan harga. Selama kurun waktu 2015 sampai tahun 2022, harga TBS di tingkat petani relatif stagnan atau tidak mengalami perubahan yang signifikan meskipun harga CPO sempat mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai 2021.

Harga TBS kembali mengalami penurunan pada tahun 2022. Dari tahun 2015 hingga 2022 peningkatan harga TBS hanya mencapai Rp 216 per kilogram.

Berkebalikan dengan perkembangan harga TBS, tren harga CPO cenderung menunjukkan fluktuasi. Selama periode tahun 2015 sampai 2017, harga CPO cenderung naik, kemudian mengalami penurunan dan stagnan sampai tahun 2019. Pada periode 2019-2021, harga CPO kembali mengalami kenaikan yang signifikan, namun menurun pada tahun 2022 (Gambar 2.5).



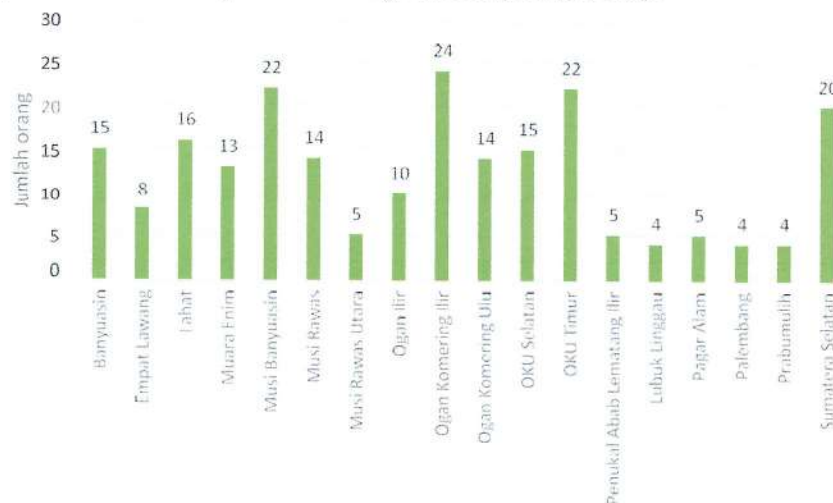
Gambar 2.5. Perkembangan Harga TBS dan CPO di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2015-2022 di Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022)

Perubahan harga CPO tidak serta merta berpengaruh terhadap kenaikan TBS. Stagnasi harga TBS menunjukkan belum ada atau belum berfungsinya kelembagaan yang meningkatkan daya tawar petani. Di sisi lain, harga sarana produksi seperti pupuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan khususnya selama 1 (satu) tahun terakhir. Kenaikan harga sarana produksi yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga TBS menyebabkan daya beli petani terhadap sarana produksi semakin rendah. Hal ini berdampak pada kesejahteraan pekebun dan kesulitan petani untuk mengadopsi sistem pengelolaan lahan berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas pekebun sawit melalui penyuluhan dan pendampingan

Pemerintah telah berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas petani dengan mendorong kegiatan penyuluhan untuk mempercepat transfer pengetahuan dan keterampilan. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Perkebunan menginisiasi program pengangkatan tenaga harian lepas (THL) penyuluh perkebunan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 37/Kpts/SM.040/01/2022. Program ini telah berhasil mengangkat 14 orang THL penyuluh yang disebar di beberapa kabupaten/kota di Sumatera khususnya pada sentra perkebunan kelapa sawit.

Untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengangkat Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan. Pengangkatan tenaga pendamping ini dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 179/KPTS/Disbun/2022 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan. Sebanyak 220 orang tenaga pendamping dengan kualifikasi pendidikan S1 didapatkan dari kegiatan ini (Gambar 2.6).



Gambar 2.6. Jumlah tenaga pendamping peningkatan produksi perkebunan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022)

Tenaga pendamping ditugaskan pada daerah sentra perkebunan termasuk perkebunan kelapa sawit antara lain Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan OKU Timur. Kegiatan pendampingan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun mulai dari peningkatan produksi tanaman hingga pemasaran. Kegiatan pendampingan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk pekebun kelapa sawit.

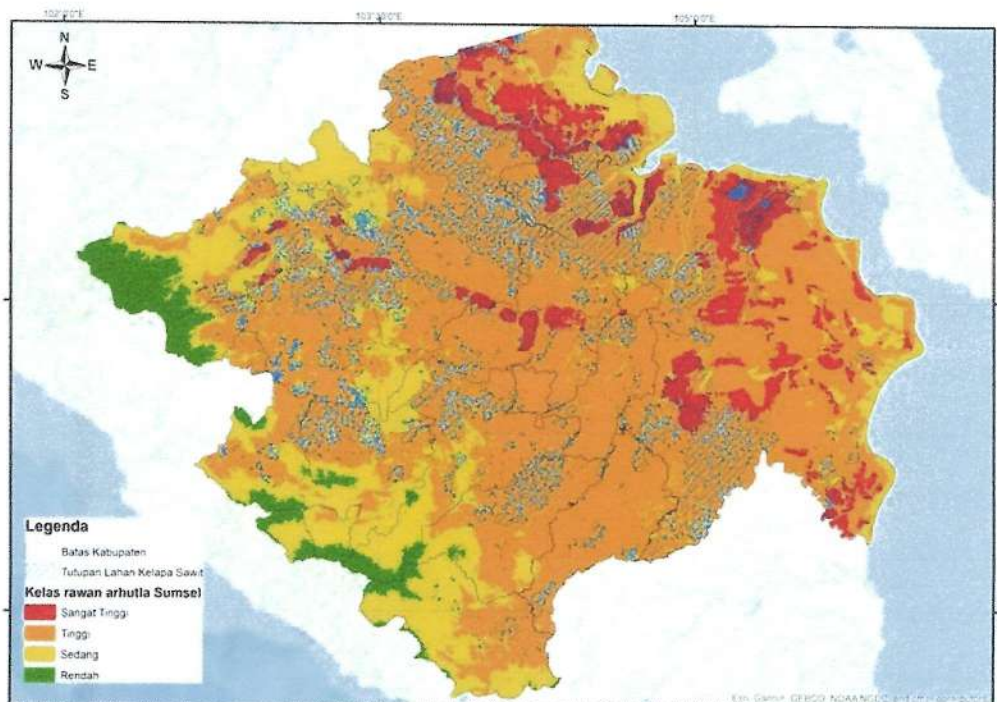
Namun, pengangkatan penyuluh harian lepas dan tenaga pendamping ternyata belum dapat mendorong peningkatan intensitas kegiatan penyuluhan. Frekuensi penyuluhan pertanian khususnya kelapa sawit masih rendah, tenaga penyuluh/pendamping belum memiliki keahlian spesifik di bidang budidaya tanaman kelapa sawit. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kuantitas jumlah penyuluh salah satunya melalui petani *champion* dan peningkatan kompetensi penyuluh melalui berbagai pelatihan.

2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan antara lain untuk: (i) meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan; (ii) mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar OPD, antara lain OPD yang membidangi Pertanian (Perkebunan), Lingkungan Hidup, Kehutanan dan aparat keamanan daerah; (iii) mendukung komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis; dan (iv) mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

Ancaman Kebakaran Hutan, Lahan, dan Kebun

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki titik api (*hotspot*) kebakaran hutan dan lahan terbanyak. Sebagian titik berlokasi pada area perkebunan. Berdasarkan PermenLHK No. 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla), pelaku usaha perkebunan memiliki kewajiban dalam usaha pengendalian karhutla. Sekitar 76,9% luasan tutupan lahan sawit di Sumatera Selatan berada di area lahan yang rawan karhutla (Gambar 2.7).



Gambar 2.7. Peta Tutupan Lahan Sawit di Area Karhutla

Tabel 2.10. Daftar Kabupaten/Kota yang Masuk pada Area Karhutla

| No. | Kabupaten | Tingkat Rawan Karhutla | | | | Total |
|-------|----------------------------|------------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi | |
| 1. | Banyuasin | - | 3.556 | 258.145 | 64.202 | 325.903 |
| 2. | Empat Lawang | - | 1.326 | 6.802 | - | 8.128 |
| 3. | Kota Lubuk Linggau | - | 16 | 1.033 | - | 1.049 |
| 4. | Kota Pagar Alam | - | 26 | 8 | - | 34 |
| 5. | Kota Palembang | - | 40 | 428 | - | 468 |
| 6. | Kota Prabumulih | - | 8 | 1.407 | - | 1.415 |
| 7. | Lahat | - | 3.557 | 50.845 | - | 54.402 |
| 8. | Muara Enim | - | 3.546 | 65.964 | 4.431 | 73.941 |
| 9. | Musi Banyuasin | - | 19.289 | 342.545 | 94.483 | 456.317 |
| 10. | Musi Rawas | - | 10.097 | 79.153 | 1.072 | 90.322 |
| 11. | Musi Rawas Utara | 53 | 11.387 | 48.635 | 9.047 | 69.122 |
| 12. | Ogan Ilir | - | 91 | 22.045 | 192 | 22.328 |
| 13. | Ogan Komering Ilir | - | 3.886 | 180.186 | 88.174 | 272.246 |
| 14. | Ogan Komering Ulu | - | 92 | 42.338 | - | 42.43 |
| 15. | Ogan Komering Ulu Selatan | - | 777 | 1.076 | - | 1.853 |
| 16. | Ogan Komering Ulu Timur | - | 10 | 18.433 | - | 18.443 |
| 17. | Penukal Abab Lematang Ilir | - | 78 | 10.096 | 19.101 | 29.275 |
| Total | | 53 | 57.782 | 1.129.139 | 280.702 | 1.467.676 |

Terdapat 310 desa di Sumatera Selatan yang terindikasi potensi kebakaran dan kabut asap yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir. Tabel 2.11 menunjukkan lokasi kecamatan dan jumlah desa yang termasuk dalam kategori rawan kebakaran. Desa-desanya rawan kebakaran ini sebagian besar berada di ekosistem gambut sehingga cenderung lebih sulit untuk dipadamkan.

Tabel 2.11. Desa Rawan Kebakaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa |
|-----|--------------------|--------------------|------|
| 1. | Banyuasin | Air Kumbang | 12 |
| | | Air Saleh | 3 |
| | | Muara Padang | 11 |
| | | Rambutan | 20 |
| | Total | | 4 |
| 2. | Muara Enim | Muara Belida | 5 |
| | Total | | 1 |
| 3. | Musi Banyuasi | Bayung Lencir | 5 |
| | Total | | 1 |
| 4. | Ogan Komering Ilir | Air Sugihan | 4 |
| | | Cengal | 12 |
| | | Jejawi | 9 |
| | | Kayuagung | 15 |
| | | Pampangan | 22 |
| | | Pangkalan Lampam | 23 |
| | | Pedamaran | 6 |
| | | Pedamaran Timur | 5 |
| | | Sirah Pulau Padang | 18 |
| | | Sungai Menang | 11 |
| | | Tanjung Lubuk | 19 |
| | | Teluk Gelam | 15 |
| | | Tulung Selapan | 33 |
| | Total | | 13 |

| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa |
|-------|----------------|-------------------|------|
| 5. | Ogan Ilir | Indralaya | 2 |
| | | Indralaya Utara | 11 |
| | | Kandis | 3 |
| | | Lubuk Keliat | 2 |
| | | Pemulutan | 10 |
| | | Pemulutan Selatan | 2 |
| | | Rantau Alai | 6 |
| | | Rantau Panjang | 7 |
| | | Sungai Pinang | 7 |
| | Tanjung Raja | 6 | |
| Total | | 10 | 56 |

Pengelolaan limbah kelapa sawit

Kegiatan pada sektor perkebunan menghasilkan limbah yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Limbah kelapa sawit SBE masuk ke dalam daftar non-B3 dengan kode limbah N108. Jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan pada tahun 2021 mencapai 19,33 ton. Pemanfaatan limbah kelapa sawit sudah mulai dilakukan di Sumatera Selatan. Setidaknya ada satu perusahaan kelapa sawit yang telah mengelola limbah cair kelapa sawit atau *palm oil mill effluent* (POME). Selain itu, terdapat pula upaya pengelolaan limbah terintegrasi melalui program Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) yang sudah mulai diterapkan oleh PT Dinamica Rimba Utama (DRU) yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin.

2.4. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Salah satu persoalan pengelolaan kelapa sawit terkait dengan tata kelola perkebunan dan sengketa lahan. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 telah mengamanatkan daerah untuk mengatur setiap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rangka mengatasi permasalahan sengketa lahan perkebunan.

Penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa bertujuan untuk mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat, menyelesaikan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan APL, menyelesaikan status lahan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, dan menyelesaikan status lahan kelapa sawit di ekosistem gambut. Selain itu, penerapan tata kelola perkebunan juga berfokus dalam melaksanakan peninjauan regulasi daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

Realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi kebun kelapa sawit masyarakat

Pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan kelapa sawit termasuk perusahaan yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini tertuang di Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar yang mewajibkan setiap perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, akses pengetahuan, dan teknik budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan. Dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, setiap perusahaan perlu melalui beberapa tahapan meliputi sosialisasi, identifikasi calon lahan, identifikasi calon pekebun, kelembagaan pekebun, pemenuhan administrasi, penetapan calon pekebun dan calon lahan, dan perjanjian kerja sama. Adapun tahapan pelaksanaan pembangunan fisik kebun dilakukan melalui tahapan pembenihan, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan.

Menurut data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, dalam kurun tahun 2006-2015, terdapat 23 perusahaan kelapa sawit di 7 kabupaten yang sudah melaksanakan kewajiban dalam memfasilitasi kebun kelapa sawit masyarakat. Pada tahun 2006-2015, total areal kebun kelapa sawit masyarakat yang telah difasilitasi oleh perusahaan mencapai 43.893,96 ha. Kabupaten Banyuasin menjadi kabupaten dengan jumlah perusahaan terbanyak yang memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat dengan luasan mencapai 11.500,10 ha.

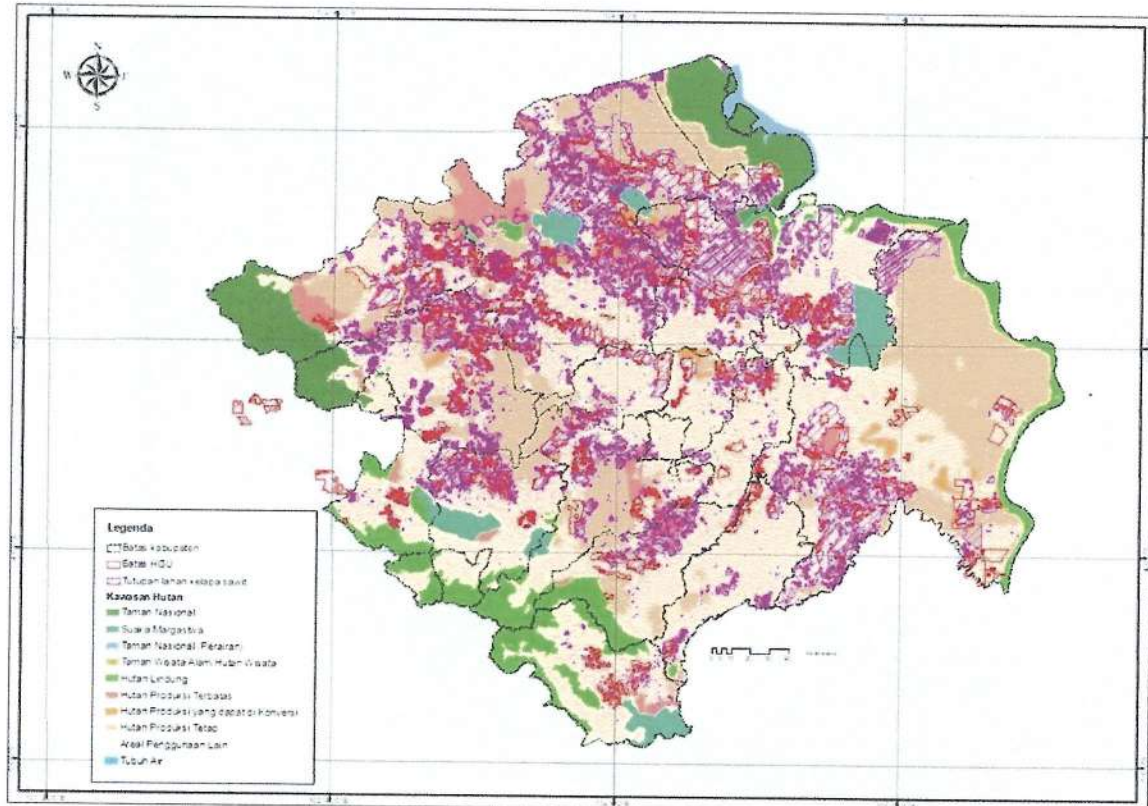
Berdasarkan data realisasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat, sisa target pembangunan kebun kelapa sawit yang belum tercapai seluas 10.468,14 ha. Dari 12 kabupaten dengan perusahaan kelapa sawit, baru perusahaan kelapa sawit di 7 kabupaten yang terdata (Tabel 2.12). Hal ini perlu menjadi perhatian utama pemangku kepentingan di sektor perkebunan untuk meningkatkan angka realisasi pembangunan kebun kelapa sawit bagi masyarakat.

Tabel 2.12. Data Realisasi Penanaman Plasma Kebun Kelapa Sawit 2006-2016 per Januari 2019

| No | Nama Perusahaan | Target (ha) | | | Realisasi Pembangunan Kebun Plasma per Tahun Tanam (ha) | | | | | | | | | | Total (ha) |
|--------|--------------------------------|-------------|-----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|------------|
| | | Inti | Plasma | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 1 | BANYUASIN | 42.593,68 | 16.201,14 | 544,38 | 1.278,72 | 2.017,16 | 2.900,96 | 314,88 | 1.610,00 | 436,00 | 1.123,00 | 1.035,00 | 240,00 | 11.500,10 | |
| 1 | PT. CIPTA LESTARI SAWIT | 5.000,00 | 4.964,00 | 44,38 | 941,72 | 385,76 | | | | | | | | 1.371,86 | |
| 2 | PT. SWADAYA INDO PALMA | 6.130,00 | 3.200,00 | 500,00 | 337,00 | 265,00 | 984,00 | | 310,00 | 131,00 | 392,00 | 281,00 | | 3.200,00 | |
| 3 | PT. ANDIRA AGRO | 7.000,00 | 2.135,00 | | | 1.056,16 | 1.033,08 | 46,00 | | | | | | 2.135,24 | |
| 4 | PT. TUNAS BARU LAMPUNG, tbk | 7.818,00 | 2.989,14 | | | 310,24 | 883,88 | 268,88 | 1.154,00 | 49,00 | | | | 2.666,00 | |
| 5 | PT. HINDOLI (Cargill Group) | 8.500,00 | 413,00 | | | | | | 146,00 | 256,00 | | | | 402,00 | |
| 6 | PT. SRI ANDAL LESTARI | 8.145,68 | 2.500,00 | | | | | | | 731,00 | | 754,00 | 240,00 | 1.725,00 | |
| II | MUSI BANYUASIN | 40.730,00 | 18.548,00 | | 24,00 | 1.804,20 | 2.200,80 | 2.279,60 | 4.299,40 | 1.830,66 | 1.002,75 | 854,20 | 244,00 | 14.539,61 | |
| 7 | PTP. MITRA OGAN I | 4.000,00 | 2.900,00 | | | | | 1.371,60 | 1.528,40 | | | | | 2.900,00 | |
| 8 | PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA | 12.579,00 | 2.000,00 | | | 1.715,20 | 284,80 | | | | | | | 2.000,00 | |
| 9 | PT. HAMITA UTAMA KARSA | 2.550,00 | 3.392,00 | | 24,00 | 89,00 | 295,00 | 50,00 | 277,00 | | | | | 735,00 | |
| 10 | PT. MENTARI SUBUR ABADI | 12.000,00 | 5.742,00 | | | | 1.621,00 | 858,00 | 2.494,00 | 479,00 | 16,00 | 30,00 | 244,00 | 5.742,00 | |
| 11 | PTP. MITRA OGAN II | 1.300,00 | 2.500,00 | | | | | | | 409,66 | 249,75 | 224,20 | | 883,61 | |
| 12 | PT. SWADAYA BHAKTI NEGARAMAS | 8.301,00 | 1.792,00 | | | | | | | 942,00 | 250,00 | 600,00 | | 1.792,00 | |
| 13 | PT. PELANGI INTI PERTIWI | 0,00 | 222,00 | | | | | | | | 222,00 | | | 222,00 | |
| 14 | PT. INTIMEGAH BESTARI PERTIWI | | 265,00 | | | | | | | | 265,00 | | | 265,00 | |
| III | PALI | 9.846,00 | 9.106,00 | 768,00 | 920,00 | 886,00 | 675,00 | 2.605,52 | 1.012,29 | 1.092,83 | 49,90 | 330,00 | 0,00 | 8.339,54 | |
| 15 | PT. GLODEN BLOSSOM SUMATRA | 7.985,00 | 7.327,00 | 768,00 | 920,00 | 886,00 | 675,00 | 1.897,00 | 925,50 | 673,40 | 49,90 | 330,00 | | 7.124,80 | |
| 16 | PT. LARAS KARYA KAHURIPAN | 1.861,00 | 1.779,00 | | | | | 708,52 | 86,79 | 419,43 | | | | 1.214,74 | |
| IV | OGAN KOMERING ILIR | 9.196,54 | 6.985,00 | 351,00 | 186,00 | 708,00 | 1.549,44 | 972,67 | 182,00 | 719,58 | 455,31 | 315,60 | 53,80 | 5.493,40 | |
| 17 | PT. PERSADA SAWIT MAS | 4.200,00 | 1.245,00 | 351,00 | 186,00 | 708,00 | | | | | | | | 1.245,00 | |
| 18 | PT. TELAGA HIKMAH | 2.220,00 | 2.000,00 | | | | | | 786,10 | 182,00 | 620,00 | 358,90 | | 1.947,00 | |
| 19 | PT. MUTIARA BUNDA JAYA | 2.776,54 | 3.000,00 | | | | 1.549,44 | 186,57 | | | 99,58 | 11,11 | | 1.846,70 | |
| 20 | PT. GUNUNG TUA ABADI | 0,00 | 740,00 | | | | | | | | 85,30 | 315,60 | 53,80 | 454,70 | |
| V | MUSI RAWAS | 0,00 | 521,96 | 0,00 | 0,00 | 514,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,29 | |
| 21 | PT. DUANDA SAWIT LESTARI | 0,00 | 521,96 | | | 514,29 | | | | | | | | 514,29 | |
| VI | MURATARA | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 116,00 | 725,00 | 615,00 | 0,00 | 1.531,00 | |
| 22 | PT. BUANA SRIWIJAYA SELAJHTERA | 8.000,00 | 5.000,00 | | | | | | 75,00 | 116,00 | 725,00 | 615,00 | | 1.531,00 | |
| VI | OGAN KOMERING ULU | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,44 | 718,66 | 52,92 | 100,00 | 0,00 | 1.976,02 | |
| 23 | PTP. MITRA OGAN III | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | 1.104,44 | 718,66 | 52,92 | 100,00 | | 1.976,02 | |
| JUMLAH | | 105.366,22 | 54.362,10 | 1.663,38 | 2.408,72 | 5.929,65 | 7.326,20 | 6.172,67 | 8.208,13 | 4.797,73 | 2.683,88 | 2.634,80 | 537,80 | 43.893,96 | |

Penyelesaian Lahan Kelapa Sawit yang Terindikasi di dalam Kawasan Hutan

Keterlanjuran lahan kelapa sawit di dalam kawasan hutan menjadi salah satu persoalan di Provinsi Sumatera Selatan. Keberadaan lahan kelapa sawit di dalam kawasan hutan berpotensi menimbulkan permasalahan, antara lain ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, sengketa lahan, dan potensi degradasi kawasan hutan.



Gambar 2.8. Peta persebaran kelapa sawit di dalam kawasan hutan

Berdasarkan hasil *overlay* peta tutupan lahan kelapa sawit tahun 2019 dari Kementerian Pertanian dan peta RTRW Provinsi Sumatera Selatan, tutupan lahan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan sebagian besar berada di Hutan Produksi seluas 137.526 ha (mencakup 66% dari total tutupan lahan kelapa sawit yang ada di kawasan hutan). Luas tutupan lahan kelapa sawit yang ada di kawasan hutan perlu diverifikasi lebih lanjut karena adanya perbedaan nilai dengan data hasil inventarisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan pada pasal 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan dan memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berlaku.

Adapun tata cara penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan sesuai ketentuan pasal 3 UU Nomor 11 tahun 2020, dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain:

- a. Pemberitahuan pemenuhan persyaratan perizinan di bidang kehutanan
- b. Pengajuan permohonan penyelesaian persyaratan perizinan di bidang kehutanan
- c. Verifikasi permohonan

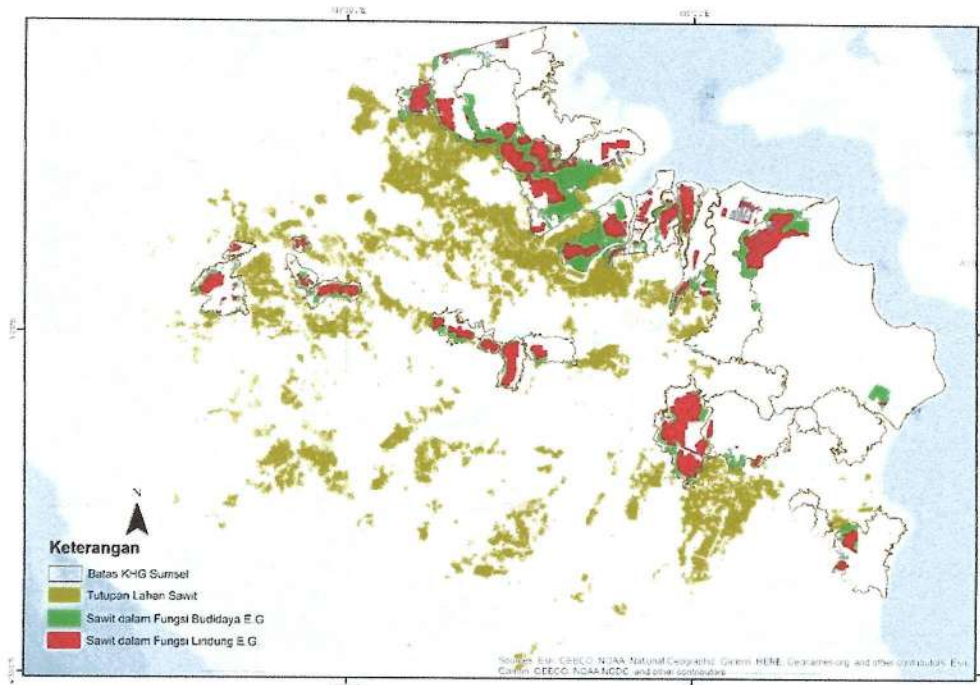
- d. Penerbitan surat perintah tagihan pelunasan provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR)
- e. Pelunasan PSDH dan DR
- f. Penerbitan:
 - 1. Persetujuan pelepasan kawasan hutan di dalam kawasan hutan produksi
 - 2. Persetujuan melanjutkan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan konservasi.

Pasal 41 mengatur keterlanjuran kelapa sawit dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh perseorangan. Menurut pasal tersebut, dinyatakan bahwa dalam setiap usaha yang dilakukan di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 ha, maka akan dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.

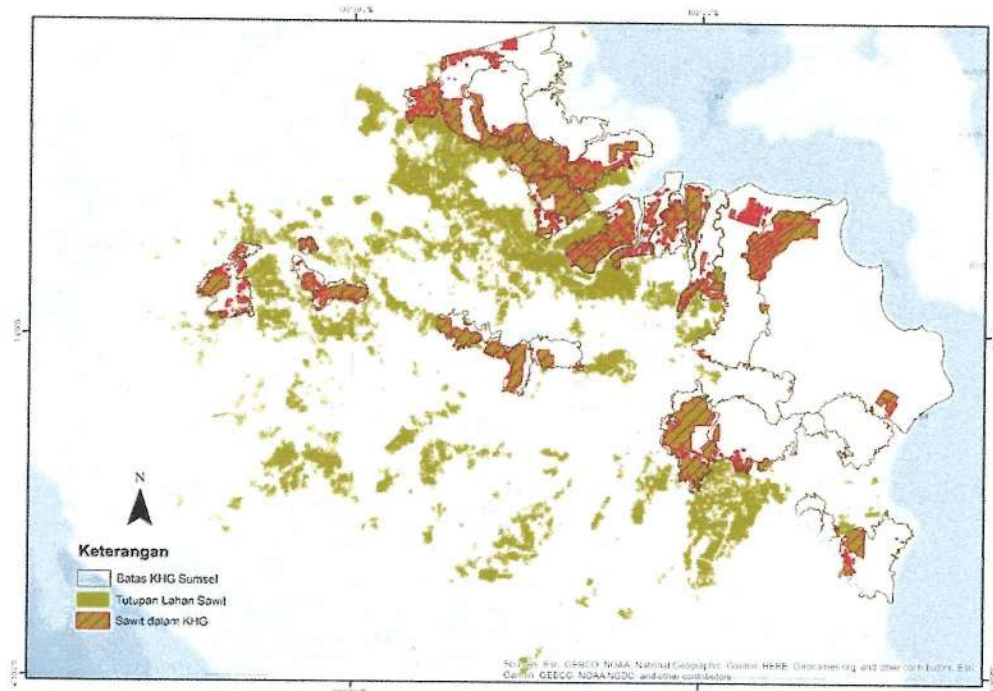
Penyelesaian Lahan Kelapa Sawit yang Terindikasi di Ekosistem Gambut

Alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan masih terus terjadi. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pasal 9 ayat 1 menyebutkan pembagian ekosistem gambut berdasarkan atas 2 fungsi yakni fungsi budidaya dan fungsi lindung. Tabel 2.4 menunjukkan sebaran luas tutupan kelapa sawit yang berada pada lokasi indikatif fungsi ekosistem gambut baik lindung dan budidaya (Gambar 2.9). Luas tutupan lahan kelapa sawit yang berada dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) mencapai 471.737 ha. KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur merupakan KHG dengan tutupan kelapa sawit terluas mencapai 56.018 ha (Gambar 2.10). Keberadaan aktivitas perkebunan kelapa sawit di fungsi lindung menjadi perhatian khusus mengingat tingginya potensi kebakaran lahan akibat pembukaan dengan cara membakar.

Apabila terdapat usaha perkebunan sawit di fungsi lindung ekosistem gambut, maka penanggung jawab usaha wajib melakukan pemulihan di dalam maupun di luar area ekosistem gambut. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pemulihan ekosistem gambut antara lain dengan suksesi alami, rehabilitasi, restorasi, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Gambar 2.9. Peta Sebaran Kelapa Sawit Berdasarkan Fungsi Lindung dan Fungsi Budidaya



Gambar 2.10. Peta Sebaran Kelapa Sawit dalam KHG

Penyelesaian Sengketa Lahan

Persoalan mengenai sengketa lahan menjadi permasalahan yang masih banyak terjadi, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Kasus sengketa lahan yang banyak ditemui diantaranya melibatkan pihak perusahaan kelapa sawit dan masyarakat. Pemicu konflik sangat beragam, mulai dari persoalan mengenai klaim kepemilikan lahan, kesepakatan kerja sama yang tidak ditaati, hingga pelanggaran terhadap izin HGU.

Berdasarkan data rekapitulasi perizinan dan luas lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dirilis oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, tercatat pada tahun 2022 sudah ada 277 izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan bagi perusahaan kelapa sawit. Ditinjau dari segi jumlah perizinan yang dikeluarkan, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir secara berurutan menjadi kabupaten-kabupaten dengan perusahaan kelapa sawit yang paling banyak mendapat izin operasi di Sumatera Selatan (Tabel 2.13).

Tabel 2.13. Rekapitulasi perizinan dan luas lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022

| No | Kabupaten | Jumlah | Perizinan (ha) | |
|-------|--------------------|------------|------------------------|------------------|
| | | Perusahaan | Pec. Tanah/Izin Lokasi | Izin Prinsip/IUP |
| 1 | MUSI RAWAS | 24 | 213.009 | 169.063 |
| 2 | LAHAT | 9 | 67.903 | 61.783 |
| 3 | EMPAT LAWANG | 5 | 53.950 | 53.399 |
| 4 | OGAN KOMERING ULU | 9 | 60.212 | 38.214 |
| 5 | OKU TIMUR | 6 | 64.050 | 79.000 |
| 6 | MUARA ENIM | 14 | 158.708 | 114.996 |
| 7 | PALI | 7 | 107.500 | 61.285 |
| 8 | BANYUASIN | 65 | 397.924 | 309.717 |
| 9 | MUSI BANYUASIN | 57 | 656.938 | 414.756 |
| 10 | OGAN KOMERING ILIR | 55 | 618.675 | 333.897 |
| 11 | OGAN ILIR | 6 | 49.134 | 13.148 |
| 12 | OKU SELATAN | 11 | 120.924 | 111.924 |
| 13 | MUSI RAWAS UTARA | 9 | 129.930 | 110.108 |
| TOTAL | | 277 | 2.698.857 | 1.871.290 |

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (2022)

Besarnya angka perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan akan meningkatkan aktivitas pembukaan lahan baru dan penerbitan izin usaha perkebunan bagi perusahaan. Masyarakat setempat yang sudah lama mendiami daerah tertentu berpotensi besar untuk menghadapi kasus-kasus klaim kepemilikan lahan yang akhirnya dapat berujung pada terjadinya konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan.

Menurut data yang dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, pada periode 2018-2021, telah terjadi kasus sengketa lahan sebanyak 18 kasus yang tersebar di 10 kabupaten (Tabel 2.14). Masyarakat umumnya merespon persoalan konflik lahan melalui beberapa cara seperti melakukan audiensi bersama pemerintah dan perusahaan dengan didampingi oleh LSM terkait hingga melakukan aksi demonstrasi. Dari keseluruhan data sengketa lahan yang telah direkapitulasi, diketahui bahwa masih banyak kasus-kasus yang belum selesai dan masih dalam tahap fasilitasi sengketa atau mediasi.

Tabel 2.14. Data Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Selatan

| No. | Kab/Kota | Tahun Sengketa/ Konflik | Para Pihak Bersengketa/Konflik | | Lokasi | Ringkasan/Pokok Permasalahan | Tindak Lanjut | Keterangan |
|-----|--------------------|-------------------------|--|----------------------------|--|--|---|--|
| | | | Pengadu | Teradu | | | | |
| 1. | Ogan Komering Ilir | 2018 | 1. Pendamping masyarakat Dusun III Tepung Sari, Desa Tirta Mulya, Kec. Air Sugihan, Kab. OKI 2. Kasus ini telah diambil alih oleh salah seorang warga yang berafiliasi dengan KRASS (Komite Reforma Agraria Sumsei) | PT. SAML | Dusun III Tepung Sari, Desa Tirta Mulya, Kec. Air Sugihan, Kab. OKI | <ul style="list-style-type: none">Sengketa lahan usaha warga transmigrasi swakarsa Desa Tirta Mulya Dusun III Tepung Sari, Kec. Air Sugihan, Kab. OKI dengan PT. SAMLTeloh difasilitasi oleh komnas HAM RI dan telah dihasilkan akta kesepakatan perdamaian antar pihak 9-2-2017Warga meminta isi kesepakatan yang dituangkan dalam akta tersebut agar ditinjau ulang karena dianggap tidak aspiratif bagi mayoritas warga dan warga menuntut agar dilakukan verifikasi lapangan ulang terkait klaim lahan warga seluas 1.114 ha terletak di Air Sugihan | Rapat 30-12-2019 BPN Sumsei dengan hasil meminta DPRD OKI untuk memfasilitasi sengketa Rapat 20-02-2020 di BPN OKI tidak bisa melakukan verifikasi tanpa izin pihak perusahaan dan diminta Bupati OKI untuk memberikan rekom akses masuk areal PT SAML | Pihak PT SAML tetap berpegang pada akta kesepakatan perdamaian dan menolak review kesepakatan tsb KRASS berupaya agar kasus ini mediasinya ditangani tim GTRA Sumsei |
| 2. | Ogan Komering Ilir | 2019 | Warga Desa Ridling, Desa Jerambah Rengas, Desa Tulung Seluang, Desa Penangoan Duren dan Desa Lebung Itam | PT. Bintang Harapan Palma | Desa Ridling, Desa Jerambah Rengas, Desa Tulung Seluang, Desa Penangoan Duren, dan Desa Lebung Itam di Kec. Tulung Selapan, Kab. OKI | Keberatan masyarakat atas hadirnya PT BHP di tengah-tengahnya di kawasan gambut yang dianggap dapat menghilangkan mata pencaharian warga berupa menangkap ikan dan tanaman gelam namun tetap juga mendapatkan izin lokasi dari Bupati OKI tahun 2015 dan berharap kepada BPN untuk tidak menebarkan HGU kepada perusahaan PT BHP yang bergerak dalam komoditas sawit | Berdasarkan laporan rapat 30 desember 2019. Bukan kewenangan BPN untuk menghentikan kegiatan PT BHP karena belum ada HGU disitu dan kewenangnya ada di Pemda | |
| 3. | Ogan Komering Ilir | 2020 | Warga Desa Sungai Sonor, Kec. Cengal, Kab. OKI | PT. Russelindo Putra Prima | Desa Sungai Sonor, Kec. Cengal, Kab. OKI | Klaim warga Desa Sonor atas pembangunan kebun plasma di Desa Sungai Sonor dengan luas 565 ha sesuai kesepakatan antara warga dengan pihak perusahaan. | Masih dalam tahap telaah oleh Pemkab OKI c.q. Disbun OKI | Warga berharap agar hak akan pembangunan plasma ditegakkan sesuai hukum yang berlaku |
| 4. | Ogan Komering Ilir | 2020 | AR, ahli waris dari HAR | PT Aek Tarum | Desa Sungai Belida, Kec. Lempung Jaya, Kab. OKI | 1. AR selaku ahli waris dari HAR menuntut ganti rugi pengembalian lahan ahli warisnya dengan luas 250 Ha yang diduga diserobot oleh PT Aek Tarum 2. Pihak Aek Tarum dengan surat tgl 10 Agustus 2020 No. 003/AT/KGM.VII/2020 Perihal tanggapan surat disebutkan bahwa permasalahan tsb telah selesai | 1. Telah dikirim surat Kadis DLHP Sumsei ke Dirut PT. Aek Tarum Tgl 05-08-2020 No. 660/1940/ DLHPB.IV/2020 Perihal sengketa pertanahan 2. Surat dari koordinator GM Tgl 10 Agustus 2020 No. 003/AT/KGM.VII/2020 Perihal Tanggapan Surat | Pihak perusahaan tidak pernah hadir dalam rapat dan hanya mengirim surat dengan alasan bahwa klaim Sdr Abdul Roni sudah diganti rugi Memperlihatkan kepada Abdul Roni CS untuk menempuh jalur hukum |

| No. | Kab/Kota | Tahun Sengketa/ Konflik | Para Pihak Bersengketa/Konflik | | Lokasi | Ringkasan/Pokok Permasalahan | Tindak Lanjut | Keterangan |
|-----|----------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|
| | | | Pengadu | Teradu | | | | |
| 5. | Ogan Komeriing Iilir | 2021 | Sdr. KEW selaku pendamping 300 KK warga desa cinta jaya, Pedamaran, OKI | PT. Mutiara Bunda Jaya | Desa Cinta Jaya, Kec. Pedamaran, Kab. OKI | Warga mengklaim pemenuhan perjanjian antara warga, perusahaan dan pemda setempat tentang pembagian plasma 45%, untuk warga, 45% untuk kebun inti PT MJB, dan 10% untuk Penkab OKI. OKI dari jumlah 12.500 Ha luas izin lokasi yang diberikan oleh Pemda OKI untuk perkebunan kelapa sawit perusahaan tetapi perjanjian ini tidak pernah terealisasi dan di tingkat Penkab OKI telah difasilitasi tetapi belum ada titik temu | Mediasi penyelesaian antara kedua belah pihak juga telah dilakukan oleh Komnas HAM dan melalui suratnya disarankan penyelesaiannya menempun jalur hukum | Kasus klaim pemenuhan perjanjian para pihak oleh warga belum menemukan kata sepakat |
| 6. | Ogan Komeriing Ulu | 2019 | Warga 5 desa (Durian, Lubuk Rukam, Bindu, dan Karang Dapo) di kec. Peninjauan dan Desa Lunggaian di Kec. Lubuk Batang Kab. OKU yang didampingi oleh Formas OKU | PT. Perkebunan Mitra Ogan | Desa Durian, Desa Lubuk Rukam, Desa Bindu, dan Desa Karang Dapo di Kec. Peninjauan dan Desa Lunggaian di Kec. Lubuk Batang | 1. Klaim ganti rugi tanah warga dan tanah adat kepada PT Mitra Ogan yang telah dijadikan kebun inti PT Mitra Ogan sejak tahun 1988-1989 2. Pencabutan HGU PT Mitra Ogan yang diduga melanggar aturan dalam penertiannya 3. Diduga luas kebun PT Mitra Ogan (kebun inti, plasma dan kebun KKPA) melebihi dari yang tertera di izin lokasi | Rapat Prov Sumsel 25 Feb 2020 membahas permasalahan tanah milik masyarakat desa durian kec peninjauan kab oku dsk yang dijadikan lahan PIR-TRANS KS oleh PT Mitra Ogan | Dalam rapat tersebut meminta pihak Penkab OKU untuk terlebih dahulu melakukan inventarisasi atas hak masing-masing |
| 7. | Ogan Komeriing Ulu | 2021 | Ketua POSE, warga Desa Lubuk Batang, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU | PT. Minanga Ogan | Desa Lubuk Batang, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU | Meminta PT Minanga Ogan agar mengembalikan Lahan seluas 17 ha yang berlokasi di Desa Lubuk Batang dengan alasan kontraknya surat perjanjian kerja sama tgl 10 oktober 1994 telah berakhir dan terindikasi kuat kalau lahan tersebut telah dipindah tangankan / diperjual belikan kepada pihak lain | Plh. Sekda Prov Sumsel dengan surat No. 593/24.12/DLHP/B.IV/2021 telah menyurat Bupati OKU untuk menyelesaikan perselisihan tsb secara musyawarah | Penkab OKU c.q. asisten pemerintah dan kesra telah memfasilitasi sengketa tersebut dengan mengadakan rapat tanggal 4 oktober 2021 di ruang bina praja Penkab OKU dengan kesimpulan agar masalah kedua belah pihak dapat diselesaikan secara internal |
| 8. | Ogan Komeriing Ulu Selatan | 2019 | Warga Desa Tanjung Raya, Kec. Buay Sadang Aji, Kab. OKUS | PT. Meta Agro Lestari | Desa Tanjung Raya, Kec. Buay Sadang Aji, Kab. OKUS | Warga menolak rencana kehadiran PT MAL tgl 18 November 2012 pasca dilakukan pengukuran oleh BPN OKUS (25-07-19) atas tanah negara yang selama ini diklaim sebagai tanah adat/ulayat (diusahakan secara turun menurun) yang harus dikembalikan kepada warga seluas 300 ha untuk tanaman sawit | Salah satu tembusan surat tersebut disampaikan kepada Gubernur Sumsel diminta untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warga dan Pemprov Sumsel c.q sekda telah meminta Bupati OKUS untuk memfasilitasi persoalan tersebut | Dalam proses, pihak pemprov belum menerima laporan terkait surat disampaikan Bupati OKUS dimaksud |

| No. | Kab/Kota | Tahun Sengketa/ Konflik | Para Pihak Bersengketa/Konflik | | Lokasi | Ringkasan/Pokok Permasalahan | Tindak Lanjut | Keterangan |
|-----|----------------|-------------------------------|---|---|--|--|--|---|
| | | | Pengadu | Teradu | | | | |
| 9. | Banyuasin | 2020 | Perwakilan warga masyarakat Desa Teluk Tengirik, Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin | PT. Tunas Baru Lampung | Desa Teluk Tengirik, Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin | Klaim ganti rugi warga desa ke PT. Tunas Baru Lampung disebabkan mesin ditemukan selisih tanah yang belum diganti rugi seluas kurang lebih 167 ha oleh pihak perusahaan. | Pemkab Banyuasin mengadakan pertemuan pada tanggal 16 Februari 2021 dengan Direktur PT. TBL dan meminta pihak manajemen agar segera memberikan tanggapan. | Masih dalam proses fasilitasi oleh Pemkab Banyuasin sesuai kewenangannya |
| 10. | Banyuasin | 2020 | Lembaga adat Kab. Banyuasin wilayah eks Marga Upang, Desa Upang, Kec. Makarti Jaya | PT. Agrindo Raya | Desa Upang, Kec. Makarti Jaya, Kab. Banyuasin | Masyarakat menuntut plasma di Desa Upang yang dijanjikan oleh perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (kemitraan antara warga sekitar perusahaan sebagai calon petani plasma dengan lahan inti perusahaan) | Masih berkoordinasi dengan Pihak Pemkab Banyuasin c.q. Dinas Perkebunan Kab. Banyuasin | Pemertan RI No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Permen ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan dalam Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat |
| 11. | Musi Banyuasin | 2021 | Masyarakat Desa Mangsang, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin dengan kuasanya dan Badan Pemantau Korupsi Penyelenggara (BPKP) | PT. Tirta Agung Estate/ Lonsum | Desa Mangsang, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin | Warga Desa Mangsang, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin mengklaim pengembalian lahan seluas 5.198,86 ha yang diduga berada diluar areal HGU PT Tirta Agung Estate/Lonsum dan PT Budi Tirta Agung Estate | Sesuai disposisi Asisten I Provinsi Sumsel telah disampaikan surat kepada Bupati Muba tanggal 3 September 2021 perihal fasilitasi sengketa pertanahan yang meminta bupati untuk memfasilitasi pengaduan masyarakat tersebut sesuai kewenangannya dan melaporkan hasilnya kepada gubernur | Dalam proses Pemprov Sumsel c.q. DLHP belum menerima laporan sesuai tanggal 3 september 2021 |
| 12. | Musi Banyuasin | 2021 | R, ahli waris keluarga besar alm BS | PT. Banyu Kahuripan Indonesia (Makin Group) / PT. DSN (Danista Surya Nusantara) | Desa Karang Agung | Klaim ganti rugi lahan seluas kurang lebih 60 Ha sejak tahun 2006 | PT Banyu Kahuripan Indonesia mempersiapkan kepada pengadu untuk menempuh jalur hukum | Berdasarkan ND: No. 153/ND/DLHP/B.IV/2017 Tanggal 4 April 2017 telah dilaporkan kepada gubernur jika fasilitasi sengketa antara kedua belah pihak tidak dapat dilakukan lagi dan disarankan kepada pengadu untuk menempuh jalur hukum |

| No. | Kab/Kota | Tahun Sengketa/ Konflik | Para Pihak Bersengketa/Konflik | | Lokasi | Ringkasan/Pokok Permasalahan | Tindak Lanjut | Keterangan |
|-----|----------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--|--|
| | | | Pengadu | Teradu | | | | |
| 13. | Muara Enim | 2019 | Warga Desa Tanjung Agung | PT. Bumi Sawindo Permai | Desa Tanjung Agung, Kec. Tanjung Agung, Kab. Muara Enim | Klaim ganti rugi Rimba Peremuan seluas 600 ha di Desa Tanjung Agung sebagai hutan adat | Telah dilakukan rapat tanggal 19 Februari 2020 dengan hasil kedua belah pihak tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing | |
| 14. | Lahat | 2019 | Gerakan Tani Sumsel (GTS) Kab. Lahat an Warga Desa Pagar Batu, Kec. Pulau Pinang, Kab. Lahat | PT. Artha Pigei | Desa Pagar Batu, Kec. Pulau Pinang, Kab. Lahat | Klaim warga Desa Pagar Batu, Kec. Pulau Pinang, Kab. Lahat atas lahan kurang lebih 180,35 Ha yang diduga berada di areal HGU | Telah dilaksanakan dua kali rapat namun belum memberikan hasil | |
| 15. | Empat Lawang | 2019 | Warga Desa Tanjung Kupang Baru dan Desa Sugi Waras Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang | PT. Sawit Mas Sejahtera | Desa Tanjung Kupang Baru dan Desa Sugi Waras Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang | Fasilitasi rapat antara kedua belah pihak masih menunggu adanya kejelasan batas wilayah antara Kab. Lahat dan Kab. Empat Lawang | Telah dilakukan rapat di BPN Provinsi Sumsel | Dalam proses Faseta di ATR/BPN Provinsi Sumsel |
| 16. | Musi Rawas Utara | 2019 | Warga Suku Anak Dalam Desa Tebing Tinggi, Kec. Nibung, Kab. Muratara | 1. Pemkab Muratara 2. PT Lonsum | Desa Tebing Tinggi, Kec. Nibung, Kab. Muratara | Klaim pembagian plasma yang tidak sesuai dengan penerima yang semestinya lebih memprioritaskan Suku Anak Dalam tetapi justru mayoritas penerima plasma adalah orang-orang yang bukan dari SAD | Rapat faseta telah dilakukan | Fasilitasi sengketa tanah diserahkan ke Pemkab Muratara |
| 17. | Musi Rawas Utara | 2020 | TB dan Z, warga Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara | PT. PP London Sumatera Tbk | Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara | Salah satu warga Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara meminta PT. PP Lonsum untuk menghentikan aktivitas di atas lahan milik warga tersebut | Pihak PT. Lonsum telah menempuh jalur hukum dengan mengadakan persediaan ini kepada Pihak Kepolisan setempat | Dalam proses fasilitasi sengketa, Pemkab Muratara c.q. DLHP Muratara tetap berkoordinasi dengan Pemprov Sumsel c.q. DLHP Provinsi Sumsel |
| 18. | Penukal Abab Lematang Ilir | 2020 | Kelompok Tani Sinar Meru Abab Desa Tanjung Kurung, Kec. Abab, Kab. PALI | PT. GBS (Golden Blossom Sumatera) | Desa Tanjung Kurung, Kec. Abab, Kab. PALI | Klaim PT. GBS atas lahan milik warga | Pemprov Sumsel c.q. Sekda Provinsi Sumsel telah mengirim surat kepada Bupati PALI | Belum ada respon dari Pemkab PALI |

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Percepatan Sertifikasi ISPO

Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia memuat tentang penjaminan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan dilakukan melalui Sertifikasi ISPO kepada perusahaan perkebunan dan pekebun swadaya. *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) adalah sebuah program pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan tata kelola dan budidaya yang ramah lingkungan. Dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO bertujuan untuk menjamin pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi.

Prinsip dan kriteria ISPO berkontribusi terhadap 12 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ *Sustainable Development Goals* - SDGs). Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP, IUP-P, IUP-B, dan pekebun wajib memiliki sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) paling lambat pada tahun 2025. Dibutuhkan dukungan percepatan kepemilikan sertifikat ISPO bagi pekebun dan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan untuk memenuhi target nasional.

ISPO untuk perusahaan perkebunan dilakukan dengan menerapkan prinsip dan kriteria yang meliputi:

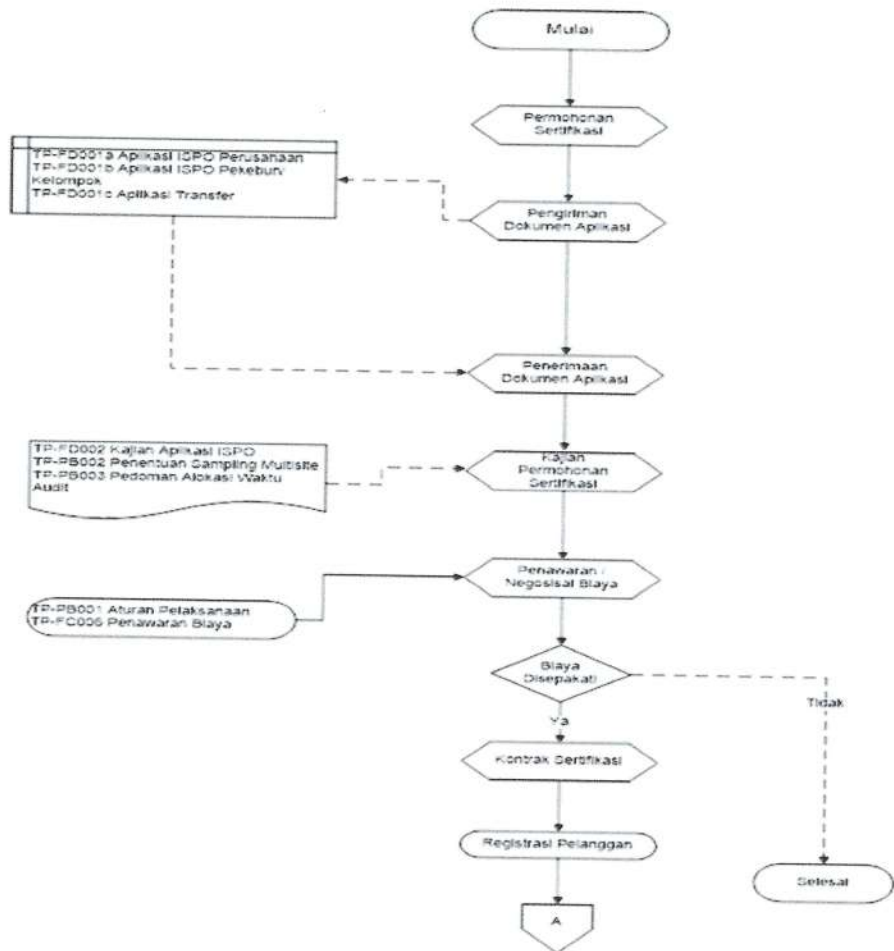
1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan (10 kriteria, 21 indikator);
2. Penerapan praktik perkebunan yang baik (2 kriteria, 36 indikator);
3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati (9 kriteria, 49 indikator);
4. Tanggung jawab ketenagakerjaan (6 kriteria, 36 indikator);
5. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (3 kriteria, 9 indikator);
6. Penerapan transparansi (6 kriteria, 18 indikator);
7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan (2 kriteria, 4 indikator).

Adapun prinsip dan kriteria ISPO untuk pekebun adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan (5 kriteria, 7 indikator);
2. Penerapan praktik perkebunan yang baik (11 kriteria, 17 indikator);
3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati (2 kriteria, 3 indikator);
4. Penerapan transparansi (2 kriteria, 5 indikator);
5. Peningkatan usaha berkelanjutan (1 kriteria, 1 indikator).

Proses sertifikasi ISPO dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO (LSISPO). Tata cara sertifikasi ISPO diatur dalam Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Gambar 2.11).

Program dukungan pelaksanaan sertifikasi ISPO dilakukan melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (*public-private partnership*) ataupun dengan pihak lain. Pemerintah kini tengah menyusun rancangan aturan turunan dari Perpres Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit terkait dengan bantuan pendanaan sertifikasi ISPO melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).



Gambar 2.11. Proses sertifikasi ISPO

Sumatera Selatan memiliki 276 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki izin resmi dari pemerintah dengan luas areal yang telah berizin seluas 1.754.436 ha. Dari jumlah tersebut masih sangat sedikit perusahaan di Sumatera Selatan yang sudah tersertifikasi ISPO yaitu sejumlah 63 perusahaan atau berkisar 22,83%. Upaya percepatan sertifikasi ISPO harus mencakup percepatan ISPO untuk perusahaan kelapa sawit.

Percepatan ISPO tidak hanya dilakukan untuk perusahaan, namun juga perkebunan sawit rakyat. Luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat atau pekebun mandiri mencapai 507.883 ha yang terdiri dari perkebunan kelapa sawit rakyat mandiri murni seluas 193.146 ha dan perkebunan kelapa sawit plasma seluas 314.737 ha atau 32,89% dari keseluruhan luas lahan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan. Pendampingan sertifikasi ISPO bagi petani plasma umumnya dapat difasilitasi oleh perusahaan inti. Pemerintah perlu memberikan perhatian untuk mendampingi pekebun mandiri dalam proses sertifikasi ISPO.

Peningkatan akses pasar

Peningkatan akses pasar produk kelapa sawit bertujuan untuk meningkatkan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit. Upaya peningkatan akses pasar dilakukan dengan berpartisipasi dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang.

Tabel 2.15. Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi
(Lihat Lampiran)

Tabel 2.16. Matriks Rencana Aksi Daerah
(Lihat Lampiran)

Bab 3

PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

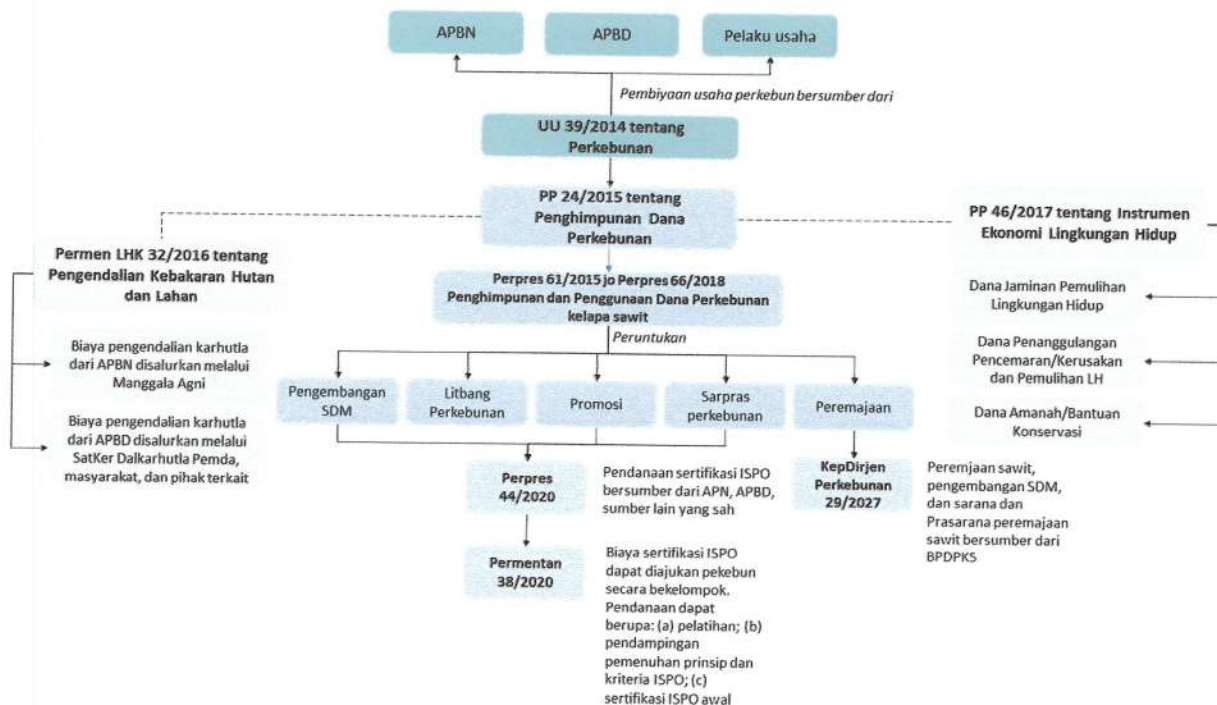
- Implementasi program dan kegiatan yang sudah direncanakan dalam dokumen RAD KSB membutuhkan kolaborasi para pihak, tidak hanya dari unsur pemerintah tapi juga swasta, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, dan lembaga penelitian atau universitas.
- Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KSB harus didukung oleh pendanaan yang solid tidak hanya dari sumber dari APBD namun juga sumber-sumber lain seperti skema kompensasi imbal jasa lingkungan hidup (KIJLH), pembayaran jasa lingkungan hidup (PJLH), insentif dan disinsentif, pendanaan privat penghargaan lingkungan, atau pembayaran sektor perbankan.
- Pendekatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kelapa sawit berkelanjutan dilakukan untuk menilai kinerja program dan hasil (outcome) sehingga dapat dilakukan perbaikan desain program di masa yang akan datang. Monev tidak hanya dilakukan di tingkat plot perkebunan atau perusahaan, tetapi perlu difokuskan di seluruh lanskap produksi atau di tingkat yurisdiksi.

3.1. Koordinasi Implementasi RAD KSB

Pelaksanaan RAD KSB di Provinsi Sumatera Selatan melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Setiap lembaga memiliki peran khusus dalam mendukung implementasi pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.

| No | OPD | Tanggung Jawab dan Peran |
|----|---|---|
| 1 | Dinas Perkebunan | Leading sector dalam penyelenggaraan program RAD KSB. Dinas Perkebunan berperan untuk menghubungkan dan mengoordinasikan peran OPD dan instansi lain untuk bersinergi menerapkan program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan. |
| 2 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | Membuka peluang untuk integrasi peternakan dan kelapa sawit yang berkelanjutan. Salah satu program yang didorong yaitu SISKa (Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit). Program ini sangat relevan dengan kegiatan ekonomi yang diusahakan masyarakat saat ini. |
| 3 | Dinas Kehutanan | Memantau, mencatat, dan mendistribusikan data lahan-lahan perkebunan kelapa sawit yang terletak di kawasan hutan. Dinas Kehutanan juga bertugas memetakan secara spasial lokasi dan kondisi perkebunan kelapa sawit dalam berbagai status kawasan hutan, serta merekomendasikan penyelesaian masalah degradasi hutan dan potensi konflik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. |
| 4 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan | Memberikan arahan dan masukan terkait tata kelola lahan perkebunan kelapa sawit. Alokasi lahan perkebunan kelapa sawit memperhatikan isu pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, hak masyarakat adat, serta peraturan nasional dan daerah terkait penataan ruang. |
| 5 | Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) | ATR/BPN berperan memberikan data dan pertimbangan terkait tumpang tindih perkebunan kelapa sawit dan kawasan untuk peruntukan lain. |
| 6 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Pembinaan, edukasi, dan advokasi badan usaha atau koperasi milik masyarakat. Banyak pekebun sawit yang belum tergabung sebagai anggota koperasi. Padahal pekebun skala kecil membutuhkan penjamin untuk memperoleh fasilitasi pendanaan, salah satunya untuk pengajuan dana peremajaan sawit rakyat. |
| 7 | Dinas Perindustrian | Mengawal proses hilirisasi kelapa sawit mencakup bantuan penyediaan sarana dan prasarana, bantuan akses pendanaan dan pemodalan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan produk turunan kelapa sawit. |
| 8 | Dinas Perdagangan | Pembinaan pekebun maupun pengembangan model kemitraan untuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO serta pengembangan pasar produk turunan kelapa sawit. |
| 9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Memberikan kemudahan dan kelancaran bagi pekebun untuk mengurus dan memperoleh izin terkait perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar lembaga dan instansi terkait. Upaya tersebut termasuk pemetaan dan harmonisasi kebijakan dan peraturan perundangan yang belum selaras serta sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing lembaga. |

RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027 merupakan program pembangunan strategis yang diamanatkan oleh peraturan perundangan. Pelaksanaan RAD KSB diatur melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. Urgensi penyusunan dan pelaksanaan RAD KSB Sumatera Selatan dilatarbelakangi oleh kontribusi signifikan kelapa sawit terhadap PDB nasional, PDRB provinsi, serta pendapatan masyarakat. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KSB harus didukung oleh pendanaan yang solid tidak hanya dari sumber dari APBD namun juga sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Gambar 3.1 memperlihatkan dasar hukum pelaksanaan pembiayaan dan pendanaan perkebunan kelapa sawit.



Berdasarkan berbagai kebijakan di tingkat nasional maupun daerah, terdapat beberapa skema pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan RAD KSB antara lain:

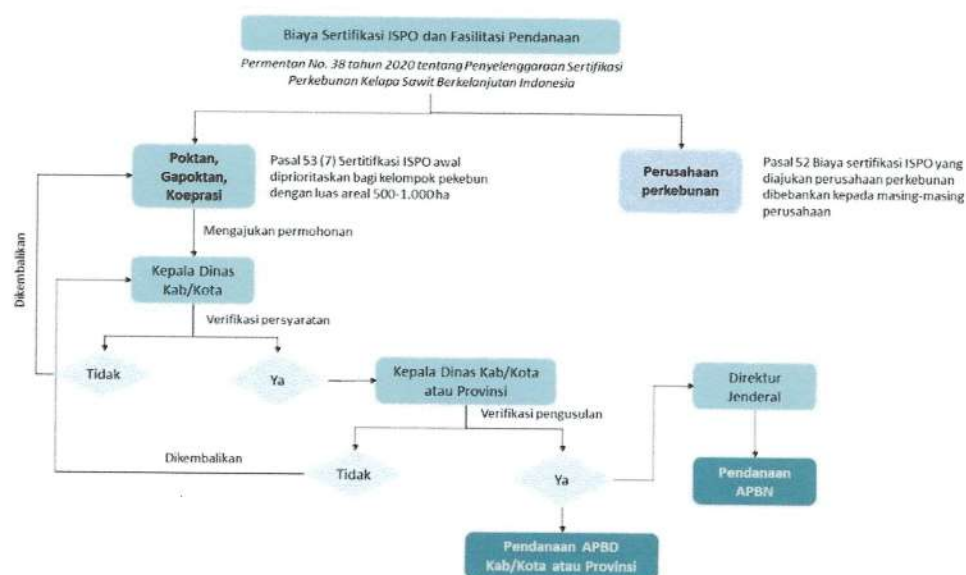
RAD-KSB Provinsi Sumatera Selatan dapat dilaksanakan dengan berbagai sumber pendanaan dari pemerintah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pelaku usaha dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

- UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- UU No. 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
- UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

- PP No. 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan
- Perpres No. 61 tahun 2015 jo Perpres No. 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
- Perpres No. 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
- Permentan No. 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan SDM, dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun/rakyat (PSR) dapat bersumber dari BPDPKS. Dana PSR dapat diakses oleh kelompok tani, Gapoktan, koperasi, maupun kelembagaan ekonomi pekebun lainnya. Persyaratan untuk mengakses dana PSR yaitu: (1) Poktan/Gapoktan/koperasi beranggotakan paling sedikit 20 pekebun atau memiliki hamparan paling sedikit 50 ha dengan jarak antar kebun paling jauh 10 km dilengkapi dengan koordinat; (2) legalitas lahan (SHM, SKT, Sporadik, Girik, Ajb, hak adat atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya). Selain program PSR, BPDPKS juga dapat memfasilitasi pendanaan terkait program pengembangan SDM, pengembangan dan pemanfaatan bahan bakar nabati, penelitian dan pengembangan, promosi, dan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan. Terkait pengembangan SDM, BPDPKS memiliki program pelatihan petani dan masyarakat sawit, pendidikan, penyuluhan kelapa sawit berkelanjutan, dan pendampingan serta fasilitasi.

Selain sumber pendanaan yang dihimpun melalui BPDPKS, program dan kegiatan RAD KSB juga dapat didanai melalui mekanisme APBN dan APBD. Alokasi pendanaan melalui APBD dapat dilakukan melakukan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu pemanfaatan DAK (seperti DAK pertanian, DAK Industri Kecil dan Menengah, DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan), serta pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan oleh masyarakat desa. Adapun program yang dapat diinisiasi melalui dana desa seperti pengelolaan limbah kelapa sawit serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam mengelola sarana produksi dan menerapkan praktik budidaya sawit berkelanjutan.



Gambar 3.2. Pembiayaan sertifikasi ISPO melalui APBN dan APBD

Terkait peningkatan penerapan ISPO, pemerintah juga memfasilitasi pembiayaan dan pendanaan sertifikasi ISPO baik melalui APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten/Kota (Gambar 3.2). Bantuan pembiayaan sertifikasi ISPO diprioritaskan untuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi dengan luas areal 500-1000 ha. Pendanaan terkait ISPO dapat berupa pelatihan, pendampingan pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO, dan sertifikasi ISPO awal. Sertifikasi ISPO ulang dan sertifikasi untuk perusahaan dibebankan kepada pemohon atau pemilik kebun.

2. Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup (KIJLH) dan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH)

Pengelolaan jasa lingkungan diatur melalui UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang diubah dengan PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peraturan tersebut, kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup (KIJLH) termasuk dalam instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Skema KIJLH merupakan pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara pemanfaat dengan penyedia jasa lingkungan hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup. Pada skema KIJLH, pemerintah terlibat baik sebagai penyedia maupun penerima manfaat jasa lingkungan.

Adapun pembayaran jasa lingkungan hidup (PJLH) melibatkan pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dinilai dengan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang antar orang atau kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat jasa lingkungan hidup dan penyedia jasa lingkungan hidup melalui perjanjian berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup. Pada skema ini, tidak ada keterlibatan pemerintah sebagai penyedia maupun penerima manfaat jasa lingkungan, namun lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat.

Skema KIJLH maupun PJLH dapat diterapkan dalam pengelolaan sawit berkelanjutan salah satunya pada kebun sawit agroforestri. Tahapan yang perlu dilakukan untuk menerapkan skema pembayaran jasa lingkungan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring dan evaluasi.

- Tahap persiapan mencakup: (1) analisis skala spasial penyediaan jasa lingkungan; (2) analisis jasa lingkungan potensial; (3) ruang lindung jasa lingkungan; (4) identifikasi para pihak yang terlibat dalam penyediaan dan pemanfaatan jasa lingkungan; (5) penilaian jasa lingkungan sebagai basis data untuk penetapan indikator yang akan diawasi dan dievaluasi; (6) penetapan bentuk dan nilai kompensasi/pembayaran jasa lingkungan; (7) penetapan dasar hukum dan kelembagaan.
- Tahapan pelaksanaan meliputi: (1) perjanjian kerja sama penyediaan jasa lingkungan dan (2) pelaksanaan kegiatan sesuai kontrak dan perjanjian kerja sama.
- Tahapan monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian kompensasi kepada penyedia jasa. Terdapat opsi jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan di area agroforestri sawit seperti keanekaragaman hayati, penyimpanan karbon, maupun tata kelola air. Pendanaan yang dihasilkan melalui pembayaran/kompensasi jasa lingkungan hidup dapat dimanfaatkan terutama untuk program dan kegiatan yang terdapat pada Komponen C yaitu Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.

3. Skema insentif dan disinsentif melalui TAPE dan TAKE

Transfer anggaran berbasis ekologi (*Ecological Fiscal Trasfer/EFT*) di tingkat daerah dapat dilakukan melalui skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) and Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE). Skema TAPE merupakan transfer dana dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota, sedangkan TAKE berupa transfer dana dari pemerintah kabupaten/kota ke kecamatan/desa berbasis kinerja dalam menjaga lingkungan. Adapun dasar hukum bagi pelaksanaan skema Transfer Fiskal berbasis Ekologi yaitu:

- PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional
- Peraturan Menteri LHK No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon

Skema TAPE maupun TAKE dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan praktik pengelolaan sawit berkelanjutan di Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi dapat menetapkan indikator pengelolaan sawit berkelanjutan yang harus dipatuhi oleh kabupaten produsen. Kabupaten yang memenuhi indikator yang ditetapkan akan menerima insentif anggaran sedangkan kabupaten yang tidak memenuhi menerima disinsentif dalam bentuk pemotongan anggaran tertentu. Untuk membangun skema ini pemerintah perlu menyusun indikator dan target kinerja, alat pengukuran kinerja, serta sistem monitoring dan evaluasi. Skema TAPE dan TAKE tidak mewajibkan penambahan anggaran namun dilakukan realokasi anggaran dan penetapan sektor prioritas.

4. Pendanaan dari sektor privat dan masyarakat

Sumber pendanaan yang berasal dari pelaku usaha adalah dana yang bersumber dari perusahaan perkebunan melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan dana lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat adalah dana-dana hibah yang dapat berasal dari lembaga-lembaga donor dan yayasan nirlaba. Hibah daerah merupakan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah pusat atau pihak lain kepada pemerintah daerah. Selain dari pemerintah, hibah juga dapat diberikan oleh badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri dan kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri. Adapun mekanisme hibah dari luar negeri harus melalui pemerintah pusat. Dasar hukum untuk pemanfaatan dana CSR dan hibah daerah yaitu:

- UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- PP No. 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah
- PP No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Peraturan Gubernur No. 12 tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program CSR dan hibah dapat dialokasikan untuk program dan kegiatan terutama pada komponen B terkait Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun dan Komponen C terkait Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Pelaksanaan CSR sebaiknya dapat dikelola dan dialokasikan oleh pemerintah atau forum multi-pihak. Selain itu, diperlukan adanya sistem pengawasan pelaksanaan dan dampak CSR bagi pengelolaan lingkungan dan penghidupan masyarakat.

5. Skema insentif penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk instrumen ekonomi lingkungan yang menggunakan skema insentif. Penghargaan kinerja dapat diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan maupun kelompok tani/pekebun yang telah melakukan pengelolaan lahan/kebun secara berkelanjutan, sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Pemberian penghargaan kinerja ini diatur dalam PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi para pemangku kepentingan dalam mengadopsi

pengelolaan sawit berkelanjutan. Penghargaan dari pemerintah daerah juga dapat menjadi modal bagi perusahaan untuk penilaian di tingkat nasional, salah satunya melalui program PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) oleh KLHK.

6. Pembiayaan dari sektor perbankan

Pendanaan dari lembaga keuangan, salah satunya sektor perbankan, dapat menjadi alternatif pendanaan bagi kegiatan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan oleh masyarakat. Adapun program-program yang dapat dibiayai oleh pendanaan dari sektor perbankan seperti program peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam mengelola sarana produksi dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam praktik pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan. Dasar hukum bagi pendanaan mikro dari sektor perbankan yaitu:

- Inpres No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- PMK No. 190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring terhadap RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027 dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan *input* dan *output* untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (*outcome*) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program.

Pendekatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kelapa sawit berkelanjutan perlu dilakukan tidak saja di tingkat plot perkebunan atau perusahaan, tetapi perlu difokuskan di seluruh lanskap produksi atau di tingkat yurisdiksi, dalam hal ini di tingkat provinsi dan kabupaten. Pendekatan keberlanjutan yurisdiksi mempercayakan akuntabilitas dalam pelaksanaan keberlanjutan kepada pemerintah daerah yang bekerja sama dengan sektor bisnis, kelompok tani, dan masyarakat sipil. Di tingkat nasional, pembangunan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan keberlanjutan *Terpercaya* telah diujicobakan di beberapa daerah dengan tujuan untuk membangun pemahaman bersama tentang “keberlanjutan yurisdiksi” (*jurisdictional sustainability*) dan menawarkan berbagai indikator untuk mengukur dan melacak kemajuan menuju yurisdiksi keberlanjutan secara transparan. *Terpercaya* memiliki 4 pilar dan 22 indikator yang dipilih didasarkan pada regulasi Indonesia¹ dan menjadi dasar untuk penentuan insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah, termasuk penyaluran alokasi transfer ke daerah². Berbagai indikator tersebut dirancang untuk mengevaluasi kinerja yurisdiksi dan menunjukkan manfaat dari produksi komoditas yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 3.1. Pilar dan Indikator Terpercaya

| Pilar | No | Indikator Terpercaya |
|---|----|---|
| Lingkungan hidup Aspek lingkungan menekankan pada perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati serta jasa ekosistem seperti perlindungan tanah dan pengaturan air, serta peningkatan kesejahteraan daerah melalui pengurangan kebakaran dan kabut asap serta peningkatan kualitas air. | 1. | Perlindungan hutan permanen |
| | 2. | Perlindungan kawasan yang penting untuk layanan ekologi |
| | 3. | Pencegahan kebakaran |
| | 4. | Perlindungan lahan gambut |
| | 5. | Mitigasi perubahan iklim |
| | 6. | Hutan produksi dikelola secara berkelanjutan |
| | 7. | Pengendalian polusi air dan udara |

1 <https://efi.int/sites/default/files/files/flegtredd/Terpercaya/Briefings/2.%20Bridging%20Indonesian%20laws%20-%20BAHA-SA.pdf> diakses 4 Oktober 2022

2 https://auriga.or.id/resource/reference/2021-04-26%20-%20ngopini%20sawit_bappenas.pdf diakses 4 Oktober 2022

| Pilar | No | Indikator Terpercaya |
|--|-----|---|
| Sosial Aspek sosial mencakup perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak adat, dan perlindungan (<i>safeguard</i>) yang memastikan legalitas produksi dan keadilan sosial. Selain itu, aspek sosial juga meninjau penguasaan lahan, partisipasi formal petani kecil dalam ekonomi, dan peningkatan hak-hak pekerja. | 8. | Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan |
| | 9. | Pengakuan hak adat |
| | 10. | Resolusi konflik |
| | 11. | Bagian untuk petani kecil |
| | 12. | Registrasi petani kecil |
| Ekonomi Aspek ekonomi menilai manfaat bagi masyarakat pedesaan khususnya petani kecil, dari partisipasi dalam produksi komoditas, dan dari mempertahankan akses dan harga pasar. | 13. | Produktivitas petani kecil |
| | 14. | Organisasi petani kecil |
| | 15. | Dukungan untuk petani kecil |
| | 16. | Industri minyak sawit yang bertanggung jawab (termasuk ISPO dan RSPO) |
| | 17. | Lapangan pekerjaan pedesaan |
| Tata Kelola Aspek tata kelola memastikan tata kelola rantai pasok komoditas transparan, berkelanjutan, dan inklusif. | 18. | Proporsi anggaran kabuapten dialokasikan untuk keberlanjutan |
| | 19. | Akses informasi publik |
| | 20. | Partisipasi multi pemangku kepentingan dalam perencanaan |
| | 21. | Mekanisme pengaduan |
| | 22. | Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan |

Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain:

a. Pembentukan sistem/skema pelaporan, monitoring, dan evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan tidak berdiri sendiri, namun menjadi bagian dari penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan mempertimbangkan indikator-indikator yang memungkinkan untuk mengukur keberlanjutan di tingkat yurisdiksi, seperti *Terpercaya*. Dalam membangun sistem monitoring dan evaluasi penetapan indikator, target kinerja, serta pembagian peran antar pemangku kepentingan merupakan tahap yang krusial. Melalui proses diskusi yang inklusif telah dilakukan penetapan indikator dan pembagian peran pemangku kepentingan untuk setiap kegiatan yang direncanakan dalam RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang pada Matriks Rencana Aksi. Tabel 3.2 merincikan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam proses monitoring dan evaluasi. Proses monitoring dan evaluasi RAD KSB sebaiknya dilakukan sesuai linimasa Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.2 Peran pemangku kepentingan dalam proses monitoring dan evaluasi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan

| No. | Pemangku Kepentingan | Peran |
|-----|---|---|
| 1. | Ketua Tim Pelaksana Daerah (TPD) | Mengoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi, termasuk pengumpulan data, serta melaporkan hasil pelaksanaan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan |
| 2. | Sekretariat TPD | Memfasilitasi kegiatan rapat TPD maupun kegiatan kesekretariatan lainnya |
| 3. | OPD Pelaksana (mengacu pada Matriks Rencana Aksi) | Melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data sesuai dengan indikator yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD Pelaksana |
| 4. | OPD/lembaga pendukung | Mendukung dan membantu OPD Pelaksana dalam melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data sesuai kapasitasnya |

b. Identifikasi kebutuhan data pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Perlu dilakukan identifikasi data untuk melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Matriks Rencana Aksi. Identifikasi kebutuhan data harus disertai dengan pemangku kepentingan terkait yang dapat memfasilitasi penyediaan data.

c. Penyediaan, pengumpulan, dan pengolahan data

Penyediaan, pengumpulan, dan pengolahan data dilakukan oleh OPD Pelaksana yang telah ditetapkan pada Matriks Rencana Aksi. Penyediaan dan pengumpulan data juga dapat dilakukan oleh OPD/lembaga pendukung yang dikoordinasikan oleh OPD Pelaksana. Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi langsung maupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target output pelaksanaan RAD KSB oleh setiap OPD.

d. Pelaporan hasil pengolahan data sesuai indikator penilaian yang ditetapkan

Pelaporan hasil monitoring menyajikan informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai pada setiap OPD. Selanjutnya, informasi kemajuan tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan, proses yang dilakukan, serta capaian kegiatan.

e. Penyelenggaraan evaluasi terhadap capaian program dan outcome

Evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor penghambat maupun faktor pendukung Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dihimpun dari masing-masing OPD pelaksana dan OPD/mitra pendukung melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik. Laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB oleh TPD disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAD KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

f. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dalam laporan kinerja daerah

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi perlu diintegrasikan dalam pelaporan kinerja daerah sekaligus menjadi bahan bagi evaluasi perencanaan kebijakan di masa yang akan datang.

g. Sosialisasi hasil capaian RAD KSB Sumatera Selatan

h. Pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan untuk perencanaan kebijakan di masa yang akan datang

Berdasarkan hasil identifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan RAD KSB yang telah disinkronisasikan dengan Rensta OPD Provinsi Sumatera Selatan, telah dilakukan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan serta perencanaan tindak lanjut seperti pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan

(Lihat Lampiran)

Bab 4

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027 merupakan wujud implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024. Inpres tersebut mengamanatkan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota untuk menyusun RAD KSB dan membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaannya. RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan acuan dan pedoman membangun dan membina para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan baik pekebun mandiri perorangan maupun badan usaha/perusahaan, untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Pembiayaan yang timbul dari program Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Sumatera Selatan bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. Sekretariat Tim Pelaksana RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan mendukung dan melakukan pendampingan dalam proses penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan.

Bab 5

LAMPIRAN

Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|---|--|---|-------------------|------|------|------------------------------------|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR | | | | | | | | |
| 1. Program Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik | | | | | | | | |
| 1.1. | Penyusunan Pedoman Pendataan Pekebun | Tersusunnya pedoman pendataan pekebun di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Badan Informasi Geospasial 5. Badan Pusat Statistik 6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota 9. Pelaku Usaha | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Perkebunan Kelapa Sawit) |
| 2. Program Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit | | | | | | | | |
| 2.1. | Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait perkebunan kelapa sawit | Tersedianya IGT tutupan kebun sawit yang terintegrasi | 2021 | 2022 | 2023 | Badan Informasi Geospasial | 1. Kementerian Pertanian 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemen LHK 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha | Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit |
| 2.2. | Menyusun pedoman atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pemetaan partisipatif | Tersedianya pedoman atau NSPK pemetaan partisipatif | 2021 | 2022 | 2023 | Badan Informasi Geospasial | 1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemen LHK 4. Kemendagri 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha | |
| 2.3. | Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebunnya, yang diperbarui secara berkala | 2.3.1. Tersedianya data pekebun dan peta lokasi kebunnya yang diperbarui secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kemen PPN/ Bappenas 3. Kemen ATR/BPN 4. BIG 5. BPS 6. BDPKPS 7. Pemprov 8. Pemkab/Kota 9. Pelaku Usaha | |
| | | 1.3.2. Tersedianya peta indikatif dari kebun- kebun yang sudah perlu diremajakan di 21 provinsi | | | | | | |
| 2.4. | Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan | 2.3.1. Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif | 2021 | 2022 | 2023 | Badan Informasi Geospasial | 1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN | |
| | | 2.3.2. Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan | | | | | 3. Kemen LHK 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha | |
| | | | | | | | 7. Pelaku Usaha | |
| | | | | | | | | |
| 2.5. | Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan | 2.3.1. Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif | 2021 | 2022 | 2023 | Badan Informasi Geospasial | 1. Kementan | |
| | | 2.3.2. Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan | | | | | 2. Kemen ATR/BPN | |
| | | | | | | | 3. Kemen LHK | |
| | | | | | | | 4. Pemprov | |
| | | | | | | | 5. Pemkab/Kota | |
| | | | | | | | 6. Pelaku Usaha | |

| 3. Program Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|------|------|---|--|---|--|
| 3.1. | Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya | Terbitnya strategi komunikasi dan rencana sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kemendagri | Program sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya | |
| | | | | | | | 2. Kernen LHK | | |
| | | | | | | | 3. Kernen ATR/BNP | | |
| | | | | | | | 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika | | |
| | | | | | | | 5. Kementerian Ketenagakerjaan | | |
| | | | | | | | 6. BPDPKS | | |
| | | | | | | | 7. Pemprov | | |
| | | | | | | | 8. Pemkab/Kota | | |
| | | | | | | | 9. Pelaku Usaha | | |
| 3.2. | Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi | Terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi di tingkat pusat dan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kemendagri | | |
| | | | | | | | 2. Kernen LHK | | |
| | | | | | | | 3. Kernen ATR/BNP | | |
| | | | | | | | 4. Kemkominfo | | |
| | | | | | | | 5. Kemenaker | | |
| | | | | | | | 6. BPDPKS | | |
| | | | | | | | 7. Pemprov | | |
| | | | | | | | 8. Pemkab/Kota | | |
| | | | | | | | 9. Pelaku Usaha | | |
| 4. Program Peningkatan Sinergitas antar kementerian/lembaga pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 4.1. | Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala | Kebijakan yang sudah disinkronisasi | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 1. Kementan | Program peningkatan sinergi antar organisasi perangkat daerah berkaitan dengan usaha perkebunan kelapa sawit | |
| | | | | | | | 2. Kernen LHK | | |
| | | | | | | | 3. Kernen ATR/BNP | | |
| | | | | | | | 4. Kementerian Perdagangan | | |
| | | | | | | | 5. Kemendagri | | |
| | | | | | | | 6. BPDPKS | | |
| 4.2. | Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing kementerian/lembaga | Tersedianya data dan informasi yang telah disinkronisasi pada masing-masing kementerian/lembaga | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 1. Kernen PPN/Bappenas | | |
| | | | | | | | 2. Kemenkeu | | |
| | | | | | | | 3. Kementan | | |
| | | | | | | | 4. Kernen LHK | | |
| | | | | | | | 5. Kernen ATR/BNP | | |
| | | | | | | | 6. Kemendag | | |
| | | | | | | | 7. Kemendagri | | |
| | | | | | | | 8. BPDPKS | | |
| | | | | | | | 9. BIG | | |
| | | | | | | | 10. BPS | | |
| | | | | | | | 11. Pemprov | | |
| | | | | | | | 12. Pemkab/Kota | | |
| 5. Program Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 5.1. | Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit | Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit | 2021 | 2022 | 2023 | 1. Pemerintah Provinsi | 1. Kementan | Program pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota penghasil kelapa sawit | |
| | | | | | | 2. Pemerintah Kabupaten/ Kota | 2. Kemendagri | | |
| | | | | | | | 3. Pelaku Usaha | | |
| 6. Program Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 6.1. | Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/ kota penghasil kelapa sawit | Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1. Kemendagri | Program pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung kualitas usaha perkebunan kelapa sawit | |
| | | | | | | | 2. Kernen PPN/ Bappenas | | |
| | | | | | | | 3. Kementan | | |
| | | | | | | | 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | | |
| | | | | | | | 5. BPDPKS | | |
| | | | | | | | 6. Pemprov | | |
| | | | | | | | 7. Pemkab/Kota | | |
| 7. Program Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif | | | | | | | | | |
| 7.1. | Membentuk kelompok kerja antar instansi di dalam upaya kepatuhan hukum | Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kernen LHK | Program kolaborasi dengan pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan | |
| | | | | | | | 2. Kernen ATR/BNP | | |
| | | | | | | | 3. Kernenaker | | |
| | | | | | | | 4. Pemprov | | |
| | | | | | | | 5. Pemkab/Kota | | |
| 7.2. | Meningkatkan jumlah dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) | Meningkatnya jumlah dan kompetensi PPNS dari 28 orang menjadi 100 orang PPNS untuk 21 Provinsi | 2021 | 2022 | 2023 | | 1. Kernen LHK | | |
| | | | | | | | 2. Kernen ATR/BNP | | |
| | | | | | | | 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | | |
| | | | | | | | 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | | |
| | | | | | | | 5. Kepolisian RI | | |
| | | | | | | | 6. Kejaksaan RI | | |
| | | | | | | | 7. Pemprov | | |
| | | | | | | | 8. Pemkab/Kota | | |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program dalam Renstra OPD Prov. Sumsel yang sesuai dengan program pada RAN KSB |
|--|--|--|-------------------|------|------|------------------------------------|--|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | |
| B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN | | | | | | | | |
| 8. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat | | | | | | | | |
| 8.1. | Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun | Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat di 21 provinsi | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian pertanian | 1. BPD PKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha | Program peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam mengelola sarana produksi |
| 8.2. | Melakukan sosialisasi program kemitraan antara: | Terselenggaranya sosialisasi program kemitraan di 21 provinsi antara: | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian pertanian | 1. Kementerian BUMN | |
| | a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih | a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih | | | | | 2. Pemprov | |
| | b. produsen benih yang membesarkan benih | b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau | | | | | 3. Pemkab/Kota | |
| | c. BUMN Perkebunan | c. BUMN Perkebunan | | | | | 4. Pelaku Usaha Perusahaan | |
| | dan atau | | | | | | 5. Produsen Benih | |
| 8.3. | Mengembangkan program kemitraan antara: | Terjalannya kerja sama di 21 provinsi antara: | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kementerian BUMN | |
| | a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih | a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih | | | | | 2. Pemprov | |
| | b. produsen benih yang membesarkan benih | b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau | | | | | 3. Pemkab/Kota | |
| | c. BUMN Perkebunan | c. BUMN Perkebunan | | | | | 4. Pelaku Usaha Perusahaan | |
| | dan atau | | | | | | 5. Produsen Benih | |
| 8.4. | Memfasilitasi peningkatan komitmen produsen benih yang membesarkan benih siap salur dengan produsen benih yang memiliki kebun sumber benih untuk menjual benih bersertifikat | terwujudnya perjanjian antara produsen benih yang membesarkan benih siap salur dengan produsen benih yang memiliki kebun sumber benih untuk menjual benih bersertifikat di 21 provinsi | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kementerian BUMN 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha Perusahaan Produsen Benih | |
| 8.5. | Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi | terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Pemprov 2. Pemkab/Kota | |
| 9. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktek budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) | | | | | | | | |
| 9.1. | Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP | tersusunnya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Pemprov 2. Pemkab/Kota Pelaku Usaha | Program peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik dan Berkelanjutan |
| 9.2. | di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik | GAP di tingkat nasional dan provinsi baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. BPD PKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha | |
| 9.3. | Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit | Meningkatnya kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. BPD PKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha | |
| 9.4. | Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun | Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada 500 kelompok pekebun di 21 | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha | |
| 10. Program Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun | | | | | | | | |
| 10.1. | Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya | Terlaksananya sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya, di 21 provinsi | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kemenkeu 2. Kementerian BUMN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | Program peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan |
| 10.2. | Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat | Meningkatnya jumlah pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di 21 provinsi | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kementerian BUMN 2. BPD PKS 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | |
| 10.3. | Meningkatkan dukungan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana | Meningkatnya dukungan ketersediaan dana untuk PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) dan sumber | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kemenko Bidang Perekonomian 2. BPD PKS 3. Pelaku Usaha | |
| 10.4. | Meningkatkan kelancaran dalam penyaluran dana PSR kepada pekebun | Meningkatnya realisasi penyaluran dana peremajaan kepada pekebun di 21 provinsi | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kemenko Bidang Perekonomian 2. Kementerian BUMN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. BPD PKS 6. Pelaku Usaha | |
| 10.5. | Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat | Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di 21 provinsi | 2021 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kementerian BUMN 2. BPD PKS 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | |

| 11. Program Percepatan Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------|------|-----------------------|--|--|---|---|------|--|---|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|----------------|
| 11.1. | Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun | 11.1.1. Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah | Program pembinaan dan pengembangan kelembagaan perkebunan | | | | | | | | | | |
| | | 11.1.2. Terbentuknya lembaga pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk Koperasi, dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di 26 provinsi penghasil kelapa sawit | | | | | 2. Kemendagri | | | | | | | | | | | |
| | | 11.2. | | | | | Memperkuat kelembagaan pekebun | | | Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4. Pemprov | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5. Pemkab/Kota | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6. Pelaku Usaha | | | |
| 11.3. | Menyusun petunjuk teknis jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun | | Tersedianya petunjuk teknis jual beli TBS kelapa sawit produksi pekebun | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | Kementerian Pertanian | 1. Kemenkop dan UKM | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2. Kemendagri | | |
| | | 3. Kementerian Desa, PDT dan Trans | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. Pemprov | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. Pemkab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6. Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4. | Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun | Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kemendag | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2. Kemendagri | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Pemprov | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4. Pemkab/Kota | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5. Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6. Kemenkop dan UKM | | | | | | | | | | | |
| 12. Program Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi peningkatan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala | Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, Weningkatnya jumlah pelatihan penyuluh pertanian bidang perkebunan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Pemprov | | | Program penyuluhan pertanian | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2. Pemkab/Kota | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7. Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12.2. | | | | | Meningkatkan peran sentra penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam | Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, Weningkatnya jumlah pelatihan penyuluh pertanian bidang perkebunan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 2. Kemendagri |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. Pemprov |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4. Pemkab/Kota |
| 5. Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3. | Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan | Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | | 8. Pelaku Usaha | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1. Pemprov | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2. Pemkab/Kota | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12.4. | Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan | Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan | | | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Pemprov | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2. Pemkab/Kota | | |
| 3. Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Pemprov | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pemkab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program dalam Renstra OPD Prov. Sumsel yang sesuai dengan program pada RAN KSB | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|------|------|--|--|--|--|---|---|------|------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | | | | | | | | |
| C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Program Peningkatan Upaya Konsevasi Keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Menyusun regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) | Terbitnya regulasi perlindungan KEE dan pedoman teknis ABKT | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan | Program pengelolaan keanekaragaman hayati | | | | | | | |
| | | | | | | | 2. Kemen ATR/BPN | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. BRG | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4. Pemprov | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5. Pemkab/Kota | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6. Pelaku Usaha | | | | | | | | |
| 13.2. | Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan | 13.2.1. Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati di 26 provinsi penghasil kelapa sawit | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan | | | | | | | | |
| | | 13.2.2. Tersedianya data jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati yang berada di dalam | | | | | 2. Kemen ATR/BPN | | | | | | | | |
| | | 3. Pemprov | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. Pemkab/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13.3. | | | | | Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota | | | Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan |
| | | | | | | | | | | Provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit | | | | | 2. Kemen ATR/BPN |
| 3. Pemprov | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Pemkab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Kementan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4. | Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | Meningkatnya jumlah Forum Kalaborasi pengelola KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten penghasil kelapa sawit yang memiliki peran secara efektif dari 48 menjadi 83 | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2. Kemen ATR/BPN | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. BRG | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4. Pemprov | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5. Pemkab/Kota | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6. Pelaku Usaha | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13.5. | | | Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) | Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2. Kemen ATR/BPN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Pemprov | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Pemkab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Kementan | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|------|--|---|---|--|
| 13.6 | Menyusun pedoman Rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun | 13.6.1. Tersedianya pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan | | |
| | | 13.6.2. Tersedianya rencana dan implementasi perlindungan dan | | | | | 2. Kemendagri | | |
| | | | | | | | 3. BRG | | |
| | | | | | | | 4. Pemprov | | |
| | | | | | | | 5. Pemkab/Kota | | |
| 14. Program Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan | | | | | | | | | |
| 14.1 | Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan lahan Tanpa Bakar (PLTB) | Tersedianya sarana Prasarana untuk Pekebun yang menerapkan PLTB di provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran secara berkelanjutan | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kementan LHK 2. Kemendagri 3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 4. BRG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha | Program peningkatan sarana dan prasarana perkebunan | |
| 14.2 | Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun | Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kementan LHK 2. BNPB 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha | | |
| 14.3 | Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun | 14.3.1. Terbentuknya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kementan LHK 2. Kemendes PDTT 3. BNPB 4. BRG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha | | |
| | | 14.3.2. Terlaksananya kerjasama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah | | | | | | | |
| 14.4 | Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun | Terlaksananya tindak lanjut hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun secara berkala | 2021 | 2022 | 2023 | Kementarian Pertanian | 1. Kementan LHK 2. BNPB 3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 4. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha | | |
| 14.5 | Menyusun Peraturan terkait KTPA | Terbitnya peraturan terkait TPA | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kementan LHK 2. Kemendes PDTT 3. Kementan 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha | | |
| 15. Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan | | | | | | | | | |
| 15.1 | Melakukan menyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit | Tersedianya penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | | Program penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor lahan |
| 15.2 | Penyusunan Pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit | Tersedianya pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | | |
| 15.3 | Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik | Tersedianya laporan inventarisasi emisi GRK, baseline , dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kementan LHK 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | | |
| 15.4 | Menyusun database nasional terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit | Tersusunnya database nilai simpanan karbon dan emisi GRK yang dihasilkan oleh sector perkebunan kelapa sawit | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kementan LHK 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | | |
| 15.5 | Menyusun rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit | Tersedianya rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kementan LHK 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | | |
| 15.6 | Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit | Laporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kementan LHK 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | | |
| | | | | | | | | | |
| 16. Pengukuran Pelaporan dan Verifikasi (measurement, reportin, and verification/MRV) potensi penurunan emisi GRK diperkebunan kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 16.1 | Melakukan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit | 16.1.1. Tersedianya laporan hasil MRV potensi penurunan emisi GRK di 16.1.2. Terverifikasinya penurunan emisi perkebunan kelapa sawit | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan | 1. Kementan 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | Program Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) | |
| 16.2 | Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK | Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi melakukan pengukuran emisi GRK | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|------|------|---|--|--|--|--|
| 17. Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan | Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 1. Kemen LHK 2. Kementan 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha | Program peningkatan pemanfaatan lahan kritis (dan terlarut) sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit | | |
| 17.2 | Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektifitas pengelolaan lahan kritis | Tersusunnya regulasi dan petunjuk teknis terkait pemberian peluang pengelolaan lahan kritis | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 1. Kemen LHK 2. Kementan 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha | | | |
| 17.3 | Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit | Tersedianya data dasar pertanahan dan lahan kritis disektor perkebunan kelapa sawit | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 1. Kemen LHK 2. Kementan 3. BRG 4. BIG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha | | | |
| 17.4 | Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan | Tersedianya kajian tentang sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 1. Kemen LHK 2. Kementan 3. BRG 4. BIG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha | | | |
| 18. Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan | Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kemenko 2. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Kemen LHK 4. BDPPKS | Program pengelolaan limbah kelapa sawit | | |
| 18.2 | Mengembangkan strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira | Tersedianya strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, dan nira | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kemen ESDM 2. Kemen LHK 3. BDPPKS 4. Pelaku Usaha | | | |
| 18.3 | Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan | Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kemen ESDM 2. Kemen LHK 3. BDPPKS 4. Pelaku Usaha | | | |
| 19. Program Peningkatan Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit Sebagai Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai energi terbarukan | 19.1.1. Tersedianya laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi 19.1.2. Meningkatkan jumlah kerjasama perusahaan kelapa sawit dengan Perusahaan Listrik Negara dalam pemanfaatan POME sebagai energi terbarukan | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemen BUMN 4. Pemprov 5. Pemkab/kota 6. Pelaku usaha | Program pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA | | | | | | | | | | |
| 20. Program Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat | Tersedianya rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kemen ATR/BNP 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha | Program pengelolaan izin lokasi dan HGU untuk kebun kelapa sawit | | |
| 20.2 | Melakukan konsultasi publik mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan | Terdapatnya umpan balik dari para pemangku kepentingan mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Kemen ATR/BNP 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha | | | |
| 21. Program Melakukan Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Membentuk Tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain | 21.1.1. Terbentuknya Tim mediasi penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain 21.1.2 Tersedianya tim ediasi yang memiliki kemampuan dalam penanganan sengketa lahan | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional | 1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota | Program percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat | | |
| 21.2 | Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi | Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional | 1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|------|------|---|---|---|--|--|
| 21.3 | Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan | 21.3.1. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional | 1. Kementan | | | |
| | | 21.3.2. Berkurangnya sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit | 2021 | 2022 | 2023 | | 2. Kemen LHK | | | |
| | | | | | | | 3. Kemendagri | | | |
| | | | | | | | 4. Pemprov | | | |
| | | | | | | | 5. Pemkab/Kota | | | |
| 22. Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan | Terselenggaranya status usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan | Program penyelesaian sengketa kebun kelapa sawit | | |
| | | | | | | | 2. Kemen LHK | | | |
| | | | | | | | 3. Pemprov | | | |
| | | | | | | | 4. Pemkab/Kota | | | |
| | | | | | | | 5. Pemkab/Kota | | | |
| 22.2 | Menyelesaikan keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman | Terselenggaranya keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan | | | |
| | | | | | | | 2. Kemen LHK | | | |
| | | | | | | | 3. Pempro | | | |
| | | | | | | | 4. Pemkab/Kota | | | |
| | | | | | | | 5. Pemkab/Kota | | | |
| 22.3 | Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang Terindikasi dalam kawasan hutan | 22.3.2. 22.3.1. Tersedianya data lahan perkebunan kelapa sawit | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan | | | |
| | | 22.3.3. Tersedianya peta indikatif dan permasalahan lahan | | | | | 2. Kemen LHK | | | |
| | | | | | | | 3. Pemprov | | | |
| | | | | | | | 4. Pemkab/Kota | | | |
| 22.4 | Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan | 22.3.4. Tersedianya database dan hasil verifikasi data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi didalam kawasan hutan | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan | | | |
| | | 22.3.4. Tersedianya database dan hasil verifikasi data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi didalam kawasan hutan | | | | | 2. Kemen ATR/BPN | | | |
| | | | | | | | 3. Pemprov | | | |
| | | | | | | | 4. Pemkab/Kota | | | |
| 23. Program Legalitas lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan | | | | | | | | | | |
| 23.1 | Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan | Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional | 1. Kementan | Program pengelolaan hutan | | |
| | | | | | | | 2. KemenLHK | | | |
| | | | | | | | 3. Kemendagri | | | |
| | | | | | | | 4. Pemprov | | | |
| | | | | | | | 5. Pemkab/Kota | | | |
| 23.2 | Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan erkebunan kelapa sawit | Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional | 1. Kementan | | | |
| | | | | | | | 2. KemenLHK | | | |
| | | | | | | | 3. Kemendagn | | | |
| | | | | | | | 4. Pemprov | | | |
| | | | | | | | 5. Pemkab/Kota | | | |
| 24. Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut | | | | | | | | | | |
| 24.1 | Menata lahan usaha perkebunan dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut | Diterapkannya usaha perkebunan yang "clear and clean" dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan | Program penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut | | |
| | | | | | | | 2. Kemendagri | | | |
| | | | | | | | 3. Pemprov | | | |
| | | | | | | | 4. Pemkab/Kota | | | |
| | | | | | | | 5. Pemkab/Kota | | | |
| 24.2 | Melakukan pendataan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut | 24.2.1. Tersedianya data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan | | | |
| | | 24.2.2. Tersedianya peta indikatif kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut | 2021 | 2022 | 2023 | | 2. Kemendagri | | | |
| | | 24.2.3. Tersedianya rekomendasi penyelesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut | 2021 | 2022 | 2023 | | 3. Pemprov | | | |
| | | | | | | | 4. Pemkab/Kota | | | |
| | | | | | | | 5. Pemkab/Kota | | | |
| 25. Program Pelaksanaan review regulasi ketenagakerjaan dan sosialisasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem keseragaman dan keseragaman kerja (K3) dan jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit | | | | | | | | | | |
| 25.1 | Melakukan review terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isu-isu | Tersusunnya rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Ketenagakerjaan | 1. Kementan | | | |
| | | | | | | | 2. Pemprov | | | |
| | | | | | | | 3. Pemkab/Kota | | | |
| | | | | | | | 4. Pemkab/Kota | | | |
| | | | | | | | 5. Pemkab/Kota | | | |
| 25.2 | Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit | Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Ketenagakerjaan | 1. Kementan | | | |
| | | | | | | | 2. Pemprov | | | |
| | | | | | | | 3. Pemkab/Kota | | | |
| | | | | | | | 4. Pelaku usaha | | | |
| | | | | | | | 5. Pelaku usaha | | | |
| 25.3 | Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan | dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Ketenagakerjaan | 1. Kementan | Program pengakuan keberadaan Masyarakat Adat (MHA), kearifan lokal, dan hak MHA | | |
| | | | | | | | 2. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | | | |
| | | | | | | | 3. Pemprov | | | |
| | | | | | | | 4. Pemkab/Kota | | | |
| | | | | | | | 5. Pelaku usaha | | | |
| 25.4 | Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit | terlaksananya pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada 26 provinsi | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Ketenagakerjaan | 1. Kementan | | | |
| | | | | | | | 2. BPJS | | | |
| | | | | | | | 3. Pemprov | | | |
| | | | | | | | 4. Pemkab/Kota | | | |
| | | | | | | | 5. Pelaku usaha | | | |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program dalam Rencana OPD Prov. Sumsel yang sesuai dengan program pada RAN KSB |
|---|--|--|-------------------|------|------|------------------------------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT | | | | | | | | |
| 26. Program Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional | | | | | | | | |
| 26.1 | Menyusun peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota | Tersedianya peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota | 2021 | 2022 | | Kementerian Pertanian | 1. Kemendag 2. Badan Standardisasi nasional 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 10. Pelaku Usaha | Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan |
| 26.2 | Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO | 26.2.1. Meningkatnya jumlah para pihak yang memahami 26.2.2. Meningkatnya jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapatkan sertifikat ISPO | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 27. Program Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun | | | | | | | | |
| 27.1 | Melakukan pendampingan/ penyuluhan bagi pekebun untuk penerimaan sertifikasi ISPO | Meningkatnya jumlah pekebun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 11. Pelaku Usaha | Program pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan daerah |
| 27.2 | Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat ISPO | 27.2.1. Meningkatnya jumlah kapasitas PUP dan dana di daerah untuk kegiatan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan 27.2.2. Meningkatnya jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | | | | | | | | |
| 27.3 | Menyusun Panduan Kemiripan antara Perusahaan dan pekebun untuk memperoleh | Tersedianya panduan kemiripan antara Perusahaan dan pekebun untuk | 2021 | | | Kementerian Pertanian | 1. Pemprov 2. Pemkab/Kota | |
| 27.4 | Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di provinsi dan kabupaten/kota | Meningkatnya jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Pertanian | 1. BPDPKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha | |
| 27.5 | Membentuk kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO | Terbentuknya kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO | 2021 | | | Kementerian Pertanian | 1. Kemen LHK 2. Kemen ATR/BPN 3. BSN 4. BPDPKS | |
| 28. Program Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional | | | | | | | | |
| 28.1 | Menyusun Strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional | Tersedianya strategi Diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional | | | | Kementerian Luar Negeri | 1. Kemendag 2. Kementan 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku Usaha | Program pendampingan terhadap ISPO |
| 28.2 | Melakukan Koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional | Terlaksananya Koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Luar Negeri | 1. Kemendag 2. Kementan 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku Usaha | |
| 28.3 | Menyusun Strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional | Tersedianya Strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Perdagangan | 1. Kemen Luar Negeri 2. Kementan 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku usaha | |
| 28.4 | Menyelenggarakan promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional | Terselenggaranya promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Perdagangan | 1. Kemenlu 2. Kementan 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku usaha | |
| 28.5 | Melakukan Kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program | 28.5.1. Terwujudnya Kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program | 2021 | 2022 | 2023 | Kementerian Luar Negeri | 1. Kemendag 2. Kementan 3. BSN 4. BPDPKS 5. Pelaku Usaha | |

Matriks Rencana Aksi Daerah

| No. | Kegiatan (Renstra OPD) | Sub Kegiatan | Indikator Keluaran (sesuaian dengan renstra) | Waktu Pelaksanaan | | | OPD Pelaksana | OPD/Mitra Kerja Pendukung | Pembiayaan |
|--|--|---|---|-------------------|------|------|---|--|--------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| A. Komponen Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur | | | | | | | | | |
| 1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Perkebunan Kelapa Sawit) | | | | | | | | | |
| 1.1 | Penyusunan Data Statistik Perkebunan | Melakukan pendataan komoditi perkebunan yang diperbarui secara berkala | Jumlah buku statistik perkebunan | | | | Dinas Perkebunan; BPS Provinsi Sumsel | BPS Kab/ Kota | APBD; APBN |
| | | Neraca data penatagunaan lahan | Tersedianya data terkait penatagunaan lahan | | | | ATR BPN | | APBN |
| | | Pendataan kompilasi harga penetapan TBS | Tersedianya data harga TBS | | | | Dinas Perkebunan | Perusahaan | APBD; APBN |
| 1.2 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | | | | BPS Provinsi Sumsel | Pemerintah Desa | APBD; APBN |
| 1.3 | Program penyediaan data dan pelayanan informasi statistik | DESA CANTIK (Desa Cinta Statistik) | Jumlah desa cantik (Cinta Statistik) | | | | BPS Provinsi Sumsel | BPS Kab/Kota | APBN |
| | | Sensus pertanian | Jumlah rumah tangga pertanian, perkebunan, dan perusahaan | | | | BPS | BPS Kab/ Kota; Swasta | APBN |
| | | Survey perusahaan perkebunan | Jumlah luas areal hasil perkebunan | | | | BPS | BPS Kab/ Kota; Dinas Perkebunan; GAPKI | APBN |
| | | Pendataan dengan menggunakan Aplikasi Sedap (Sedia data perusahaan perkebunan) | Jumlah perusahaan yang mengisi sensus pada aplikasi SEDAP | | | | BPS | Swasta; GAPKI; BPS Kab/Kota | APBN |
| | | Updating direktori perusahaan pertanian | Jumlah perusahaan pertanian | | | | Dinas Perkebunan | BPS Kaby/ Kota | APBN |
| 1.4 | Perbaruan data lokasi (koordinat) pabrik pengolahan PKS | Updating data PKS | Jumlah pabrik pengolahan (PKS) yang memiliki data titik koordinat | | | | Dinas Perkebunan | Perusahaan | APBD; APBN |
| 2. Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 2.1 | Updating Data Komoditas Perkebunan dengan Metode GIS | Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai sektor terkait perkebunan kelapa sawit | Tersedianya peta komoditas perkebunan | | | | Dinas Perkebunan | ATR BPN; Dinas Kehutanan; Bappeda | APBD; APBN |
| | | Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan | Tersedianya fasilitator dalam pemetaan partisipatif | | | | Dinas Perkebunan | Perusahaan Perkebunan; CSO | APBD; APBN |
| | | Pelatihan digitasi pemetaan komoditi | tersedianya SDM pemetaan komoditi | | | | Dinas Perkebunan | ATR-BPN; GAPKI; CSO | APBD; APBN |
| | | Inventarisasi data IUP | Terinventarisnya data IUP lintas Kabupaten | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD; APBN |
| | | Pemetaan kawasan perkebunan kelapa sawit | Tersedianya data pemetaan perkebunan kelapa sawit | | | | Dinas Perkebunan | Lapan | APBD; APBN |
| 2.2 | Monitoring dan evaluasi HGU | | Tersedianya data jumlah dan luasan HGU yang ada | | | | ATR BPN; Dinas Perkebunan | Dinas Lingkungan hidup dan Pertanian | APBD; APBN |
| 2.3 | Pengadaan software untuk mendukung jaringan informasi geospasial daerah | | Tersedianya software pendukung jaringan informasi geospasial daerah di bidang infrastruktur | | | | Bappeda | Lapan; BIG | APBD; APBN |
| 3. Program sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya | | | | | | | | | |
| 3.1 | Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya | Tersedianya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran | | | | Dinas Perkebunan | BPS; GAPKI; APKASINDO | APBD; APBN |
| | | Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi | Terlaksananya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi | | | | Dinas Perkebunan | BPS; GAPKI; APKASINDO | APBD; APBN |
| | | Sosialisasi keanggota KUD tentang PSR | Tersedianya data keanggotaan KUD | | | | Dinas Perkebunan | ATR BPN; Dinas Kehutanan; BPDPKS | APBD; APBN |
| 4. Program peningkatan sinergi antar organisasi perangkat daerah berkaitan dengan usaha perkebunan kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 4.1 | Harmonisasi kebijakan pengelolaan kelapa sawit | Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala | Tersedianya kebijakan yang sudah sinkronisasi | | | | Dinas Perkebunan | GAPKI; APKASINDO; MAKSI; CSO; ASPEKPIR | APBD; APBN |
| 4.2 | Validasi data perkebunan | Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing OPD | Tersedianya informasi data yang sinkronisasi untuk masing-masing lembaga | | | | Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota | GAPKI; APKASINDO; MAKSI; CSO; ASPEKPIR | APBD; APBN |
| 5. Program pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota penghasil kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 5.1 | Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota penghasil kelapa sawit | Terbentuknya forum multipihak kelapa sawit berkelanjutan | | | | Dinas Perkebunan | Lintas OPD, swasta, mitra pembangunan dan masyarakat | APBD; APBN |
| 6. Program pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung kualitas usaha perkebunan kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 6.1 | Pembangunan jalan produksi perkebunan | Terbentuknya jalan usaha tani terutama pada produksi perkebunan | Panjang jalan produksi | | | | Dinas Perkebunan; Dinas Pertanian | DPUBMTR; BPDPKS | APBD; APBN; BPDPKS |
| | | Terbentuknya jalan produksi dalam wilayah konsesi perkebunan | Panjang jalan produksi | | | | Swasta (perusahaan) | Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota | CSR; APBD; APBN |
| 7. Program kolaborasi dengan pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan | | | | | | | | | |
| 7.1 | Pembinaan Kemitraan Usaha Perkebunan; Kegiatan PSR | Membentuk kelompok kerja antar instansi di dalam upaya kepatuhan hukum dalam kegiatan PSR | Jumlah koperasi/kelompok tani yang melaksanakan kemitraan | | | | Dinas Perkebunan | DPUBMTR; BPDPKS | APBD; APBN |
| | | Memberikan bantuan replanting kepada petani | Jumlah kelompok tani/petani yang mendapatkan bantuan | | | | BPDPKS | Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD; APBN |
| | | Inventarisasi dan sosialisasi dengan mitra/perusahaan kelapa sawit | Jumlah pertemuan yang terlaksana | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD; APBN |

| Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------|------|------|---|---|----------------------------|
| No. | Kegiatan (Renstra OPD) | Sub Kegiatan | Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra) | 2021 | 2022 | 2023 | OPD Pelaksana | OPD/Mitra Kerja Pendukung | Pembiayaan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| B. Komponen Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun | | | | | | | | | |
| 8. Program peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam mengelola sarana produksi | | | | | | | | | |
| 8.1 | Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Sarana Produksi | Terlaksananya pengawasan mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/bibit perkebunan | | | | Dinas Perkebunan; UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan; Dinas Perindustrian | UPTD Benih; Asosiasi penangkar benih; PBS (Sampoerna, PKS Medan, dsb) | Swasta |
| | | Sosialisasi program kemitraan antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih c. BUMN perkebunan | Terlaksananya sosialisasi yang dilakukan dalam program kemitraan | | | | Dinas Perkebunan | Asosiasi penangkar benih; PPBPTI; Sampoerna Agro; Wilmar | Swasta |
| | | Mengembangkan program kemitraan antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih c. BUMN perkebunan | Terlaksananya sosialisasi yang dilakukan dalam program kemitraan | | | | Dinas Perkebunan | Asosiasi penangkar benih; PPBPTI | Swasta |
| | | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih untuk memfasilitasi peningkatan komitmen produsen benih yang membesarkan benih siap salur untuk menjual benih bersertifikat | Jumlah Benih yang tersertifikasi | | | | Dinas Perkebunan; UPTD BPSBTP (Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan) | BPD PKS | BPD PKS; CSR |
| 8.2 | Pengembangan Perbenihan Perkebunan Sertifikasi STD8 (Surat Tanda Daftar Budidaya) | Pengembangan produksi pupuk organik masyarakat | Jumlah petani yang terlatih membuat/ memproduksi pupuk organik | | | | Kementan; Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota; Penyuluh Perkebunan | APBD; APBN |
| | | Peningkatan penggunaan pupuk organik | petani yang berkompeten mengolah dan menggunakan pupuk organik | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD; APBN |
| 8.3 | Sosialisai tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun rakyat/swadaya | Sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun rakyat/swadaya | Data jumlah pekebun yang menerima sosialisasi | | | | Dinas Perkebunan; UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan | | APBD; APBN |
| 8.4 | Melakukan pelatihan untuk masyarakat yang ingin memulai produksi benih | Melakukan pelatihan untuk masyarakat yang ingin memulai produksi benih | Data jumlah pekebun yang menerima pelatihan | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | Swasta |
| 8.5 | Bimbingan teknis mengenai benih, pupuk, dan pestisida | Bimbingan teknis mengenai benih, pupuk, dan pestisida | Data jumlah pekebun yang menerima bimbingan teknis | | | | Dinas Perkebunan; Perusahaan Produsen Benih, Pupuk, dan Pestisida | | APBD; APBN |
| 9. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik dan berkelanjutan | | | | | | | | | |
| 9.1 | Pelatihan peningkatan SDM perkebunan | Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang perkebunan kelapa sawit melalui pelatihan peningkatan SDM perkebunan | Jumlah SDM Perkebunan yang terlatih | | | | Dinas Perkebunan | BPD PKS | BPD PKS |
| | | Pelatihan GAP | | | | | Dinas Perkebunan | CSO; perguruan tinggi | APBD; APBN; CSR |
| | | Pelatihan kewirausahaan | | | | | Dinas Koperasi dan UKM | CSO; perguruan tinggi | |
| | | Pelatihan pembenihan untuk petani rakyat | | | | | Dinas Perkebunan; Ditjenbun; BPD PKS; | Swasta | |
| | | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan hasil pelatihan | Tersedianya SDM yang memonitoring dan evaluasi hasil pelatihan | | | | Dinas Perkebunan; Dinas Perindustrian | Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD; APBN |
| | | Pelatihan UPL | | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | CSO | APBD; APBN |
| | | Pelatihan Pengolahan produk kelapa sawit (salah satunya TBS) | | | | | Dinas Perkebunan; Dinas Perindustrian | DFMD; Swasta; CSO; BUMDes | APBD; APBN; CSR; Dana Desa |
| | | Pengolahan limbah sawit (menjadi kere, lampu, bioenergi, dll) | | | | | Dinas ESDM; Dinas Perindustrian; BUMD | Swasta; CSO; Perguruan tinggi | APBD; APBN; CSR |
| | | | | | | | Dinas Perindustrian | Dinas Perkebunan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Swasta; BUMDes; Kelompok Tani | APBD; APBN; CSR; Dana Desa |
| | | Bantuan peralatan pengolahan produk dan limbah kelapa sawit | | | | | Dinas Perkebunan; Dinas Perindustrian | Swasta; CSO | APBD; APBN; CSR |
| | | Pameran dan expo produk dan limbah sawit olahan masyarakat | | | | | Dinas Perdagangan | Swasta; CSO | APBD; APBN; CSR |
| 9.2 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani terkait GAP | Melakukan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani terkait pelatihan GAP baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan | | | | Dinas Perkebunan | CSO; perguruan tinggi | APBD; APBN; CSR |
| | | Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP | Tersedianya pedoman teknis pemantauan dan penerapan hasil pelatihan GAP | | | | Dinas Perkebunan | Swasta; CSO | APBD; APBN; CSR |
| 10. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan | | | | | | | | | |
| 10.1 | Peremajaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat | Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya | Luas lahan kelapa sawit rakyat yang dremajakan | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | Bank; Lembaga keuangan |
| | | Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat | | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | BPD PKS |
| | | Meningkatkan kelancaran dalam penyaluran dana PSR kepada pekebun | | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | BPD PKS |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------|------|------|---------------------------------------|--|-----------------|
| 10.2 | Pembinaan dan Pengawasan Peremajaan Kelapa Sawit | Evaluasi pemanfaatan dana Peremajaan sawit rakyat dalam pembiayaan kebun mitra | Jumlah petugas, petani dan perusahaan peserta peremajaan kelapa sawit yang terbina | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota; Dinas Koperasi dan UKM; BPDPKS; Dirjenbun; Asosiasi; Kemenkeu; Swasta | BPDPKS |
| 11. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Perkebunan | | | | | | | | | |
| 11.1 | Sosialisasi, Pembinaan, Pembentukan, dan Pengembangan Kelembagaan Perkebunan | Monitoring dan evaluasi penerapan sistem pembelian dan harga Tandani Buah Segar (TBS) kelapa sawit perkebunan | Jumlah petani pertemuan penyuluhan dan kelembagaan | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota; Dinas Koperasi dan UKM; KUD; asosiasi; universitas; Dinas Perdagangan | APBD; APBN |
| | | Pemantauan harga (terutama CPO) | | | | | Dinas Perdagangan | Dinas Perkebunan Kab/Kota; Dinas Koperasi dan UKM; KUD; asosiasi; universitas; Dinas Perdagangan | APBD; APBN |
| | | Operasi pasar | | | | | Dinas Perdagangan | Dinas Perkebunan Kab/Kota; Dinas Koperasi dan UKM; KUD; asosiasi; universitas; Dinas Perdagangan | APBD; APBN |
| | | Stabilisasi harga | | | | | Dinas Perdagangan | Dinas Perkebunan Kab/Kota; Dinas Koperasi dan UKM; KUD; asosiasi; universitas; Dinas Perdagangan | APBD; APBN |
| 11.2 | Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Perkebunan | | Jumlah perusahaan/ kebun yang terbina dan terawasi | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota; KUD; Perusahaan | APBD; APBN |
| 12. Program Penyuluhan pertanian | | | | | | | | | |
| 12.1 | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | Pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala | Terdapat database jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota; BKD; Universitas | APBD; APBN |
| | | Peningkatan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan | Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota; BKD; Universitas | APBD; APBN |
| 12.2 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit | Jumlah Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan yang Tersedia | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota; BKD; Universitas | APBD; APBN |
| | | Pembinaan dan pengawasan peremajaan kelapa sawit oleh penyuluh | Jumlah penyuluh yang mengawal peremajaan kelapa | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota; BKD; Universitas | APBD; APBN |
| Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
| No. | Kegiatan (Renstra OPD) | Sub Kegiatan | Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra) | 2021 | 2022 | 2023 | OPD Pelaksana | OPD/Mitra Kerja Pendukung | Pembiayaan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| C. Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan | | | | | | | | | |
| 13. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | |
| 13.1 | Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) | Menyusun regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) | Luas kawasan lindung; Tersusunnya regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) | | | | Dinas Kehutanan | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; BKSDA, Swasta; KPH | APBD; APBN |
| 13.2 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan | Tersedia data hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati | | | | Dinas Kehutanan | BKSDA | APBD; APBN |
| | | Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah kabupaten/kota | Terlaksananya sosialisasi KEE dan kawasan lindung | | | | Dinas Kehutanan | BKSDA, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan | APBD; APBN |
| | | Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | Jumlah forum kolaborasi yang dibentuk | | | | Dinas Kehutanan | BKSDA; Pemegang Izin | APBD; APBN |
| 13.3 | Inventarisasi Habitat (Homerange) Flora dan Fauna | Memerlukan kajian teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) serta Mengadakan monitoring evaluasi homerange flora fauna. | Tersedia data pengelolaan keanekaragaman hayati dari hasil monitoring dan evaluasi | | | | BKSDA | BPKH | APBD; APBN |
| 13.4 | Rehabilitasi dan Restorasi Ekosistem | Pembinaan dan pemantauan kegiatan rehabilitasi DAS dengan pelibatan pelaku usaha kelapa sawit | Lokasi pembinaan rehabilitasi DAS | | | | Dinas Kehutanan; BPDAS | SKK Migas; KPH; PT. PUSRI | APBD; APBN; CSR |
| | | Sosialisasi pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun | Terlaksananya sosialisasi dan implementasi terkait perlindungan dan pengelolaan | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan | BRGM; TRGD; Dinas Kehutanan; Dinas Perkebunan; BPBD | APBD; APBN |
| | | Pendampingan tim restorasi gambut | Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi | | | | BRGM | TRGD; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Perkebunan | APBD; APBN |
| 14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan | | | | | | | | | |
| 14.1 | Penyediaan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) | Penyaluran sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan PLTB | Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB), Jumlah pekebun/kelembagaan pekebun penerima sarana dan prasarana untuk penerapan PLTB | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan kab/kota; GAPKI; APKASINDO | APBD; APBN |
| | | Monitoring dan evaluasi efektivitas sarana dan prasarana dalam mencegah PLTB | Tersedianya data monitoring dan evaluasi dalam mencegah PLTB | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Kehutanan; GAPKI; APKASINDO | APBD; APBN |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|---|--------------------|
| | | Pendampingan tim restorasi gambut | Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi | | | | BRGM | TRGD; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; Dinas Perkebunan | APBD; APBN |
| 14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan | | | | | | | | | |
| 14.1 | Penyediaan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) | Penyaluran sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan PLTB | Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); jumlah pekebun/kelembagaan pekebun penerima sarana dan prasarana untuk penerapan PLTB | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan kab/kota; GAPKI; APKASINDO | APBD; APBN |
| | | Monitoring dan evaluasi efektivitas sarana dan prasarana dalam mencegah PLTB | Tersedianya data monitoring dan evaluasi dalam mencegah PLTB | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Kehutanan; GAPKI; APKASINDO | APBD; APBN |
| 14.2 | Pembinaan dan Antisipasi Kebakaran Lahan Perkebunan | Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun | Jumlah pelaku usaha yang di monitoring dan evaluasi | | | | Dinas Kehutanan | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; Dinas Perkebunan; BPBD; Swasta | APBD; APBN |
| | | Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terdapat di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun | Kelompok tani peduli api yang siaga dalam mencegah kebakaran lahan dan kebun | | | | Dinas Perkebunan; Dinas Kehutanan | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; Perusahaan | APBD; APBN |
| | | Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun | Terlaksananya monitoring pada wilayah titik api | | | | Dinas Kehutanan | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; Dinas Perkebunan; BPBD | APBD; APBN |
| | | Menyusun Peraturan terkait KTPA | Terbentuk peraturan untuk KTPA | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian | APBD; APBN |
| 14.3 | Penanggulangan Risiko Bencana Kebakaran | Pemetaan resiko rawan bencana kebakaran | Tersedianya peta resiko rawan bencana kebakaran | | | | BPBD | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; BMKG; Dinas Kehutanan | APBD; APBN |
| 15. Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor lahan | | | | | | | | | |
| 15.1 | Updating Data Emisi GRK melalui Sign Smart | Menghitung dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit | Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian | Bappeda; Dinas Kehutanan; Dinas Perkebunan | APBD; APBN |
| | | Menyusun basis data nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit | Tersedianya basis data nilai karbon dan emisi GRK kelapa sawit | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; Dinas Kehutanan | Bappeda; Dinas Perkebunan | APBD; APBN |
| 15.2 | Evaluasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan | Mengarusutamakan penurunan emisi di perkebunan ke rencana aksi mitigasi provinsi | Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; Dinas Kehutanan | BPBD; Dinas Perkebunan | APBD; APBN |
| | | Melaksanakan aksi mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit | Terlaksananya aksi mitigasi, pemantauan dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian | APBD; APBN |
| 15.3 | Sosialisasi terkait Perhitungan Emisi GRK | Melakukan sosialisasi perhitungan emisi GRK dengan target masyarakat dan perusahaan | Terlaksananya sosialisasi perhitungan emisi GRK untuk pekebun dan perusahaan | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; Dinas Kehutanan | Dinas Perkebunan | APBD; APBN |
| 15.4 | Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Perkebunan dalam Upaya Penurunan Dampak Emisi GRK | Melakukan sosialisasi dan kegiatan peningkatan kapasitas kepada pelaku usaha perkebunan | Jumlah pelaku usaha perkebunan yang telah diberikan pembinaan | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; Dinas Kehutanan | Dinas Perkebunan | APBD; APBN |
| 16. Program Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) | | | | | | | | | |
| 16.1 | Pelaporan dan Verifikasi Potensi Penurunan Emisi GRK di Perkebunan Kelapa Sawit | Melakukan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit | Tersedianya Jumlah pelaku usaha perkebunan yang melakukan MRV | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian | Dinas Perkebunan; BAPPEDA; Dinas Kehutanan | APBD; APBN |
| 16.2 | Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pelatihan dan pembinaan penurunan emisi GRK | Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mengikuti kegiatan pelatihan dan pembinaan | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian | Dinas Perkebunan; BAPPEDA; Dinas Kehutanan | APBD; APBN |
| 17. Program Peningkatan pemanfaatan lahan kritis (dan terlarut) sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 17.1 | Identifikasi Lahan Kritis di Perkebunan Kelapa Sawit | Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan | Jumlah buku statistik perkebunan | | | | Dinas Perkebunan | BPS; Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD; APBN |
| | | Membangun data dasar pertanian dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit | Tersedianya data pertanian dan lahan kritis pada perkebunan kelapa sawit | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Kehutanan | APBD; APBN |
| | | Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis | Jumlah dokumen yang disusun | | | | Bappeda | Dinas Kehutanan; BPDAIS | APBD; APBN |
| | | Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan | Jumlah Dokumen Kluster Industri perkebunan | | | | Dinas Perkebunan | Akademi; Asosiasi pengusaha | APBD; APBN |
| 17.2 | Pemulihan lahan kritis | Membuat skema pemulihan lahan kritis sebelum dimanfaatkan untuk rencana pemulihan lahan kritis | Tersedia data pemulihan lahan kritis | | | | Dinas Kehutanan | Dinas Perkebunan; BPKH; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian | APBN; APBD |
| 18. Program Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit | | | | | | | | | |
| 18.1 | Pembinaan AMDAL Perkebunan | Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan | Jumlah peserta workshop | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian | Dinas Perkebunan | APBD; APBN |
| 18.2 | Mengembangkan strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri; nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah | Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam pemanfaatan kelapa sawit dan nira kelapa sawit | Jumlah MOU business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit, terbentuknya jumlah UMKM yang mengelola nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah | | | | Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota | Dinas Perindustrian; Dinas Perdagangan; Dinas Koperasi dan UKM; BUMDes; APKASINDO | Swasta |
| 18.3 | Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan | | Jumlah perkebunan yang telah melakukan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan | | | | Dinas Perkebunan; Dinas Peternakan | Dinas Perkebunan Kab/Kota; Dinas Peternakan Kab/Kota | APBN; APBD; Swasta |
| 19. Program Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit sebagai Sumber Energi Terbarukan | | | | | | | | | |
| 19.1 | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan/PZHP | Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai energy terbarukan | Tersedianya data jumlah PKS yang melakukan pemantauan dan evaluasi Palm Oil Mill Effluent (POME) | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | GAPKI; Dinas Perkebunan | APBD; APBN |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|------|------|---|---|------------|
| 19. Program Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit sebagai Sumber Energi Terbarukan | | | | | | | | | |
| 19.1 | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan/P2HIP | Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai energy terbarukan | Tersedianya data jumlah PKS yang melakukan pemantauan dan evaluasi Palm Oil Mill Effluent (POME) | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | GAPKI; Dinas Perkebunan | APBD; APBN |
| Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
| No. | Kegiatan (Renstra OPD) | Sub Kegiatan | Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra) | 2021 | 2022 | 2023 | OPD Pelaksana | OPD/Mitra Kerja Pendukung | Pembiayaan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| D. Komponen Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa | | | | | | | | | |
| 20. Program Pengelolaan Izin Lokasi dan HGU untuk kebun kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 20.1 | Evaluasi izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota | Koordinasi dan sinkronisasi izin lokasi | Jumlah izin lokasi yang dievaluasi | | | | DPMPSTSP | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; ATR BPN; DPUBMTR | APBD |
| 20.2 | Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan penataan ruang | Pengawasan HGU perusahaan | Tersedianya data HGU, Jumlah HGU yang dievaluasi | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan | DPUBMTR; ATR BPN | APBD; APBN |
| 20.3 | Penerbitan STD-B kelapa sawit | Pembinaan dan fasilitasi penerbitan STDB | Jumlah kebun kelapa sawit rakyat yang mendapatkan STD-B | | | | Dinas Perkebunan | DPMPSTSP Kab/Kota; Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD; APBN |
| 21. Program percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat | | | | | | | | | |
| 21.1 | Penyusunan kebijakan fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit swadaya oleh perusahaan | Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit swadaya | Penerbitan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit swadaya oleh perusahaan | | | | Dinas Perkebunan | GAPKI, MAKSI, APKASINDO | APBD; APBN |
| | | Menyusun panduan teknis kebun kelapa sawit swadaya | Tersedianya data panduan teknis kelapa sawit swadaya | | | | Dinas Perkebunan | GAPKI, MAKSI, APKASINDO | APBD; APBN |
| | | Melakukan konsultasi publik mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit swadaya oleh perusahaan | Terlaksananya konsultasi publik dan tersedianya peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit | | | | Dinas Perkebunan | GAPKI, MAKSI, APKASINDO | APBD; APBN |
| 21.2 | Sosialisasi atau penyadartahuan petani kelapa sawit swadaya | Melakukan sosialisasi kepada petani kelapa sawit swadaya | Tersedianya jumlah sosialisasi kepada petani kelapa sawit swadaya | | | | Dinas Perkebunan | GAPKI, MAKSI, APKASINDO | APBD; APBN |
| 21.3 | Pembentukan kelompok usaha masyarakat kelapa sawit swadaya | | Tersedianya jumlah kelompok usaha masyarakat kelapa sawit swadaya | | | | Dinas Perkebunan | GAPKI, MAKSI, APKASINDO | APBD; APBN |
| 21.4 | Pengawasan dan pembinaan PSR | Monitoring program PSR | Jumlah kelembagaan yang sudah mendapatkan pembinaan PSR | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD |
| 21.5 | Pemantauan dan evaluasi perusahaan dalam memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit swadaya dan masyarakat yang berkelanjutan | | Luas realisasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat yang berkelanjutan, Jumlah perusahaan | | | | Dinas Perkebunan | Swasta | APBD; APBN |
| 22. Program Penyelesaian Sengketa Kebun Kelapa Sawit | | | | | | | | | |
| 22.1 | Pembentukan tim penyelesaian sengketa | Pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain | Jumlah pelatihan mediasi | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Perkebunan | ATR BPN, Biro Hukum | APBD; APBN |
| | | Mediasi penanganan sengketa lahan | Jumlah mediasi sengketa yang terlaksana | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan | ATR BPN | APBD; APBN |
| 22.2 | Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan perkebunan rakyat lintas daerah kabupaten dalam satu provinsi | Fasilitasi reforma agraria melalui penataan aset dan penataan akses | Jumlah konflik yang difasilitasi | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Perkebunan | ATR BPN, Biro Hukum | APBD; APBN |
| | | Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan | Terlaksananya pengawasan penanganan sengketa lahan | | | | Tim Fasete Provinsi Sumatera Selatan (ATR BPN, DLUP, Disut, Disub, Biro Hukum, Kejaksaan) | | APBD; APBN |
| 23. Program Pengelolaan Hutan | | | | | | | | | |
| 23.1 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi | Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi | Penerimaan sub sektor kehutanan | | | | Dinas Kehutanan | | APBD; APBN |
| | | Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi | | | | | Dinas Kehutanan | | APBD; APBN |
| 23.2 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kawasan Provinsi | Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi | | | | Dinas Kehutanan | KPH Setempat | APBD; APBN |
| | | Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan | Tersedianya data penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan | | | | Dinas Kehutanan | Dinas Perkebunan; KPH Setempat, BPKH, Perusahaan; GAPKI | APBD; APBN |
| | | Menyelesaikan keterlambatan kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman | Tersedianya data penyelesaian keterlambatan kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman | | | | Dinas Kehutanan | Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota; KUD | APBD; APBN |
| | | Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang Terindikasi dalam kawasan hutan | Tersedianya data lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan | | | | Dinas Kehutanan | Dinas Perkebunan | APBD; APBN |
| | | Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan | Jumlah izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan yang diterbitkan | | | | Dinas Kehutanan | Pokja PS (perhutanan Sosial); Dinas Perkebunan | APBD; APBN |
| 23.3 | Penanaman tanaman MPTS (Multy Purpose Tree Species) di kebun kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan | | Jumlah areal didalam kawasan hutan yang telah di tanami MPTS (Multy Purpose Tree Species) | | | | Dinas Kehutanan | Dinas Perkebunan | APBD; APBN |

| 24. Program Penyelesaian Status Lahan Usaha Perkebunan yang Terindikasi di Ekosistem Gambut | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|------|------|-------------------------------------|--|--|
| 24.1 | Pembuatan peta kelapa sawit di ekosistem gambut | | Tersedianya peta kelapa sawit di ekosistem gambut | | | | Dinas Perkebunan | CSO | APBD; APBN |
| 24.2 | Evaluasi kebun yang ada di ekosistem gambut | | Tersedianya dokumen kajian tentang evaluasi kebun di ekosistem gambut | | | | Dinas Perkebunan | BRGM; TRGD; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan | APBD; APBN |
| 24.3 | Sosialisasi regulasi untuk kebun kelapa sawit di ekosistem gambut | | Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi | | | | Dinas Perkebunan | BRGM; TRGD; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan | APBD; APBN |
| 25. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA | | | | | | | | | |
| 25.1 | Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA | Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Jumlah kelembagaan MHA yang didampingi | | | | Dinas Kehutanan | CSO; KPH | APBD; APBN; CSO |
| | | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA | Jumlah kelembagaan MHA yang didampingi | | | | Dinas Kehutanan | CSO; KPH | APBD; APBN; CSO |
| | | Fasilitasi MHA dalam penyelesaian sengketa dengan pihak lain | Jumlah sengketa MHA dengan pihak lain yang difasilitasi | | | | Dinas Kehutanan | CSO; KPH | APBD; APBN; CSO |
| 25.2 | Sosialisasi regulasi MHA | | Jumlah kelompok MHA yang mendapatkan sosialisasi | | | | Dinas Kehutanan | CSO; KPH; Bappeda | APBD; APBN; CSO |
| 25.3 | Inventarisasi MHA | | Tersedia data masyarakat hutan adat (MHA) | | | | Dinas Pariwisata | Dinas Kehutanan; KPH; CSO; Swasta; Perguruan Tinggi; Pemkab/Pemkot; Dinas terkait di tingkat kab/kota; MHA | APBD; APBN; CSO; CSR |
| 25.4 | Pengelolaan ekowisata di area MHA | | Data potensi ekowisata di area MHA | | | | Dinas Pariwisata | Dinas Kehutanan | APBD; APBN |
| 26. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | | | | | | | | | |
| 26.1 | Sosialisasi perlindungan tenaga kerja di sektor perkebunan kelapa sawit | Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi | | | | Disnakertrans; Dinas Perkebunan | Swasta | APBD; APBN; |
| | | Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit | | | | | Disnakertrans; Dinas Perkebunan | Swasta | APBD; APBN |
| 26.2 | Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit | Pembinaan K3 | Perusahaan yang Sistem K3 dan jaminan sosial | | | | Disnakertrans | Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota; Swasta | APBD; APBN |
| | | Pemeriksaan Penerapan Sistem Manajemen Keselatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan isu-isu ketenagakerjaan sektor perkebunan kelapa sawit | Persentase Perusahaan yang sudah menerapkan K3 secara konsisten | | | | Disnakertrans | Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota; Swasta | APBD; APBN |
| | | Penanganan pengaduan kasus ketenagakerjaan | Jumlah kasus yang diselesaikan | | | | Disnakertrans | | APBD; APBN |
| | | Penyidikan tindak pidana pelanggaran hukum ketenagakerjaan | Jumlah Kasus yang sampai pada tahap penyidikan | | | | Disnakertrans | | APBD; APBN |
| | | Pengujian kesehatan tenaga kerja di perusahaan | Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pengujian kesehatan di Perusahaan | | | | Disnakertrans | Swasta | APBD; APBN; CSR |
| | | Pengujian lingkungan kerja | Jumlah Perusahaan yang di uji lingkungan kerjanya | | | | Disnakertrans | | APBD; APBN |
| | | Pemeriksaan norma ketenagakerjaan | Jumlah perusahaan yang diperiksa norma ketenagakerjaan | | | | Disnakertrans | | APBD; APBN |
| 26.3 | Pendataan tenaga buruh harian/borongan | | Jumlah buruh harian/borongan di setiap perusahaan | | | | Disnakertrans | | APBD; APBN |
| Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
| No. | Kegiatan (Renstra OPD) | Sub Kegiatan | Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra) | 2021 | 2022 | 2023 | OPD Pelaksana | OPD/Mitra Kerja Pendukung | Pembiayaan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| E. Komponen Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit | | | | | | | | | |
| 27. Program pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan daerah | | | | | | | | | |
| 27.1 | Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi ISPO | Menyusun peta jalan strategi komunikasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | Jumlah kegiatan sosialisasi yang terlaksana | | | | Dinas Perkebunan | LS (Lembaga Sertifikasi); GAPKI; APIKASINDO | LS (Lembaga Sertifikasi); Swasta; APBD; BPDPKS |
| | | Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO | | | | | Dinas Perkebunan | LS (Lembaga Sertifikasi); GAPKI; APIKASINDO | LS (Lembaga Sertifikasi); Swasta; APBD; BPDPKS |
| 27.2 | Evaluasi materi sosialisasi untuk percepatan proses sertifikasi ISPO | Melakukan gap analysis untuk melihat kesesuaian antara standard ISPO yang sudah ada dengan realita implementasinya | Materi sosialisasi untuk percepatan sertifikasi ISPO yang telah dievaluasi | | | | Dinas Perkebunan | LS (Lembaga Sertifikasi); GAPKI; APIKASINDO | LS (Lembaga Sertifikasi); Swasta; APBD; BPDPKS |
| | | Memperkuat proses koleksi data perbandingan hasil perkebunan sawit yang memiliki sertifikasi ISPO sebagai data baseline | | | | | Dinas Perkebunan | LS (Lembaga Sertifikasi); GAPKI; APIKASINDO | LS (Lembaga Sertifikasi); Swasta; APBD; BPDPKS |
| 28. Program pendampingan terhadap ISPO | | | | | | | | | |
| 28.1 | Pengembangan Penerapan Penyuluhan dan Pendampingan Sertifikasi ISPO | Melakukan pendampingan/ penyuluhan bagi pekebun untuk pemenuhan sertifikasi ISPO | Jumlah kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang terlaksana | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota; Lembaga Sertifikasi | APBD; APBN; BPDPKS |
| | | Menyusun Panduan Kemitraan antara Perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikasi ISPO | | | | | Dinas Perkebunan | GAPKI; APIKASINDO; Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD; APBN; BPDPKS |
| 28.2 | Peningkatan Kapasitas Penyuluh | Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas untuk penyuluh | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD; APBN |
| | | Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di kabupaten/kota | | | | | Dinas Perkebunan; Dinas Perdagangan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD; APBN |
| | | Membentuk tim kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO | | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota; GAPKI; APIKASINDO; LS | APBD; APBN; Swasta |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|---|--------------------|
| 28.3 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani/Pekebun | Pembentukan dan penguatan kelembagaan koperasi petani/pekebun | Jumlah kelembagaan ekonomi pertanian berbasis kawasan yang berkembang kapasitasnya | | | | Dinas Perkebunan | BPDBPK | BPDBPK |
| | | Penguatan kelembagaan dan kemitraan antara pekebun dengan BUMDes untuk dukungan pembiayaan proses sertifikasi ISPO | | | | | Dinas Perkebunan | Perbankan, Dinas Koperasi, KUD, GAPKI, DPMD | APBD; APBN |
| 28.4 | Pengawasan dan Pengujian mutu CPO dalam rangka Memenuhi Standar Ekspor | Melakukan pemantauan dalam pengujian mutu CPO | Volume sawit yang diuji | | | | Dinas Perindustrian | Dinas Perkebunan; GAPKI | APBD; APBN |
| 28.5 | Pengawasan Mutu Barang Ekspor sesuai SNI; Verifikasi Mutu Produk | Pengawasan mutu hasil perkebunan kelapa sawit rakyat | Volume produk hasil sawit yang diuji | | | | Dinas Perdagangan | Dinas Perkebunan | APBD; Swasta; APBN |
| 28.6 | Promosi Produk | Promosi dan pemasaran hasil perkebunan sawit dengan sertifikasi ISPO | Jumlah terlaksananya kegiatan promosi produk ISPO dalam dan luar negeri | | | | Dinas Perkebunan; Dinas Perdagangan | BPDPKS, GAPKI | APBN; APBD |
| | | Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan sawit rakyat | | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perindustrian | APBN; APBD |
| 28.7 | Sosialisasi STDB kepada petani | | Jumlah kelembagaan petani yang sudah mendapatkan sosialisasi | | | | Dinas Perkebunan | | APBN; APBD |
| 28.8 | Perbaharuan Data Lokasi (koordinat) Pabrik Pengolahan PKS | | Jumlah pabrik pengolahan (PKS) yang memiliki data titik koordinat | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD; APBN |

Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan

| No | Kegiatan (Rencana OPD) | Sub Kegiatan | Indikator Keluaran | Laporan Pelaksanaan | | Rencana Selanjutnya | OPD Pelaksana | OPD/Mitra Kerja Pendukung | Pembiayaan |
|---|--|--|---|--|---|---|---------------------------------------|--|------------|
| | | | | Kegiatan yang Dilaksanakan | Hasil | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Komponen Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur | | | | | | | | | |
| 1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor (Perkebunan Kelapa Sawit) | | | | | | | | | |
| 1.1 | Penyusunan Data Statistik Perkebunan | Melakukan pendataan komoditi perkebunan yang diperoleh secara berkala | Jumlah buku statistik perkebunan | Penyusunan data statistik perkebunan tahun 2021 dan angka sementara 2022 melalui koordinasi dan sinkronisasi data kab/kota. | Buku statistik perkebunan 2021 | Konolidasi dengan Kabupaten tentang data statistik perkebunan 2022 | Dinas Perkebunan; BPS Provinsi Sumsel | BPS Kab/ Kota | APBD; APBN |
| | | Neraca data penanaman lahan | Tersedianya data terkait penanaman lahan | | | | ATR BPN | | APBN |
| | | Pendataan komposisi harga penetapan TBS | Tersedianya data harga TBS | Sudah dilakukan rapat penetapan harga TBS setiap 2 minggu sekali secara rutin. | Surat penetapan harga TBS | Pelaksanaan rapat penetapan harga TBS rutin setiap 2 minggu sekali. | Dinas Perkebunan | Perusahaan | APBD; APBN |
| 1.2 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Diupload | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Diupload | Pengiriman data dilakukan oleh operator desa yang sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan. | Pwa tembak di setiap desa | Mencapai pendataan 100 persen Desa Cantik | BPS Provinsi Sumsel | Pemerintah Desa | APBD; APBN |
| 1.3 | Program penyediaan data dan pelayanan informasi statistik | DESA CANTIK (Desa Cita Statistik) | Jumlah desa cantik (Desa Cita Statistik) | Kegiatan yang sudah dilakukan adalah publikasi melalui sosialisasi dan pemanfaatan media. | Tertelaksananya sosialisasi di tingkat provinsi dan kabupaten | Melaksanakan sensus pertanian di tahun 2023 | BPS Provinsi Sumsel | BPS Kab/Kota | APBN |
| | | Sensus pertanian | Jumlah rumah tangga pertanian, perkebunan, dan perusahaan | Terdapat 2 macam survei dilatih dari waktu pelaksanaannya, yakni survei bulanan dan tahunan. Survei bulanan berfokus pada luas lahan dan produksi sawit. Survei tahunan mencakup hingga ke aspek struktur omgkn tenaga kerja dan keuangan. | Jumlah perusahaan menurut angka sementara dari BPS berkisar di angka 150 perusahaan swasta. Adapun untuk perusahaan milik negara didata langsung oleh BPS pusat. | Sosialisai aplikasi SEDAPP ke perusahaan pada tahun 2022 agar perusahaan dapat melakukan penginputan data secara mandiri. | BPS | BPS Kab/ Kota; Swasta | APBN |
| | | Survey perusahaan perkebunan | Jumlah luas areal hasil perkebunan | Pendataan perusahaan perkebunan dari data yang berasal dinas terkait maupun dari kunjungan lapangan (gro-logging dan wawancara). | Taliter perusahaan perkebunan yang diperbarui secara berkala setiap tahun. | Sosialisai hasil direksi ke perusahaan di Bulan November 2022. | BPS | BPS Kab/ Kota; Dinas Perkebunan; GAPKI | APBN |
| | | Pendataan dengan menggunakan Aplikasi Setaip (Sistem data perusahaan perkebunan) | Jumlah perusahaan yang mengisi sensus pada aplikasi SEDAP | Sosialisai sudah dilakukan secara daring. | Kabupaten Muhi Banyuasin menjadi kabupaten dengan perusahaan yang seluruhnya sudah mengisi sensus melalui aplikasi SEDAPP, disusul dengan Kab. Empat Lawang. | Penyempurnaan sistem aplikasi dengan mengatasi bug pada aplikasi. | BPS | Swasta; GAPKI; BPS Kab/Kota | APBN |
| | | Updating direktori perusahaan pertanian | Jumlah perusahaan pertanian | Sosialisai STDB sudah dilakukan di 3 kabupaten (Kabupaten Banyuasin, Muhi Banyuasin, dan OK). | Sudah ada pendataan STDB 1514 untuk 3 kabupaten (OK, Banyuasin, Muhi) di tahun 2022 | Pemajahan STDB di 3 Kabupaten (Kabupaten Banyuasin, Muhi Banyuasin, dan OK). | Dinas Perkebunan | BPS Kab/ Kota | APBN |
| 1.4 | Perbaharuan data lokasi (koordinat) pabrik pengolahan PKS | Updating data PKS | Jumlah pabrik pengolahan (PKS) yang memiliki data titik koordinat | Sudah dilakukan pendataan pabrik pengolahan PKS | Sudah ada lokasi 12 PKS yang terdata. | Dilakukan pendataan titik koordinat PKS. | Dinas Perkebunan | Perusahaan | APBD; APBN |
| 2. Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lupaun kebun kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 2.1 | Updating Data Komoditas Perkebunan dengan Metode GIS | Kompilasi dan pengintegrasian IGT Lupaun kebun sawit dari berbagai sektor terkait perkebunan kelapa sawit | Tersedianya peta komoditas perkebunan | Sudah dilakukan lumpang susun peta tematik kelapa sawit dengan basis peta citra satelit Diijerhun tahun 2019. | Peta lumpang susun kelapa sawit data 2019. | Perdetaan pemetaan terutama pada kebun sawit | Dinas Perkebunan | ATR BPN; Dinas Kehutanan; Sappoda | APBD; APBN |
| | | Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan | Tersedianya fasilitator dalam pemetaan partisipatif | Pelaksanaan pelatihan pemetaan tahun 2021. | Terdapat 2 orang yang mengikuti pelatihan di tahun 2021. | 1. Pelatihan pemetaan lanjutan untuk 1 orang 2. Pelatihan pemetaan untuk kab/kota | Dinas Perkebunan | Perusahaan Perkebunan; CSO | APBD; APBN |
| | | Pelatihan digital pemetaan komoditi | Tersedianya SOM pemetaan komoditi | Sudah dilakukan pelatihan dari Kementan dengan mengundang Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas Perkebunan Kab/Kota. | SOM yang dibagikan dalam pelatihan dari Dinas Perkebunan sejumlah 1 orang | Meningkatkan frekuensi pelatihan dan peserta yang terlatih | Dinas Perkebunan | ATR BPN; GAPKI; CSO | APBD; APBN |
| | | Inventarisasi data IUP | Tertinventarisasi data IUP lintas Kabupaten | Sudah dilakukan program pembinaan kemitraan usaha perkebunan. | 1. Inventarisasi data IUP lintas kabupaten untuk 14 unit usaha lintas kabupaten kelapa sawit 2. Terlaksananya pembinaan kemitraan usaha perkebunan untuk 14 unit usaha lintas kabupaten kelapa sawit | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD; APBN |
| | | Pemetaan kawasan perkebunan kelapa sawit | Tersedianya data pemetaan perkebunan kelapa sawit | Pemetaan dilakukan di Kab. Muhi Banyuasin. | Dinas Perkebunan kab/kota sudah ada yang melakukan pemetaan (Kab. Muhi Banyuasin di tahun 2019). | Updating data pemetaan perkebunan kelapa sawit | Dinas Perkebunan | Lapan | APBD; APBN |
| 2.2 | Monitoring dan evaluasi HDU | | Tersedianya data jumlah dan luasan NGU yang ada | | | | ATR BPN; Dinas Perkebunan | Dinas Lingkungan hidup dan Perikanan | APBD; APBN |
| 2.3 | Pengadaan software untuk mendukung jaringan informasi geospasial daerah | | Tersedianya software pendukung jaringan informasi geospasial daerah di bidang infrastruktur | | | | Sappoda | Lapan; BKG | APBD; APBN |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|---|--|---------------------------------|
| 3. Program sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya | | | | | | | | | |
| 3.1 | Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya | Tersedianya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran | Sudah dilakukan sosialisasi PSR, pengembangan SDM, STDH di tingkat kabupaten (melibatkan dinas kabupaten dan pengurus KUD). | Sudah terdapat perencanaan kegiatan sosialisasi. | 1. Kegiatan sosialisasi PSR 2. Pengembangan SDM 3. STDH di seluruh kabupaten dengan perkebunan sawit di Sumatera Selatan. | Dinas Perkebunan | BPS, GAPKI, APKASINDO | APBD, APBN |
| | | Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi | Tertakutnya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi | Sosialisasi STDH dilakukan di kabupaten/kota. Kabupaten/kota sudah memfasilitasikan ke pekebun dan KUD. | Laporan pelaksanaan sosialisasi STDH untuk kabupaten/kota, pekebun, serta KUD. | Sosialisasi di tingkat desa dengan melibatkan petani yang memiliki kebun sawit. | Dinas Perkebunan | BPS, GAPKI, APKASINDO | APBD, APBN |
| | | Sosialisasi keanggotaan KUD tentang PSR | Tersedianya data keanggotaan KUD | Sudah dilakukan kegiatan rutin sosialisasi keanggotaan KUD. | Data keanggotaan KUD. | 1. Pendirian KUD 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSR. | Dinas Perkebunan | ATR BPN, Dinas Kehutanan, BPOMKS | APBD, APBN |
| 4. Program peningkatan sinergi antar organisasi perangkat daerah berkaitan dengan usaha perkebunan kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 4.1 | Harmonisasi kebijakan pengelolaan kelapa sawit | Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala | Tersedianya kebijakan yang sudah sinkronisasi | 1. Sudah dilakukan rapat koordinasi dengan rencana replanting termasuk penyiaran replanting. 2. Dinas Perkebunan sudah terlibat di kegiatan terkait itu pembangunan berkelanjutan 3. Dinas Perkebunan juga terlibat dalam kegiatan mitigasi emisi GRK 4. Dinas Perkebunan juga dilibatkan dalam pembahasan bankir lahan dan tanah terlantar 5. Diskusi tentang Jeli net soil juga melibatkan Dinas Perkebunan | 1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan yang sudah terdapat di Dinas Perkebunan Kab/Kota dengan melibatkan GAPKI terkait kebijakan usaha perkebunan sawit berkelanjutan. 2. Melakukan inventarisasi kegiatan untuk berkontribusi terhadap capaian target Joli net soil Indonesia. | Dinas Perkebunan | GAPKI, APKASINDO, MAKS, CSO, ASPEKPR | APBD, APBN | |
| 4.2 | Validasi data perkebunan | Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing OPD | Tersedianya informasi data yang sinkronisasi untuk masing-masing lembaga | 1. Sudah melakukan inventarisasi terkait data perkebunan dalam penyusunan dokumen RAD-KSB 2. Sudah ada tenaga pemulih untuk mendata perkebunan di tingkat lapak. | Data khs perkebunan, jumlah pekebun, db, sebagaimana teruang dalam dokumen RAD-KSB. | 1. Publikasi materi data dalam sinkronisasi data perkebunan 2. Pembentukan forum sinkronisasi data | Dinas Perkebunan, Dinas Perkebunan Kab/Kota | GAPKI, APKASINDO, MAKS, CSO, ASPEKPR | APBD, APBN |
| 5. Program Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota penghasil kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 5.1 | Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | Mem bentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota penghasil kelapa sawit | Terbentuknya forum multipihak kelapa sawit berkelanjutan | Sudah terbentuk SK tim pelaksana untuk implementasi dokumen RAD-KSB. | Penguk SK Tim Pelaksana Daerah RAD KSB. | Revisi Penguk untuk SK tim pelaksana dengan memperhatikan keterlibatan semua pihak terkait. | Dinas Perkebunan | Lintas OPD, swasta, mitra pembangunan dan masyarakat | APBD, APBN |
| 6. Program Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung fasilitas usaha perkebunan kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 6.1 | Pembangunan jalan produksi perkebunan | Terbentuknya jalan usaha tani terutama pada produksi perkebunan | Panjang jalan produksi | | | 1. Alokasi dana desa untuk pembangunan jalan usaha tani kebun swadaya. 2. Pembangunan jalan produksi dengan dana sarpras dari BPDPKS. | Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian | DPUBMTR, BPDPKS | APBD, APBN, BPDPKS, ADD, BPDPKS |
| | | Terbentuknya jalan produksi dalam wilayah konsesi perkebunan | Panjang jalan produksi | | Selap kebun korporasi memiliki mesin road dan collection road | | Swasta (perusahaan) | Dinas Perkebunan, Dinas Perkebunan Kab/Kota | CSR, APBD, APBN |
| 7. Program kolaborasi dengan pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan | | | | | | | | | |
| 7.1 | Pembinaan Kemitraan Usaha Perkebunan, Kegiatan PSR | Mem bentuk kelompok kerja antar instansi di dalam upaya kepatuhan hukum dalam kegiatan PSR | Jumlah koperasi/kelompok yang melaksanakan kemitraan | | | Mem bentuk Pokja PSR. | Dinas Perkebunan | DPUBMTR, BPDPKS | APBD, APBN |
| | | Mem berikan bantuan replanting kepada petani | Jumlah kelompok tani/petani yang mendapatkan bantuan | Sudah terdapat penyusunan bantuan melalui program PSR | Terdapat laporan kemajuan replanting yang disampaikan setiap 2 minggu sekali. Kelompok tani dan KUD penerima PSR sejumlah 134 | Updating data kelompok tani/KUD penerima program PSR. Peningkatan target kelompok tani/KUD penerima program CSR | BPDPKS | Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD, APBN |
| | | Investasi dan sosialisasi dengan mitra/perusahaan kelapa sawit | Jumlah pertemuan yang terlaksana | | Sudah dibuat Surat Rekomendasi ke kabupaten. | Koordinasi dengan dinas kabupaten untuk melakukan sosialisasi dengan perusahaan. | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD, APBN |
| 8. Komponen Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun | | | | | | | | | |
| 8. Program peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam mengelola sarana produksi | | | | | | | | | |
| 8.1 | Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peralatan Sarana Produksi | Tertakutnya pengawasan mutu, Penyediaan dan Peralatan Benih/bibit perkebunan | Sudah dilakukan pengawasan dari UPT perbenihan. | 1. Kegiatan sosialisasi baik dari pengawasan maupun sertifikasi. 2. Sistem monitoring dan evaluasi pengawasan mutu benih. | Melanjutkan kegiatan pengawasan mutu, penyediaan, dan peralatan benih dengan melibatkan UPTD BPTP (pengendalian hama penyakit) dan BPSTPT (pengawasan benih) | Dinas Perkebunan, UPTD Protokol Tanaman Perkebunan, Dinas Perindustrian | UPTD Benih, Asosiasi penangkar benih; PBS (Sampurna, PKS Medan, dll) | Swasta |
| | | Sosialisasi program kemitraan antara: » produsen benih yang memiliki kebun sumber benih » produsen benih yang membesarkan benih » BUMK perkebunan | Tertakutnya sosialisasi yang dilakukan dalam program kemitraan | Sudah dilakukan sosialisasi terkait pengawasan dan sertifikasi ke perusahaan dan petani swadaya dengan melibatkan Perusahaan Sampoerna Agro dan Wilmar | 1. Masyarakat dapat mengakses benih yang tersertifikasi melalui bidang produksi 2. Rekomendasi dari dinas untuk akses benih 3. Data keikutsertaan dan kemitraan benih | Koordinasi dengan perusahaan untuk melaksanakan sosialisasi secara berkala | Dinas Perkebunan | Asosiasi penangkar benih; PPBPTI, Sampoerna Agro, Wilmar | Swasta |
| | | Mem berikan program kemitraan antara: » produsen benih yang memiliki kebun sumber benih » produsen benih yang membesarkan benih » BUMN perkebunan | Tertakutnya sosialisasi yang dilakukan dalam program kemitraan | | | Kemitraan dengan perusahaan untuk membentuk tim pengawas dalam memantau penggunaan benih bersertifikasi oleh petani swadaya | Dinas Perkebunan | Asosiasi penangkar benih; PPBPTI | Swasta |
| | | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih untuk memfasilitasi peningkatan komitmen produsen benih yang membesarkan benih, siap satu untuk menjual benih bersertifikasi | Jumlah benih yang tersertifikasi | Sudah diberikan portolan bagi produsen benih yang bersertifikasi. | Daftar portolan yang dikeluarkan dan daftar penangkar resmi. | 1. Melibatkan penangkar, perusahaan, dan Dinas Perkebunan untuk bekerja sama memfasilitasi produsen benih siap satu. 2. Meningkatkan sosialisasi kepada petani swadaya tentang penangkar benih bersertifikasi. 3. Peningkatan kapasitas penangkar benih bersertifikasi. | Dinas Perkebunan, UPTD BPSTPT (Bidat Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan) | BPDPKS | BPDPKS, CSR |
| 8.2 | Pengembangan Perbenihan Perkebunan Sertifikasi STDH (Surat Tanda Daftar Budidaya) | Pengembangan produk pupuk organik masyarakat | Jumlah petani yang terlatih membuat/ memproduksi pupuk organik | Sudah dilakukan pengembangan pupuk organik melalui program Desa Organik, sementara kegiatan masih berfokus di Pagaram. Selain itu, sudah dilakukan pelatihan melalui program PLTB di Musi Banyuasin. | Belum ada data jumlah petani yang terlatih membuat pupuk organik. | Memarah kabupaten/kota penerima program Desa Organik, program PLTB, dan program lainnya terkait produksi pupuk organik. | Kementerian, Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota, Penyuluh Perkebunan | APBD, APBN |
| | | Peningkatan penggunaan pupuk organik | Petani yang berkecapien mengelola dan menggunakan pupuk organik | Sudah dilakukan Evaluasi dan pendampingan dari penyuluh | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD, APBN |
| 8.3 | Sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikasi bagi pekebun rakyat/swadaya | Sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikasi bagi pekebun rakyat/swadaya | Data jumlah pekebun yang menerima sosialisasi | Sudah dilakukan sosialisasi penggunaan benih bersertifikasi | Pencanan dan daftar penangkar resmi | Meningkatkan sosialisasi kepada petani swadaya tentang penangkar benih | Dinas Perkebunan, UPTD Protokol Tanaman Perkebunan | | APBD, APBN |
| 8.4 | Melakukan pelatihan untuk masyarakat yang ingin memulai produksi benih | Melakukan pelatihan untuk masyarakat yang ingin memulai produksi benih | Data jumlah pekebun yang menerima pelatihan | Sudah dilakukan sosialisasi ke penangkar benih | | Melakukan pelatihan untuk penangkar benih dengan melibatkan perusahaan | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | Swasta |
| 8.5 | Bimbingan teknis mengenai benih, pupuk, dan pestisida | Bimbingan teknis mengenai benih, pupuk, dan pestisida | Data jumlah pekebun yang menerima bimbingan teknis | Sudah dilakukan pendampingan secara berkala untuk peningkatan kapasitas produksi | 200 tenaga honorer yang diber ke kabupaten untuk pendampingan peningkatan produk | Peningkatan kapasitas penyuluh terutama dalam praktik GAP dan penggunaan teknologi baru | Dinas Perkebunan, Perusahaan Produsen Benih, Pupuk, dan Pestisida | | APBD, APBN |

| 9. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas petebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik dan berkelanjutan | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|----------------------------|
| 9.1 | Pelatihan peningkatan SDM perkebunan | Pembelajaran sertifikasi kompetensi di bidang perkebunan kelapa sawit | Jumlah SDM Perkebunan yang terlatih | Dilaksanakan penguatan kapasitas SDM (KUD dan kelompok tani) kelapa sawit dengan Dinas Peternakan | Peningkatan kompetensi sertifikasi petani, kelompok tani, dan KUD | Kegiatan peningkatan kapasitas petebun di tahun berikutnya | Dinas Perkebunan | BPDPS, Disnaker | BPDPS |
| | | Pelatihan kewirausahaan | | | | | Dinas Koperasi dan UKM | CSO, perguruan tinggi | |
| | | Pelatihan pembibitan untuk petani rakyat | | | | | Dinas Perkebunan, Disnaker, BPDPS | Desa | |
| | | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan hasil pelatihan | Tersedianya SDM yang memonitoring dan evaluasi hasil pelatihan | Pemantauan dilakukan pada petani perakar yang sedang melakukan sertifikasi | Data ketersediaan benih yang didapatkan dari perakar | 1. Pemantauan dan inventarisasi ketersediaan benih tersertifikasi 2. Meningkatkan frekuensi pemantauan | Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian | Dinas Perkebunan Kab/Kota, UPTD Besh | APBD, APBN |
| | | Pelatihan UPL | | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | CSO | APBD, APBN |
| | | Pelatihan pengolahan produk kelapa sawit | | 1. Pengawasan pabrik PKS 2. Pelatihan kelas perusahaan 3. Sudah pernah dilakukan pelatihan untuk pengolahan kelapa sawit menjadi sabun | Sudah pernah ditawarkan dalam momen penyelenggaraan Asian Games di Palembang, dan ditawarkan ke hotel-hotel di Palembang, namun masih kalah saing dengan produk sabun lainnya | Melakukan pelatihan untuk pengolahan produk turunan kelapa sawit menjadi sabun sekaligus pendampingan dalam pemasaran | Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian | DPMK, Swasta, CSO, BUMDes | APBD, APBN, CSR, Dana Desa |
| | | Pengolahan limbah sawit (menjadi kayu, lampu, bioenergi, dll) | | Pengolahan limbah kelapa sawit menjadi biodiesel sudah pernah dilakukan di Hulu Banyuwangi | Belum ada tindak lanjut | Belum ada tindak lanjut | Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, BUMD | Swasta, CSO, Perguruan tinggi | APBD, APBN, CSR |
| | | | | Pelatihan industri pengolahan limbah pelepah kelapa sawit menjadi sirai. Pelatihan diberikan ke kelompok tani | Pelatihan baru dilakukan di Kabupaten OKI. Memberikan ruang keterlibatan bagi perkebunan dalam pengolahan limbah kelapa sawit | Mengaktifkan peran BUMDes dalam pemasaran. Meningkatkan kolaborasi bersama DPMK terkait peningkatan kapasitas BUMDes. Memaksimalkan peran pendamping desa dalam pelatihan | Dinas Perindustrian | Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Dinas Swasta, CSO, BUMDes, Kelompok Tani | APBD, APBN, CSR, Dana Desa |
| | | Bantuan peralatan pengolahan produk dan limbah kelapa sawit | | Sudah dilakukan pemberian bantuan peralatan pengolahan limbah kelapa sawit berupa mesin untuk mengolah pelepah sawit menjadi lidi sebagai bahan baku tana | Pemberian bantuan mesin baru diberikan ke kelompok tani di Kabupaten OKI. Pemberian bantuan dapat diajukan melalui proposal | Memaksimalkan peran pihak ketiga (swasta dan CSO) dalam pemberian bantuan peralatan pengolahan produk dan limbah kelapa sawit | Dinas Perindustrian | Swasta, CSO, Dinas Perkebunan | APBD, APBN, CSR |
| | | Pameran dan expo produk dan limbah sawit di dalam masyarakat | | Tahun ini akan melakukan kegiatan pameran dan expo yang akan dilaksanakan pada 3-6 November 2022 | Meningkatkan perdagangan di skala ekspor. Memamerkan produk-produk yang memiliki potensi ekspor di Sumak. Meningkatkan pendapatan masyarakat | Melaksanakan kegiatan pameran dan expo sebagai agenda rutin setiap tahun | Dinas Perdagangan | Swasta, CSO, Bca.co.id, Dinas Koperasi dan UKM, Balai Karantina Pertanian, Pengusaha (eksportir dan importir) | APBD, APBN |
| 9.2 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani terkait GAP | Melakukan pelatihan GAP baik oleh pemerintah, maupun lembaga para pihak secara periodik | Jumlah kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan | Pelatihan praktik budidaya yang baik untuk petani swadaya di Kabupaten OKI melibatkan penyuluh perkebunan | Tertindakannya pelatihan GAP di OKI | 1. Menyusun SOP untuk penerapan GAP 2. Penguatan kapasitas tenaga pendamping peningkatan produksi perkebunan (TPK) | Dinas Perkebunan | CSO, perguruan tinggi | APBD, APBN, CSR |
| | | Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP | Tersedianya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP | | | Penyusunan pedoman penilaian untuk petani swadaya | Dinas Perkebunan | Swasta, CSO | APBD, APBN, CSR |
| 10. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan | | | | | | | | | |
| 10.1 | Peningkatan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat | Meningkatkan sosialisasi above pondasi dan perbaikan/ lembaga terapan lainnya | Luas lahan kelapa sawit rakyat yang dremajakan | Sosialisasi program PSR | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | Bank, lembaga keuangan |
| | | Meningkatkan kemampuan petebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat | | Sosialisasi program PSR | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | BPDPS |
| | | Meningkatkan ketahanan dalam penyuluran dana PSR kepada petebun | | Pendampingan petebun dalam penyuluran dana PSR agar dapat memenuhi persyaratan | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | BPDPS |
| 10.2 | Pembinaan dan Pengawasan Peremajaan Kelapa Sawit | Evaluasi pemantauan data Peremajaan sawit rakyat dalam pembayasan kebun mitra | Jumlah petugas, petani dan perusahaan peserta peremajaan kelapa sawit yang terbina | Setiap 2 minggu sekali monitoring dari Kabupaten untuk realisasi PSR | | Menurunkan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota, Dinas Koperasi dan UKM, BPDPS, Disnaker, Disnaker, Kemendagri, Swasta | BPDPS |
| 11. Program Pembiayaan dan Pengembangan Ketenagabun Perkebunan | | | | | | | | | |
| 11.1 | Sosialisai, Pembinaan, Pembiayaan, dan Pengembangan Ketenagabun Perkebunan | Monitoring dan evaluasi penerapan sistem pembiayaan dan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit perkebunan | Jumlah petani pertemuan penyuluhan dan ketenagabun | Pemantauan terhadap harga TBS setiap 2 minggu sekali yang dilakukan oleh petugas lapangan | | Meningkatkan pengawasan untuk kapabun petani swadaya | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota, Dinas Koperasi dan UKM, Disnaker, Universitas, Dinas Perdagangan | APBD, APBN |
| | | Pemantauan harga (rata-rata CPO) | | Pemantauan harga melalui SIMIRAH (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) | Data fluktuasi harga CPO | Perlu dibentuk sistem informasi yang menunjukkan aliran logistik dari daerah ke pusat. Perlu menyatukan langkah preventif untuk menjaga stabilitas harga | Dinas Perindustrian | Dinas Perkebunan Kab/Kota, Dinas Perdagangan, asosiasi | APBD, APBN |
| | | Operasi pasar | | Melakukan pemantauan operasi pasar terhadap minyak. Dilakukan ketika harga minyak naik | 1. Mengendalikan harga agar tetap stabil 2. Mengkoordinir data yang bertujuan agar harga pasar tetap pada angka yang stabil | Mencari langkah yang lebih efisien dalam operasi pasar. Menyederhanakan proses pembelian dan tata kelola usaha | Dinas Perdagangan | Dinas Perkebunan Kab/Kota, Dinas Koperasi dan UKM, KUD, asosiasi, universitas, KACAN | APBD, APBN |
| | | Stabilitas harga | | Memeriksa alur distribusi barang | Menemukan penyebab terjadinya kenaikan atau penurunan harga barang yang berubah drastis | Mempertukuk koordinasi bersama petebun usaha | Dinas Perdagangan | Dinas Perkebunan Kab/Kota, Segan Ekonomi, Paktor, KUD, asosiasi, universitas | APBD, APBN |
| 11.2 | Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Perkebunan | | Jumlah perusahaan/ kebun yang terbina dan tarawasi | Kunjungan kepala perusahaan untuk melihat pelaksanaan (sudah sesuai SOP atau tidak), IUP, Sarpras. | Data hasil inspeksi setiap tahun | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota, BMD, Universitas | APBD, APBN |
| 12. Program Penyuluhan pertanian | | | | | | | | | |
| 12.1 | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | Pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swasta masyarakat, dan perusahaan secara berkala | Terdapat database jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan | Terdapat basis data penyuluh yang diperbarui tiap tahun/tap perekrutan yang dapat diakses secara terpadu | SK Penyuluh dari Kepala Dinas | Memperbarui data penyuluh | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota, BMD, Universitas | APBD, APBN |
| | | Peningkatan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan | Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan | Ada laporan data jumlah kegiatan pelatihan | | Melakukan pengujian pelatihan periode berikutnya | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota, BMD, Universitas | APBD, APBN |
| 12.2 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi petebun kelapa sawit | Jumlah Tenaga Pendamping Peningkatan Produkt Perkebunan yang Tersedia | Terdapat 240 TPK yang sudah direkrut | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota, BMD, Universitas | APBD, APBN |
| | | Pembinaan dan pengawasan peremajaan kelapa sawit oleh penyuluh | Jumlah penyuluh yang mengawal peremajaan kelapa | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota, BMD, Universitas | APBD, APBN |

| C. Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|---|--|-----------------|
| 13. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | |
| 13.1 | Perindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) | Menyusun regulasi perlindungan kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Aseel Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) | Luar kawasan lindung Tersusunnya regulasi perlindungan kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Aseel Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) | Belum ada kegiatan dikarenakan menunggu terbitnya SK menteri terkait KEE dan ABKT | Kegiatan awal yang dilakukan baru sebatas menentukan lokasi kegiatan yang rencananya berada di 3 lokasi: Simpang Heran, OKI (koridor jejaki), Jambul Nanti Parah (koridor harimau), dan Dangku (koridor harimau dan beruang). | Mengusulkan kegiatan tersebut ke gubernur | Dinas Kehutanan | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; BKSDA; Swasta; KPH | APBD; APBN |
| 13.2 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan | Terdapat data hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati | Data disediakan dari BKSDA | Terdapat data tahunan keanekaragaman hayati dari BKSDA | Tahun depan sudah tidak ada aksi dari APBD untuk keanekaragaman hayati | Dinas Kehutanan | BKSDA | APBD; APBN |
| | | Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah kabupaten/kota | Tertakutannya sosialisasi KEE dan kawasan lindung | Tidak ada sosialisasi yang dilaksanakan | | | Dinas Kehutanan | BKSDA, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian | APBD; APBN |
| | | Meningkatkan jumlah forum kolaborasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | Jumlah forum kolaborasi yang dibentuk | Membuat konsep Forum Kolaborasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | Sudah membuat draft tim penyusun Forum Kolaborasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | Membuat Forum Kolaborasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota setelah SK menteri diterbitkan | Dinas Kehutanan | BKSDA; Pemegang ILM | APBD; APBN |
| 13.3 | Inventarisasi Habitat (Mammalia) Flora dan Fauna | Meneruskan kajian teknis pemantauan pelaksanaan Aseel Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) serta mengadakan monitoring evaluasi komersial flora fauna. | Terdapat data pengelolaan keanekaragaman hayati dari hasil monitoring dan evaluasi | | | | BKSDA | BPKH | APBD; APBN |
| 13.4 | Rehabilitasi dan Restorasi Ekosistem | Pembinaan dan pemantauan kegiatan rehabilitasi DAS dengan pelatihan pelaku usaha kelapa sawit | Lokasi pembinaan rehabilitasi DAS | Melakukan sosialisasi dan pembinaan kegiatan rehabilitasi DAS. Membuat desain dengan tujuan rehabilitasi DAS di wilayah KPH Secondo, KPH Lektan, dan Pedamaran, OKI | Total rehabilitasi yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan mencapai 20 ha dalam 5 bulan terakhir | Memberikan pendampingan dan bantuan teknis | Dinas Kehutanan; BPDA | SKK Migas; KPH; PT. PUSRI | APBD; APBN; CSR |
| | | Sosialisasi pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun | Tertakutannya sosialisasi dan implementasi terkait perlindungan dan pengelolaan | Sosialisasi terkait regulasi mengenai perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut ke perusahaan yang beroperasi di areal gambut | Tertakutannya sosialisasi regulasi mengenai perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut ke perusahaan yang beroperasi di areal gambut | Kegiatan rutin monitoring kebakaran untuk perlindungan dan pengelolaan gambut (mulai bulan Maret sampai sekarang) | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian | BRGM; TRIG; Dinas Kehutanan; Dinas Perkebunan; BPBD | APBD; APBN |
| | | Pendampingan tim restorasi gambut | Jumlah usaha kegiatan lahan yang dievaluasi dan diverifikasi | Pembuatan sekat kanal; Melakukan reboisasi; Revitalisasi ekonomi; Pemantauan perusahaan yang beroperasi di areal gambut | Melaksanakan kegiatan pembuatan sekat kanal; Melakukan reboisasi; Revitalisasi ekonomi; dan pemantauan perusahaan yang beroperasi di areal gambut setiap tahun | Konsisten dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan sekat kanal; Melakukan reboisasi; revitalisasi ekonomi; dan pemantauan perusahaan yang beroperasi di areal gambut setiap tahun | BRGM | TRIG; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; Dinas Perkebunan | APBD; APBN |
| 14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan | | | | | | | | | |
| 14.1 | Penyediaan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) | Penyediaan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan PLTB | Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB). Jumlah pekebun/kelompok pekebun penerima sarana dan prasarana untuk penerapan PLTB | Pembuatan peralatan mesin, peralatan pembuatan kompos, alat pertanian, bibit sawit | Diberikan ke 1 kelompok tani dengan anggota 25 orang di Musi Banyuwangi pada 2022 | Pembuatan jumlah kelompok tani penerima sarana prasarana penerapan PLTB | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan kab/kota; GAPKI; APKASINDO | APBD; APBN |
| | | Monitoring dan evaluasi efektivitas sarana dan prasarana dalam mencegah PLTB | Tersedianya data monitoring dan evaluasi dalam mencegah PLTB | Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun | Data sedang dalam proses inventarisasi | | Dinas Perkebunan | Dinas Kehutanan; GAPKI; APKASINDO | APBD; APBN |
| 14.2 | Pembinaan dan Antisipasi Kebakaran Lahan perkebunan | Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun | Jumlah pelaku usaha yang di monitoring dan evaluasi | Pembinaan manajemen dan evaluasi ke 21 perusahaan pemegang ILM PPHH; Melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan menjelang musim kemarau; Penyediaan sarana dan pra sarana; Melaksanakan rapat dengan mengundang perusahaan setiap awal tahun | Tertakutannya kegiatan manajemen dan evaluasi ke 21 perusahaan pemegang ILM PPHH; Tertakutannya kegiatan kesiapsiagaan menjelang musim kemarau; Tertakutannya rapat bersama perusahaan untuk pembinaan dan antisipasi karhutla | Sedang mengaktifkan jadwal pembinaan ke 25 perusahaan pemegang ILM PPHH | Dinas Kehutanan | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; Dinas Perkebunan; BPBD; Swasta | APBD; APBN |
| | | Meningkatkan jejaring Kelompok Tani Petani Api (KTPA) yang terlekat di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun | Kelompok tani petani api yang siaga dalam mencegah kebakaran lahan dan kebun | 1. Dinas Kehutanan memonitoring pembentukan Masyarakat Petani Api oleh perusahaan 2. Melakukan movev terhadap perusahaan dimana salah satu aspek yang dimonev adalah peran KTPA | 1. Terbentuknya kelompok Masyarakat Petani Api 2. Tersedianya data MPA di Dinas Kehutanan dengan total 900 anggota dari 15 MPA di Sumsei | | Dinas Perkebunan; Dinas Kehutanan | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; Perusahaan | APBD; APBN |
| | | Meningkatkan hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun | Tertakutannya monitoring pada wilayah titik api | Monitoring pada wilayah titik api yang dilakukan 2 kali dalam setahun; Kegiatan monitoring bisa dilakukan lebih dari 2 kali apabila mendapat fasilitas dari perusahaan atau KPH | Tertakutannya monitoring pada wilayah titik api | Sosialisasi aplikasi SONGKET ke OPO-CPO yang berkaitan dengan karhutla | Dinas Kehutanan | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; Dinas Perkebunan; BPBD | APBD; APBN |
| | | Menyusun Peraturan terkait KTPA | Terbentuk peraturan untuk KTPA | KTPA diatur dalam Peraturan Nomor 5 tahun 2018 | Pemetaan No. 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar | | Dinas Perkebunan | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian | APBD; APBN |
| 14.3 | Penanggulangan Risiko Bencana Kebakaran | Pemetaan risiko rawan bencana kebakaran | Tersedianya peta risiko rawan bencana kebakaran | | | | BPBD | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; BMKG; Dinas Kehutanan | APBD; APBN |
| 15. Program Pemantauan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor lahan | | | | | | | | | |
| 15.1 | Updating data emisi GRK melalui Sign Smart | Menghitung dan inventarisasi simpangan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit | Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi | Updating data emisi GRK melalui Sign Smart sudah dilaksanakan, namun khusus untuk perkebunan kelapa sawit belum dilaksanakan | | Pelatihan perhitungan data emisi GRK khususnya pada sektor kelapa sawit melalui Sign Smart dengan mengundang pihak-pihak terkait | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian | Rappoda; Dinas Kehutanan; Dinas Perkebunan | APBD; APBN |
| | | Menyusun basis data nilai simpangan karbon dan emisi GRK kelapa sawit | Tersedianya basis data nilai karbon dan emisi GRK kelapa sawit | Basis data disusun oleh K2HK dan diserahkan ke DHP dan Dinas Kehutanan | Basis data nilai karbon dan emisi GRK kelapa sawit tersedia | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; Dinas Kehutanan | Bapperta; Dinas Perkebunan | APBD; APBN |
| 15.2 | Evaluasi Pencegahan Rencanan Lingkungan | Mengarusutakan penurunan emisi di perkebunan ke rencana aksi mitigasi provinsi | Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi | Sudah terlaksana namun belum ada spesifikasi ke perkebunan kelapa sawit | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; Dinas Kehutanan | BPBD; Dinas Perkebunan | APBD; APBN |
| | | Melaksanakan aksi mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit | Tertakutannya aksi mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit | Belum ada aksi mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit | Terdapat data terupdate di Sign Smart, namun tidak ada menyol perkebunan kelapa sawit secara whoplot | | Dinas Perkebunan | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian | APBD; APBN |
| 15.3 | Sosialisasi terkait Perhitungan Emisi GRK | Melakukan sosialisasi perhitungan emisi GRK dengan target masyarakat dan perusahaan | Tertakutannya sosialisasi perhitungan emisi GRK untuk pekebun dan perusahaan | Proses kegiatan sosialisasi dilakukan setiap 1 tahun dan dilaksanakan kepada beberapa perusahaan di Sumatera Selatan | Tertakutannya sosialisasi perhitungan emisi GRK untuk perusahaan | Sudah merencanakan kegiatan untuk perhitungan GRK di sektor perkebunan kelapa sawit | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; Dinas Kehutanan | Dinas Perkebunan | APBD; APBN |
| 15.4 | Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Perkebunan dalam Upaya Penurunan Dampak Emisi GRK | Melakukan sosialisasi dan kegiatan peningkatan kapasitas kepada pelaku usaha perkebunan | Jumlah pelaku usaha perkebunan yang telah diberikan pembinaan | Proses pembinaan sudah dilakukan secara umum namun belum terlaksanakan di bidang perkebunan kelapa sawit | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; Dinas Kehutanan | Dinas Perkebunan | APBD; APBN |

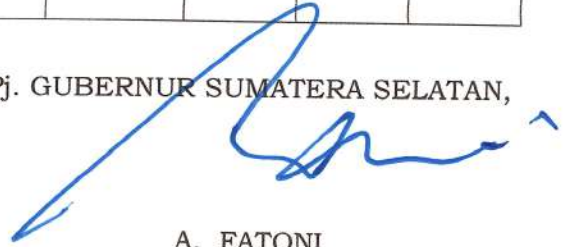
| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|--------------------|
| 16. Program Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pembangunan Rendah Karbon (PRK) | | | | | | | | | |
| 16.1 | Pelaporan dan Verifikasi Potensi Penurunan Emisi GRK di Perkebunan Kelapa Sawit | Melakukan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit | Tersedianya jumlah peluru usaha perkebunan yang melakukan MRV | Belum ada MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian | Dinas Perkebunan: BAPPEDA; Dinas Kehutanan | APBD; APBN |
| 16.2 | Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pemertan dan pembinaan penurunan emisi GRK | Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mengikuti kegiatan pelatihan dan pembinaan | Pelatihan dan pembinaan penurunan emisi GRK dilakukan oleh KJHE | Pada 2022, telah diadakan pertemuan melalui zoom meeting dan 3 kali secara luring di Palembang melibatkan DUNP, Dinas Kehutanan, dan Dinas Perkebunan | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian | Dinas Perkebunan: BAPPEDA; Dinas Kehutanan | APBD; APBN |
| 17. Program Peningkatan pemanfaatan lahan kritis (dan terlintar) sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 17.1 | Identifikasi lahan kritis di perkebunan kelapa sawit | Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan | Jumlah buku statistik perkebunan | | | | Dinas Perkebunan | BPS; Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD; APBN |
| | | Membrgung data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit | Tersedianya data pertanahan dan lahan kritis pada perkebunan kelapa sawit | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Kehutanan | APBD; APBN |
| | | Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efisiensi pengelolaan lahan kritis | Jumlah dokumen yang disusun | | | | Bappeda | Dinas Kehutanan; BPDA | APBD; APBN |
| | | Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan | Jumlah Dokumen Kluster Industri perkebunan | Kajian yang dilakukan pada tahun ini masih berfokus pada komoditi karet | Merencanakan kajian sosial, ekonomi, dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis khusus untuk komoditi kelapa sawit | | Dinas Perkebunan | Academisi; Asosiasi pengusaha | APBD; APBN |
| 17.2 | Pemulihan lahan kritis | Membuat rencana pemulihan lahan kritis sebelum dimanfaatkan untuk rencana pemulihan lahan kritis | Tersedia data pemulihan lahan kritis | Sudah dilakukan pendataan dan pemetaan pada lahan-lahan kritis oleh KJHE yang kemudian diteruskan ke Dinas Kehutanan | Tersedia data lahan kritis | | Dinas Kehutanan | Dinas Perkebunan; BPKH; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian | APBN; APBD |
| 18. Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit | | | | | | | | | |
| 18.1 | Pembinaan AMDAL Perkebunan | Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan | Jumlah peserta workshop | Kegiatan workshop berkolaborasi dengan kajian studi kelayakan pemanfaatan limbah padat dan cair kelapa sawit belum pernah dilaksanakan | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian | Dinas Perkebunan | APBD; APBN |
| 18.2 | Mengembangkan strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri; nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah | Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam pemanfaatan batang kelapa sawit dan nira kelapa sawit | Jumlah MOU business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit, terkhususnya jumlah UMKM yang mengolah nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah | Belum ada kegiatan dari pemerintah dan pihak lainnya | Kegiatan pemanfaatan nira kelapa sawit sudah pernah dilakukan oleh pekebun perantara PSR secara mandiri di Kab. Musi Banyuwasin | Belum ada rencana | Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota | Dinas Perindustrian; Dinas Perdagangan; Dinas Koperasi dan UKM; BUMDes; APKASINDO | Swasta |
| 18.3 | Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan | | Jumlah perkebunan yang telah melakukan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan | Program SISAA (Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit) sudah pernah dilaksanakan di Banyuwasin | Program belum memberikan hasil yang optimal terdendala dengan tutupan kanopi yang berdekatan membuat sumber pakan sapi menjadi berkurang | Membuat perencanaan yang lebih rinci, misalnya memusunkan kriteria umur tanaman sawit yang cocok ditetapi dengan aktivitas bertani sapi | Dinas Perkebunan; Dinas Peternakan | Dinas Perkebunan Kab/Kota; Dinas Peternakan Kab/Kota | APBN; APBD; Swasta |
| 19. Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit sebagai Sumber Energi Terbarukan | | | | | | | | | |
| 19.1 | Pengukuran dan Pemetaan Hasil Perkebunan/PSAP | Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai energi terbarukan | Tersedianya data jumlah PES yang melakukan pemantauan dan evaluasi Palm Oil Mill Effluent (POME) | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | GAPRI; Dinas Perkebunan | APBD; APBN |
| D. Komponen Tata Kelola Perkebunan dan Pemangangan Singketa | | | | | | | | | |
| 20. Program Pengelolaan Isin Lokasi dan HGU untuk kebun kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 20.1 | Evaluasi isin lokasi lintas daerah kabupaten/kota | Koordinasi dan sinkronisasi isin lokasi | Jumlah isin lokasi yang dievaluasi | | | | DPMP/PS | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; ATR BPN; DPUBMTR | APBD |
| 20.2 | Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pemertan ruang | Pengawasan HGU perusahaan | Tersedianya data HGU, jumlah HGU yang dievaluasi | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian | DPUBMTR; ATR BPN | APBD; APBN |
| 20.3 | Penerbitan STD-B kelapa sawit | Pembinaan dan fasilitasi penerbitan STD-B | Jumlah kebun kelapa sawit rakyat yang mendapatkan STD-B | | | | Dinas Perkebunan | DPMP/PS Kab/Kota; Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD; APBN |
| 21. Program penciptaan realisasi kewajibn perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat | | | | | | | | | |
| 21.1 | Pemertan kebijakan fasilitas pembangunan kebun kelapa sawit swadaya oleh perusahaan | Melakukan review terhadap regulasi fasilitas pembangunan kebun kelapa sawit swadaya | Penerbitan peraturan tentang fasilitas pembangunan kebun kelapa sawit swadaya oleh perusahaan | | | | Dinas Perkebunan | GAPRI, MAKSI, APKASINDO | APBD; APBN |
| | | Menyusun panduan teknis kebun kelapa sawit swadaya | Tersedianya data panduan teknis kebun kelapa sawit swadaya | | | | Dinas Perkebunan | GAPRI, MAKSI, APKASINDO | APBD; APBN |
| | | Melakukan konsultasi publik mengenai rancangan peraturan tentang fasilitas pembangunan kebun kelapa sawit swadaya oleh perusahaan | Tersedianya konsultasi publik dan tersedianya peraturan tentang fasilitas pembangunan kebun kelapa sawit | | | | Dinas Perkebunan | GAPRI, MAKSI, APKASINDO | APBD; APBN |
| 21.2 | Sosialisai atau penyadaran petani kelapa sawit swadaya | Melakukan sosialisasi kepada petani kelapa sawit swadaya | Tersedianya jumlah sosialisasi kepada petani kelapa sawit swadaya | | | | Dinas Perkebunan | GAPRI, MAKSI, APKASINDO | APBD; APBN |
| 21.3 | Pembentukan kelompok usaha masyarakat kelapa sawit swadaya | | Tersedianya jumlah kelompok usaha masyarakat kelapa sawit swadaya | | | | Dinas Perkebunan | GAPRI, MAKSI, APKASINDO | APBD; APBN |
| 21.4 | Pengawasan dan pembinaan PSR | Monitoring program PSR | Jumlah kelembagaan yang sudah mendapatkan pembinaan PSR | Pengawasan dilakukan dengan sinkronisasi data replanting, tumbang chipping, pengorekkan (suk kebun) dengan metode monitoring | Monitoring dilakukan 1 kali dalam 2 minggu sedangkan pengawasan dilakukan 2 kali dalam setahun di 6 kab/kota | Meningkatkan target luasan PSR (target tahun ini: 10.500 ha); Menambah jumlah kabupaten penerima PSR (kab penerima PSR tahun ini: Lahat dan Musi Rawas) | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD |
| 21.5 | Pemertan dan evaluasi perusahaan dalam memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit swadaya dan masyarakat yang berkelanjutan | | Luas realisasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat yang berkelanjutan, jumlah perusahaan | | | | Dinas Perkebunan | Swasta | APBD; APBN |
| 22. Program Penyelenggaraan Singketa Kebun Kelapa Sawit | | | | | | | | | |
| 22.1 | Pembentukan tim penyelesaian sengketa | Pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain | Jumlah pelatihan mediasi | Tim fasilitasi sengketa sudah dibentuk namun belum pernah diadakan pelatihan mediasi | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; Dinas Perkebunan | ATR BPN; Biro Hukum | APBD; APBN |
| | | Mediasi penanganan sengketa lahan | Jumlah mediasi sengketa yang terlaksana | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian | ATR BPN | APBD; APBN |
| 22.2 | Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan perkebunan rakyat lintas daerah kabupaten dalam satu provinsi | Fasilitasi reforma agraria melalui penataan aset dan penataan alius | Jumlah konflik yang difasilitasi | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; Dinas Perkebunan | ATR BPN; Biro Hukum | APBD; APBN |
| | | Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan | Tersedianya pengawasan penanganan sengketa | | Evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan dilaksanakan setiap tahun | | Tim Pasca Provinsi Sumatera Selatan (ATR BPN, DUNP, Disut, Disub, Biro Hukum, Kogalsan) | | APBD; APBN |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|---------------------------------|--|
| 23. Program Pengelolaan Hutan | | | | | | | | | |
| 23.1 | Pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi | Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi | Penerimaan sub sektor kehutanan | | | | | Dinas Kehutanan | APSD; APBN |
| | | Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi | | | | | | Dinas Kehutanan | APSD; APBN |
| 23.2 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) Kawasan Perhutanan Sosial | Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi | Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi pada 30 perusahaan | Dari 30 perusahaan yang terlibat dalam kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan terdapat 10 perusahaan yang telah mengajukan pengajuan; Kendala yang dihadapi adalah perusahaan belum memiliki kepastian untuk mengajukan pengajuan; Beberapa perusahaan yang sudah mengajukan pengajuan: PT Hindol, PTN, PT Lottum, PT Cira Tunggal Auri, PT Mestari Sukur Abadi, PT Sanglang (PALI) | Mendorong perusahaan untuk mengajukan pengajuan dengan bersurat | | Dinas Kehutanan | KPH Setempat; APSD; APBN |
| | | Menyediakan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan | Tersedianya data penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan | Menghimbau perusahaan untuk menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan | Baru terdapat 2 perusahaan yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian, yakni PT Cira Tunggal Abadi dan PT SPB | Mendorong perusahaan untuk segera menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan dengan himbauan | | Dinas Kehutanan | Dinas Perkebunan; KPH Setempat; BPH; Perusahaan; GAPI; APSD; APBN |
| | | Menyediakan keleranjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman | Tersedianya data penyelesaian keleranjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman | Fasilitasi telah dilakukan oleh dinas terkait dan bupati di Muai Banyuwati, OKI, Muara Enim, dan Murutara | Data terkait KUD sudah terdapat namun belum lengkap redagran untuk data perorangan tidak ada dikarenakan belum ada yang mendaftar; Koperasi di beberapa kabupaten sudah mengajukan ke Kementerian, paling banyak berada di Kabupaten Muai Banyuwati | | | Dinas Kehutanan | Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota; KUD; APSD; APBN |
| | | Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan | Tersedianya data lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan | Kegiatan pendataan KUD yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan sudah dilakukan; Data diperoleh melalui laporan KUD yang mengajukan surat konfirmasi status lahan ke Ditah sebagai syarat PSK | Tersedianya data KUD yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan | Belum memiliki rencana selanjutnya dikarenakan terbatasnya anggaran | | Dinas Kehutanan | Dinas Perkebunan; APSD; APBN |
| | | Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan yang diterbitkan | Jumlah izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan yang diterbitkan | Kegiatan pra izin: sosialisasi dan pendataan di lapangan terkait awal yang dipakai; Kegiatan pasca pemberian izin: penyusunan perencanaan dan pendampingan pasca panen | Terdapat 199 peruntukan PS yang diterbitkan dari tahun 2010; Data diperoleh dari Kementerian | 1. Melakukan proses pendampingan untuk pokja perhutanan sosial 2. Melakukan sosialisasi terkait fasilitas pemenuhan persyaratan izin 3. Meningkatkan kapasitas penyuluh melalui sosialisasi dan pembinaan terkait persyaratan izin perhutanan sosial | | Dinas Kehutanan | Pokja PS (perhutanan Sosial); Dinas Perkebunan; APSD; APBN |
| 23.3 | Penanaman tanaman MPST (Multi Purpose Tree Species) di kebun kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan | | Jumlah areal di dalam kawasan hutan yang telah di tanami MPST (Multi Purpose Tree Species) | Kegiatan penanaman tanaman MPST baru dilakukan di kebun karet, kopi, dan jagung | | Belum ada rencana untuk mengadakan kegiatan penanaman tanaman MPST di kebun kelapa sawit dengan pertimbangan tingginya potensi konflik | | Dinas Kehutanan | Dinas Perkebunan; APSD; APBN |
| 24. Program Penyelamatan Status Lahan Usaha Perkebunan yang Terindikasi di Ekosistem Gambut | | | | | | | | | |
| 24.1 | Program pembuatan peta kelapa sawit di ekosistem gambut | | Tersedianya peta kelapa sawit di ekosistem gambut | Pembuatan peta sebaran kelapa sawit di ekosistem gambut sebagai salah satu data pendukung dalam penyusunan dokumen RAD KIB | Tersedianya peta sebaran kelapa sawit di ekosistem gambut | | | Dinas Perkebunan | CSO; APSD; APBN |
| 24.2 | Evaluasi kebun yang ada di ekosistem gambut | | Tersedianya dokumen kajian tentang evaluasi kebun di ekosistem gambut | | | | | Dinas Perkebunan | BRGM; TRGD; Dinas Lingkungan Hidup dan Penanaman; APSD; APBN |
| 24.3 | Sosialisasi regulasi untuk kebun kelapa sawit di ekosistem gambut | | Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi | Penyampaian muatan terkait regulasi kebun kelapa sawit di ekosistem gambut disampaikan sebagai salah satu materi di kegiatan lainnya | Sudah pernah disampaikan melalui kegiatan sosialisasi secara hybrid | Merencanakan untuk mengadakan sosialisasi terkait regulasi kebun kelapa sawit di ekosistem gambut di tahun berikutnya | | Dinas Perkebunan | BRGM; TRGD; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian; APSD; APBN |
| 25. Program Pengkuis Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan HIK MHA | | | | | | | | | |
| 25.1 | Peningkatan kapasitas MHA, dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA | Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Jumlah kelembagaan MHA yang dilampirkan | Pendataan awal jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Sumatera Selatan | Terdapat 2 MHA yang sudah terdaftar dan mendapatkan legalitas, yakni MHA Tabat Bonawa di Pagaram dan MHA di Muara Enim | Melakukan pendataan lanjutan untuk mengidentifikasi MHA lainnya di Sumatera Selatan | | Dinas Kehutanan | CSO; KPH; APSD; APBN; CSO |
| | | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA | Jumlah kelembagaan MHA yang dilampirkan | Belum ada kegiatan yang dilaksanakan | | | | Dinas Kehutanan | CSO; KPH; APSD; APBN; CSO |
| | | Fasilitasi MHA dalam penyelesaian sengketa dengan pihak lain | Jumlah sengketa MHA dengan pihak lain yang difasilitasi | Belum ada kegiatan yang dilaksanakan | | | | Dinas Kehutanan | CSO; KPH; APSD; APBN; CSO |
| 25.2 | Sosialisasi regulasi MHA | | Jumlah kelompok MHA yang mendapatkan sosialisasi | Sosialisasi regulasi MHA dan fasilitasi untuk mendapatkan legalitas | Terdapat 2 MHA yang sudah terdaftar dan mendapatkan legalitas, yakni MHA Tabat Bonawa di Pagaram dan MHA di Muara Enim | Fasilitasi untuk menaungkan potensi dan pembinaan MHA ke program-program di dinas terkait; Melakukan pendataan lanjutan untuk mengidentifikasi MHA lainnya di Sumatera Selatan | | Dinas Kehutanan | CSO; KPH; Bappeda; APSD; APBN; CSO |
| 25.3 | Inventarisasi MHA | | Tersedia data masyarakat hutan adat (MHA) | | | | | Dinas Perhutanan | Dinas Kehutanan; KPH; CSO; Swasta; Perguruan Tinggi; Pemkab/Pemkot; Dinas terkait di tingkat kab/kota; MHA; APSD; APBN; CSO; CSR |
| 25.3 | Pengelolaan ekowisata di area MHA | | Data potensi ekowisata di area MHA | | | | | Dinas Perhutanan | Dinas Kehutanan; KPH; CSO; Swasta; Perguruan Tinggi; Pemkab/Pemkot; Dinas terkait di tingkat kab/kota; MHA; APSD; APBN; CSO; CSR |
| 26. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Keternagakerjaan | | | | | | | | | |
| 26.1 | Sosialisasi perlindungan tenaga kerja di rektor perkebunan kelapa sawit | Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit melalui penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial keternagakerjaan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi | | | | | Dinas Ketrans; Dinas Perkebunan | Swasta; APSD; APBN |
| | | Meningkatkan kualitas kader norma keternagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit | | Penguatan keternagakerjaan dan Penguji K3 yang distinguikan kompetensinya | | | | Dinas Ketrans; Dinas Perkebunan | Swasta; APSD; APBN |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|-------------------------------------|---|---|
| 26.2 | Pengawasan pelaksanaan regulasi melalui K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit | Pembinaan K3 | Perusahaan yang Sistem K3 dan jaminan sosial | Perusahaan diperiksa dari jumlah perusahaan dalam WLPJ online | 163 Perusahaan yang telah membentuk SMK3 (Dokumen) | Pembinaan | Dinasakertrans | Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota; Swasta | APBD; APBN |
| | | Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMKK) dengan isu-isu ketenagakerjaan sektor perkebunan kelapa sawit | Persentase Perusahaan yang sudah menerapkan K3 secara konsisten | Berorientasi rencana kerja pengawas ketenagakerjaan yang diintegrasikan dengan pemertanian lapangan | Dokumen | Pembinaan | Dinasakertrans | Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota; Swasta | APBD; APBN |
| | | Pemantauan pengaduan kasus ketenagakerjaan | Jumlah kasus yang diselesaikan | Memeriksa laporan, membuka pemertanian, tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan dimana hasil pemeriksaan berupa nota pemeriksaan atau perusahaan tersebut beres masalah dan di anggap selesai bila tidak ada masalah | 13 Kasus yang sudah diselesaikan | Pembinaan | Dinasakertrans | | APBD; APBN |
| | | Penyidikan tindak pidana pelanggaran hukum ketenagakerjaan | Jumlah Kasus yang sampai pada tahap penyidikan | Memeriksa laporan, mengantusias dan gelar perkara intern, bila kasus berlanjut diteruskan ke Polda, terbit surat penyidikan (SPDP) | Dokumen P21 (Dokumen Lembar Penyidikan) | Pembinaan | Dinasakertrans | | APBD; APBN |
| | | Pengujian kesehatan tenaga kerja di perusahaan | Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pengujian kesehatan di Perusahaan | | | | Dinasakertrans | Swasta | APBD; APBN; CSR |
| | | Pengujian lingkungan kerja | Jumlah Perusahaan yang di uji lingkungan kerjanya | | | | Dinasakertrans | | APBD; APBN |
| | | Pemeriksaan norma ketenagakerjaan | Jumlah perusahaan yang diperiksa norma ketenagakerjaan | Perusahaan diperiksa dari jumlah perusahaan dalam WLPJ online | Dokumen | Pembinaan | Dinasakertrans | | APBD; APBN |
| 26.3 | Pendataan tenaga buruh harian/borongan | | Data Jumlah buruh harian/borongan di setiap perusahaan | | | | Dinasakertrans | Swasta | APBD; APBN |
| E. Komponen Dukungan Pelaksanaan Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit | | | | | | | | | |
| 27. Program pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangka kepentingan daerah | | | | | | | | | |
| 27.1 | Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi ISPO | Menyusun peta jalan strategi komunikasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | Jumlah kegiatan sosialisasi yang terlaksana | Belum ada kegiatan sosialisasi khusus untuk sertifikasi ISPO. Akan tetapi, materi terkait sertifikasi ISPO beberapa kali dimasukkan menjadi salah satu materi yang disampaikan, meskipun dengan topik utama yang berbeda | Sudah menyipikan materi terkait sertifikasi ISPO sebanyak 4 kali | Kegiatan sosialisasi sertifikasi ISPO direncanakan akan diadakan pada tahun 2023 atau 2024 | Dinas Perkebunan | LS (Lembaga Sertifikasi); GAPKI; APKASINDO | LS (Lembaga Sertifikasi); Swasta; APBD; BPDPIKS |
| | | Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO | | Strategi peningkatan frekuensi sosialisasi sertifikasi dilakukan dengan menyipikan materi ke kegiatan sosialisasi lainnya | Sudah menyipikan materi terkait sertifikasi ISPO sebanyak 4 kali | Kegiatan sosialisasi sertifikasi ISPO direncanakan akan diadakan pada tahun 2023 atau 2024 | Dinas Perkebunan | LS (Lembaga Sertifikasi); GAPKI; APKASINDO | LS (Lembaga Sertifikasi); Swasta; APBD; BPDPIKS |
| 27.2 | Evaluasi materi sosialisasi untuk penguatan proses sertifikasi ISPO | Melakukan gap analysis untuk melihat kesesuaian antara standar ISPO yang sudah ada dengan realita implementasinya | Materi sosialisasi untuk penguatan sertifikasi ISPO yang telah dievaluasi | | | | Dinas Perkebunan | LS (Lembaga Sertifikasi); GAPKI; APKASINDO | LS (Lembaga Sertifikasi); Swasta; APBD; BPDPIKS |
| | | Mempertajam proses seleksi data berdasarkan hasil perkebunan sawit yang memiliki sertifikasi ISPO sebagai data baseline | | | | | Dinas Perkebunan | LS (Lembaga Sertifikasi); GAPKI; APKASINDO | LS (Lembaga Sertifikasi); Swasta; APBD; BPDPIKS |
| 28. Program Pendampingan terhadap ISPO | | | | | | | | | |
| 28.1 | Pengembangan Penerapan Penyuluhan dan Pendampingan Sertifikasi ISPO | Melakukan pendampingan/ penyuluhan bagi pekebun untuk pemenuhan sertifikasi ISPO | Jumlah kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang terlaksana | Kegiatan yang dilaksanakan masih diperuntukkan bagi auditor ISPO | Kegiatan penelitian untuk auditor ISPO dilakukan sebanyak sekali di tahun 2022 | Mengadakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan sertifikasi ISPO | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota; Lembaga Sertifikasi | APBD; APBN; BPDPIKS |
| | | Menyusun Panduan Kemiripan antara Perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikasi ISPO | | | | | Dinas Perkebunan | GAPKI; APKASINDO; Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD; APBN; BPDPIKS |
| 28.2 | Peningkatan Kapasitas Penyuluh | Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas untuk penyuluh | Kegiatan workshop dengan mengundang konsultan dan dilaksanakan secara rutin satu kali dalam setahun | Kegiatan peningkatan kapasitas belum dilakukan di tahun 2022 | Mengikuti pola dan selena kegiatan yang sama dengan tahun sebelumnya | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD; APBN |
| | | Menyempatkan pelatihan ISPO untuk petugas di kabupaten/kota | | Pelatihan ISPO untuk petugas di kab/kota belum dilaksanakan | Belum ada hasil | Belum ada rencana | Dinas Perkebunan; Dinas Perdagangan | Dinas Perkebunan Kab/Kota | APBD; APBN |
| | | Membentuk tim kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO | | Belum dibentuk tim kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO | Belum ada hasil | Mengencanakan untuk membentuk forum komunikasi dengan melibatkan asosiasi, swasta, dan pihak-pihak yang sudah memperoleh sertifikasi ISPO | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kab/Kota; GAPKI; APKASINDO; LS | APBD; APBN; Swasta |
| 28.3 | Pengembangan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani/Pekebun | Pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani/pekebun | Jumlah kelembagaan ekonomi pertanian berbasis kawasan yang terbentuk kapasitasnya | Belum ada kegiatan terkait | Belum ada hasil | Mengusulkan pendanaan melalui BPDPIKS untuk pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani/pekebun | Dinas Perkebunan | BPDPIKS | BPDPIKS |
| | | Penguatan kelembagaan dan kemitraan antara pekebun dengan BUMDes untuk dukungan pembiayaan proses sertifikasi ISPO | | Belum ada kegiatan terkait | Belum ada hasil | | Dinas Perkebunan | Perbankan; Dinas Koperasi, KUD, GAPKI, DPMD | APBD; APBN |
| 28.4 | Pengawasan dan Pengujian mutu CPO dalam rangka Memenuhi Standar Ekspor | Melakukan pemantauan mutu CPO dalam rangka Memenuhi Standar Ekspor | Volume sawit yang diuji | Pengawasan dan pengujian mutu CPO dapat dilakukan di 2 tempat, yaitu UPTD BPNB (Bela Standartasi Mutu Barang) dan Dinas Perdagangan | Tersedia produk yang tersertifikasi uji mutu | | Dinas Perindustrian | Dinas Perkebunan; GAPKI | APBD; APBN |
| 28.5 | Pengawasan Mutu Barang Ekspor sesuai SNI, Verifikasi Mutu Produk | Pengawasan mutu hasil perkebunan kelapa sawit rakyat | Volume produk hasil sawit yang diuji | Sosialisasi regulasi ke eksportir, fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pulpa Pembinaan dan Pengawasan Implementasi SNI yang dibentuk oleh Ditjen PPI dimana Dinas Perindustrian menjadi salah satu anggotanya; Produk hasil kelapa sawit yang mendapat pengawasan mutu adalah minyak goreng sawit | Melaksanakan kegiatan sosialisasi secara rutin di setiap tahun | Konsisten dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi regulasi ke eksportir terkait mutu barang ekspor sesuai SNI | Dinas Perdagangan | Dinas Perkebunan | APBD; Swasta; APBN |
| 28.6 | Promosi Produk | Promosi dan pemasaran hasil perkebunan sawit dengan sertifikasi ISPO | Jumlah terlaksananya kegiatan promosi produk ISPO dalam dan luar negeri | Misi dagang, kegiatan kolaborasi yang diinisiasi oleh Dinas Perdagangan dengan melibatkan peran Kedubes dan swasta untuk membawa produk-produk unggulan (salah satunya sawit) untuk dipertemukan di forum pertemuan antar negara | Meningkatkan produk ekspor di Indonesia | Mengaktifkan kembali kegiatan tersebut karena sejak adanya pandemi kegiatan ini vakum sehingga mengganggu perdagangan ekspor di Indonesia; Kegiatan selanjutnya juga ditujukan untuk mengangkat isu black campaign yang banyak merugikan pemerintaan ekspor terhadap produk kelapa sawit | Dinas Perkebunan; Dinas Perdagangan | BPDPIKS, GAPKI | APBN; APBD |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|---|--|--|---|------------------|----------------------------|------------|
| 28.7 | Sosialisasi/STOB kepada petani | | Jumlah kelayakan petani yang sudah mendapat sosialisasi | | | Alasan untuk melakukan sosialisasi kepada eksportir | Dinas Perkebunan | | APSR, APBO |
| 28.8 | Perbaikan Data lahan/koordinasi Pabrik Pengolahan PKS | | Jumlah pabrik pengolahan lahan yang memiliki data SRS koordinat | | | | Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan Kaly/Kota | APSD, APBN |

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI